



Kabupaten Bergerak:

**Inovasi Bertumbuh Menuju
Masa Depan Lestari dan
Berdaya**

Laporan Tahunan 2024-2025
Lingkar Temu Kabupaten Lestari

Daftar isi

Sambutan Ketua Umum LTKL	6
Sambutan Ketua Umum Apkasi	8
1 Menjejakkan Akar Kelestarian	15
2 Benih Benih Perubahan	27
Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan	32
Pilar Tata Kelola Multi Pihak	44
Pilar Ko-Kreasi Bisnis Lestari	52
Pilar Pengukuran Proses	66
Pilar Amplifikasi Narasi	69
3 Jejak Gerak Kabupaten	75
Aceh Tamiang	76
Musi Banyuasin	81
Siak	87
Sintang	93
Sanggau	102
Kapuas Hulu	109
Sigi	116
Gorontalo	125
Bone Bolango	131
4 Dari Balik Lensa & Cerita Jejaring di Tapak	138
5 Di Balik Dapur Sekretariat Membangun Ekosistem LTKL	156

Sambutan Ketua Umum LTKL



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,*

*Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
dan Salam Kebajikan.*

Tahun 2024–2025 adalah periode penting sekaligus penuh tantangan. Transisi pemerintahan di berbagai kabupaten anggota menjadi pengingat bahwa perubahan adalah kepastian. Namun, yang membedakan bukanlah ada atau tidaknya perubahan, melainkan bagaimana kita meresponsnya.

Bagi LTKL, setiap transisi bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Ia adalah momentum untuk memperkuat inovasi, meneguhkan kepemimpinan lokal, dan merawat kesatuan langkah sebagai forum kolektif. Bersama kabupaten anggota dan jejaring mitra, kita terus bergerak menuju target LTKL 2030. Harapannya, pada tahun 2026 kita dapat meluncurkan Cetak Biru Kabupaten Lestari sebagai buah perjalanan kolektif kita selama delapan tahun terakhir.

Laporan ini adalah cerita tentang perjalanan tersebut—perjalanan sebagai sebuah ekosistem. Sebuah perjalanan yang tidak selalu mulus, penuh tantangan, namun juga

kaya akan pembelajaran. Di setiap langkah, kita menemukan alasan untuk bersyukur karena setiap perkembangan, sekecil apa pun, adalah tanda bahwa arah kita semakin jelas.

Kekuatan LTKL ada pada kolektivitas yang terarah. Melalui tata kelola multipihak, inovasi kebijakan, model bisnis berkelanjutan, sistem pengukuran yang transparan, serta narasi berbasis kearifan lokal, kita meneguhkan pijakan bersama. Di tengah krisis iklim, risiko bencana, dan tantangan ekonomi yang terjadi, justru konsistensi, inovasi, dan kolaborasi yang solid menjadi fondasi yang membuat kita mampu bertahan sekaligus bertumbuh.

Saat ini, kita fokus untuk membangun kesiapan dan kemandirian kabupaten. Setiap daerah anggota harus mampu berdiri tegak dengan model pembangunan lestari sesuai konteks lokalnya. Pada saat yang sama, capaian ini harus terhubung dengan agenda nasional, sehingga suara kabupaten tidak hanya terdengar di tingkat lokal, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita terus menjaga semangat, bergerak taktis dan strategis, memperkuat kolaborasi strategis untuk kabupaten lestari dan mandiri. Dengan begitu, transisi pemerintahan di kabupaten bukan hanya siklus, tetapi juga pijakan baru menuju transformasi yang lebih kokoh—demi keberlanjutan ekosistem, kemandirian kabupaten, dan kesejahteraan masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya

Sintang, 18 Agustus 2025

Gregorius Herkulanus Bala
Bupati Sintang & Ketua Umum LTKL

Sambutan Ketua Umum Apkasi



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,*

*Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
dan Salam Kebajikan.*

Sejak terbentuknya Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), APKASI turut menjadi bagian dari perjalanan tersebut hingga kini berperan sebagai Dewan Pembina LTKL sejak 2021. Komitmen untuk membangun kolaborasi strategis semakin nyata pada tahun ini melalui pelaksanaan program bersama yang berfokus pada penguatan kapasitas kabupaten.

Kerja sama antara APKASI dan LTKL telah memperlihatkan bagaimana inovasi di tingkat lokal dapat menjadi contoh nyata dalam mengembangkan model ekonomi hijau. Model yang tumbuh dari pengalaman kabupaten anggota LTKL tidak hanya relevan bagi konteks daerah masing-masing, tetapi juga memiliki nilai strategis untuk direplikasi di kabupaten lain. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan tidak hanya berhenti pada agenda lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan **pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan nilai tambah, serta peluang investasi yang lebih luas**. Melalui replikasi model, keberhasilan yang terbangun

di satu kabupaten dapat menjadi inspirasi dan acuan bagi daerah lain untuk mengembangkan solusi serupa sesuai dengan potensi lokal masing-masing.

Kerja sama ini sejalan dengan arah kebijakan dan program strategis yang dirumuskan dalam **Musyawarah Nasional VI APKASI**, yang menekankan pentingnya memperkuat koordinasi pusat-daerah, mendorong sinkronisasi regulasi, serta memanfaatkan peluang pembiayaan alternatif, termasuk mekanisme berbasis pasar. Seluruh arah kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, mengembangkan potensi investasi, sekaligus menumbuhkan ekosistem pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Dalam konteks tersebut, sinergi antara APKASI dan LTKL bukan hanya mendukung inovasi kebijakan saja, sehingga pada **APKASI Otonomi Expo (AOE) 2025** ini kolaborasi bersama LTKL menjadi penting untuk mengangkat produk lokal dan unggulan daerah yang mampu bersaing.

Ke depan, kami percaya bahwa kolaborasi antara APKASI dan LTKL akan menjadi katalis penting dalam transisi menuju kabupaten yang **mandiri, berdaya saing, dan lestari**. Dengan menggabungkan kekuatan jaringan, kapasitas teknis, dan semangat gotong royong, kita akan terus mengawal dan memperluas kerja sama ini. Harapan kami, perjalanan ini akan membawa kita semakin dekat pada Indonesia Emas: sebuah bangsa yang sejahtera, berdaulat secara ekonomi, dan mampu menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 21 Agustus 2025

Bursah Zarnubi
Bupati Lahat & Ketua Umum APKASI

KRISIS PLANET

AGENDA PRIORITAS NASIONAL

UU NO. 59 2024

AMBANG BATAS INOVASI EKONOMI BASIS ALAM

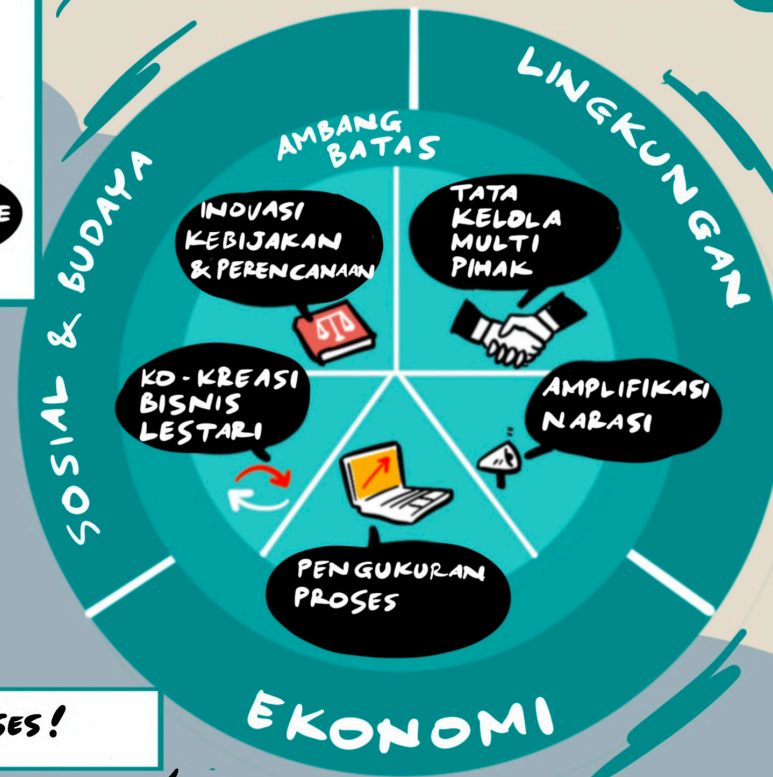
ISU PRIORITAS

- BERBASIS SAINS / ILMIAH
- BERBASIS LANSKAP
- STORYTELLING
- PERUBAHAN PERILAKU
- AKSI BERSAMA

PROTECT

RESTORE

RISET



PROSES!

PROSES BERUBANG

MENDORONG AKSELERASI PEMBANGUNAN DI TINGKAT KABUPATEN

GORONTALO

SIK

MUSI BANYUASIN

KAPUAS HULU

SIGI



ACEH TAMIANG

SANGGAU

SINTANG

BONE BOLANGO

AKSI BERSAMA & ROADMAP

RENCANA AKSI!

PERTEMUAN RUTIN

KLUSTER KETAHANAN BENCANA

KETAHANAN PANGAN

PANGAN GIZI

MONITORING LAJU DEFORESTASI

INDEKS KUALITAS LAHAN

PELIBATAN MULTIPIHAK DOKUMEN KAJIAN BENCANA

KOMUNITAS PEREMPUAN

DISCOVER

FASE MENGAJAR

DEFINE

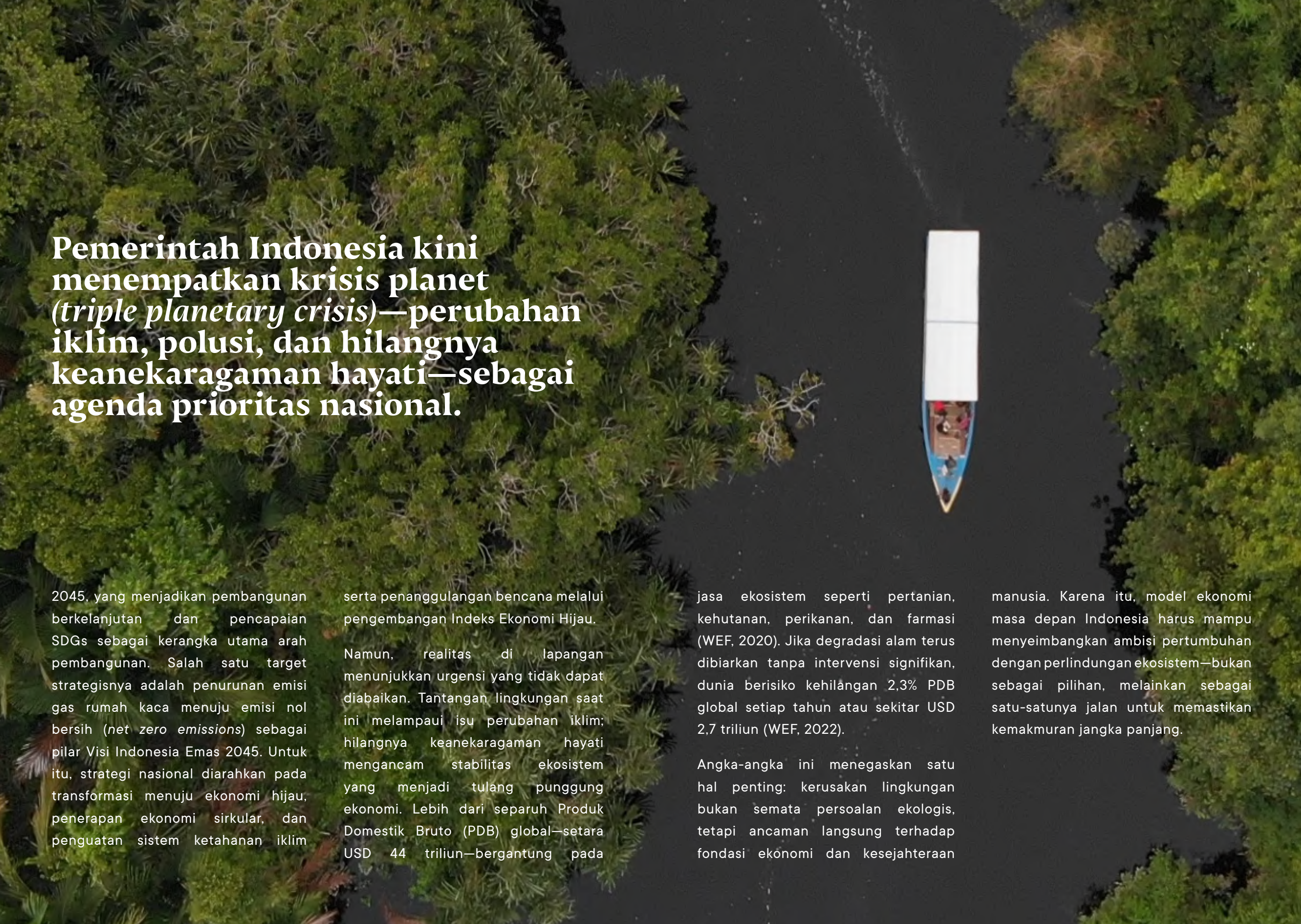
FASE TUMBUH

DEVELOP

AGAH



MENJEJAKKAN AKAR KELESTARIAN



Pemerintah Indonesia kini menempatkan krisis planet (*triple planetary crisis*)—perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati—sebagai agenda prioritas nasional.

2045, yang menjadikan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs sebagai kerangka utama arah pembangunan. Salah satu target strategisnya adalah penurunan emisi gas rumah kaca menuju emisi nol bersih (*net zero emissions*) sebagai pilar Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, strategi nasional diarahkan pada transformasi menuju ekonomi hijau, penerapan ekonomi sirkular, dan penguatan sistem ketahanan iklim

serta penanggulangan bencana melalui pengembangan Indeks Ekonomi Hijau.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan urgensi yang tidak dapat diabaikan. Tantangan lingkungan saat ini melampaui isu perubahan iklim; hilangnya keanekaragaman hayati mengancam stabilitas ekosistem yang menjadi tulang punggung ekonomi. Lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) global—setara USD 44 triliun—bergantung pada

jasa ekosistem seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan farmasi (WEF, 2020). Jika degradasi alam terus dibiarkan tanpa intervensi signifikan, dunia berisiko kehilangan 2,3% PDB global setiap tahun atau sekitar USD 2,7 triliun (WEF, 2022).

Angka-angka ini menegaskan satu hal penting: kerusakan lingkungan bukan semata persoalan ekologis, tetapi ancaman langsung terhadap fondasi ekonomi dan kesejahteraan

manusia. Karena itu, model ekonomi masa depan Indonesia harus mampu menyeimbangkan ambisi pertumbuhan dengan perlindungan ekosistem—bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai satu-satunya jalan untuk memastikan kemakmuran jangka panjang.

Mendorong Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten

Krisis lingkungan tidak mengenal batas wilayah. Ia adalah persoalan lintas batas negara dan lintas skala geografis, di mana tekanan dan dampaknya saling terhubung dalam sebuah sistem terbuka. Gangguan ekosistem di satu wilayah dapat memicu rangkaian konsekuensi di wilayah lain—baik dari skala lokal ke global, maupun sebaliknya.

Di Indonesia, tekanan terhadap sumber daya alam terlihat jelas dalam tingginya angka deforestasi, degradasi lahan, pencemaran, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi. Aktivitas seperti perubahan penggunaan lahan, pertambangan, dan ekspansi perkebunan kerap berjalan tanpa mempertimbangkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tanpa pengelolaan yang bijaksana, krisis ekologis yang ada dapat semakin diperburuk oleh kelalaian di tingkat lokal.

Kebijakan dan program strategis di tingkat nasional, meskipun dirancang untuk kemajuan, memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap daerah. Mandat implementasi, pembangunan lintas sektor, serta program nasional dan desentralisasi membuka peluang besar percepatan pembangunan daerah melalui dukungan anggaran, infrastruktur, dan penguatan kapasitas. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya jika tata kelola fiskal, sosial, dan lingkungan di tingkat lokal siap dan responsif.

Sejalan dengan kondisi tersebut, model ekonomi Indonesia saat ini masih mengandalkan pertumbuhan cepat yang ditopang oleh sektor-sektor industri yang berkaitan dengan pertambangan dan perkebunan. Kontribusi sektor-sektor ini terhadap PDB memang signifikan, namun dibayar mahal dengan degradasi lingkungan yang masif dan berisiko menggerus daya dukung serta daya tampung ekosistem.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya menurunkan pengangguran sekaligus menciptakan peluang kerja yang inklusif dan ramah lingkungan. Kuncinya adalah memperkuat ekosistem kerja lokal—terutama sektor informal dan *social entrepreneurship*—serta memastikan program nasional yang dijalankan di kabupaten membuka akses ke sektor strategis seperti ketahanan pangan dan pengembangan bisnis dan investasi berkelanjutan.

**Pertanyaannya,
bisakah daerah mampu
membangun model
ekonomi yang tidak
hanya mendorong
pertumbuhan, tetapi
juga menjaga kelestarian
lingkungan?**





Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta pengembangan rantai nilai (*value chain*) dari hulu hingga hilir yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 8%, langkah ini bukan sekadar opsi, tetapi menjadi fondasi penting untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, tangguh, dan ramah lingkungan.

Pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku UMKM perlu menjadi fokus, disertai peningkatan kapasitas agar mereka mampu beradaptasi dengan pasar tanpa merusak ekosistem. Keterlibatan aktif SDM lokal di setiap tahap akan memastikan pekerjaan yang

tercipta bersifat berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada lingkungan.

Di titik inilah pemerintah kabupaten memegang peran strategis. Tantangan ini bukan sekadar mengikuti dan menjalankan apa yang sudah ada, melainkan mengoreksi haluan menuju pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berakar pada potensi lokal. Menyadari urgensi tersebut, sembilan kabupaten pendiri Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mendeklarasikan komitmen bersama pada 2017 untuk menjadi wilayah yang **lestari dan mandiri**—daerah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan, sekaligus membangun ekonomi yang kokoh berbasis potensi lokal.

Sejalan dengan visi Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang menempatkan perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sebagai pilar utama, kabupaten memiliki ruang untuk memaksimalkan potensi pemberdayaan ekonomi lokal. Program-program yang fokus pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memproduksi dan mengembangkan produk lokal secara mandiri dapat menjadi fondasi kemandirian ekonomi berkelanjutan.

Lebih jauh, kebijakan daerah yang mendorong praktik pertanian berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha lokal

dalam mengelola sumber daya alam secara bijak, akan memberi dampak ganda. Selain melindungi lingkungan, kebijakan ini menciptakan lapangan kerja hijau yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan agenda yang dapat berjalan beriringan untuk menciptakan masa depan yang lestari dan sejahtera.

Fase Tumbuh: Memacu Transformasi Kabupaten Lestari dan Mandiri



LTKL lahir dari kesadaran akan *natural resource curse*—paradoks di mana daerah kaya sumber daya alam justru terjebak dalam kerentanan ekonomi, rendahnya nilai tambah, dan tingginya kemiskinan akibat tata kelola yang tidak berkelanjutan. Solusi parsial tidak cukup; yang dibutuhkan adalah perubahan sistem (*system change*).

Dengan mengidentifikasi daya ungkit—faktor strategis yang dapat memicu transformasi lintas sektor—LTKL mengarahkan upaya pada sektor-sektor kunci, khususnya pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan (AFOLU). Pendekatan ini dipandu oleh *science-based approach*, dengan penetapan threshold spesifik setiap kabupaten untuk mengatasi *tragedy of the commons* secara kontekstual.

Fase LTKL

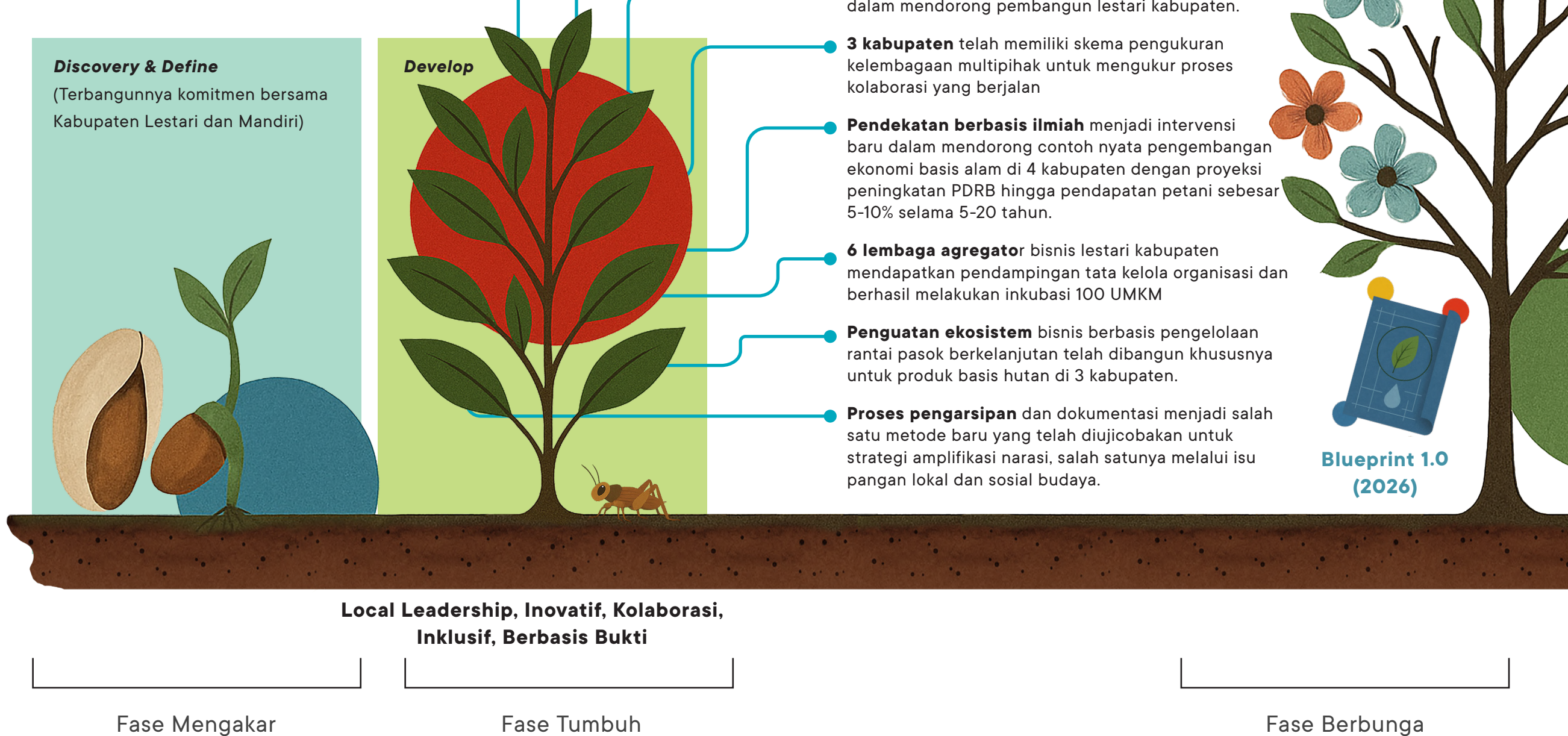


Saat ini, LTKL berada di Fase Tumbuh yang dirancang untuk mengakselerasi transformasi kabupaten menuju keberlanjutan, dengan berangkat dari praktik nyata yang telah berjalan selama delapan tahun terakhir. Sebagai organisasi yang berfokus pada perubahan sistem (*system change*), LTKL menempatkan transformasi menuju Kabupaten Lestari dan Mandiri sebagai tujuan strategis—yakni daerah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa merusak alam, sekaligus membangun ekonomi tangguh dari potensi lokal.

Target LTKL 2030 jelas dan terukur: 50% perlindungan hutan serta peningkatan kesejahteraan bagi 1 juta masyarakat serta mampu membangun cetak biru pembangunan lestari untuk direplikasi di seluruh kabupaten di Indonesia. Menjelang tahun terakhir Fase Tumbuh (2026), LTKL menyadari bahwa tidak semua isu di kabupaten anggota dapat diatasi secara langsung. Namun, LTKL memilih bergerak melalui pendekatan perubahan sistem dengan mencari dan mengoptimalkan daya ungkit strategis yang dapat memicu pergerakan elemen-elemen lain dalam ekosistem kabupaten.

Perubahan ini bekerja melalui dua arena utama: *government system* dan *market system*. Kedua sistem ini, meski sering berada dalam tarik-menarik kepentingan, justru dapat saling menguatkan bila diarahkan dengan tepat. Dengan mengorkestrasi sinergi keduanya, transformasi menuju Kabupaten Lestari dan Mandiri dapat menjadi arus utama pembangunan daerah—bukan sekadar inisiatif terpisah.

Sinyal perubahan LTKL di Fase Tumbuh





BENIH-BENIH PERUBAHAN

2

Untuk membuktikan dan mengakselerasi daya ungkit menuju pembangunan berkelanjutan, LTKL mengembangkan mini model Kabupaten Lestari dan Mandiri atau *Proof of Concept* (PoC). Model ini dirancang berbasis sains (*science-based approach*), dengan mempertimbangkan ambang batas (*threshold*) yang spesifik pada setiap kabupaten, sehingga solusi yang dihasilkan relevan, terukur, dan adaptif terhadap konteks lokal.

Berdasarkan analisis mendalam dan *anecdotal evidence* dari lapangan, PoC dikembangkan sebagai kerangka transformasi nyata menuju kabupaten yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini dibangun di atas lima pilar utama:



1.

Kebijakan inovatif dan perencanaan daerah yang terintegrasi dengan target pembangunan berkelanjutan.

2.

Proses multipihak yang inklusif, memastikan seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.



3.

Ko-kreasi bisnis dan investasi berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.

4.

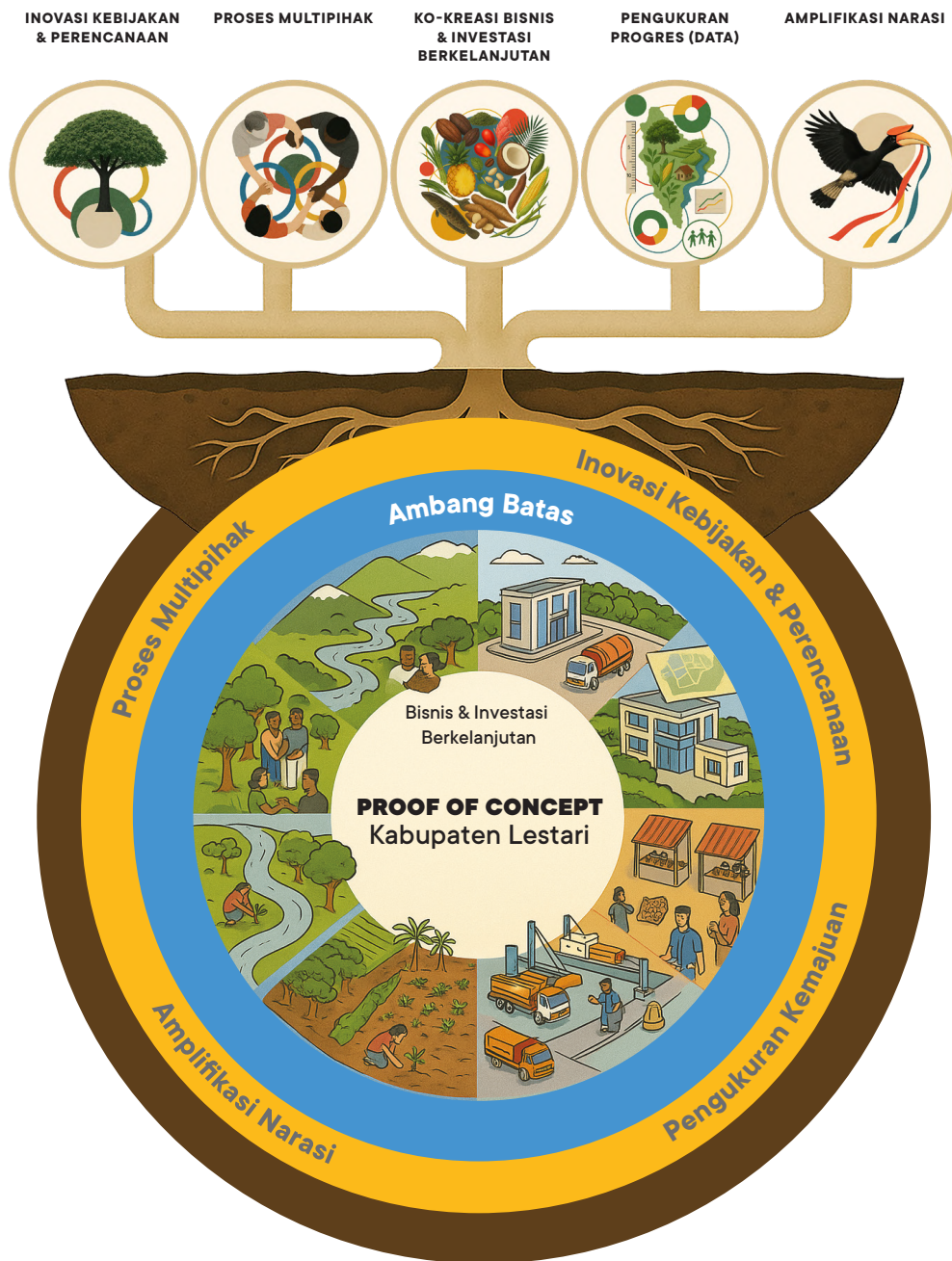
Pengukuran progres berkelanjutan yang konsisten, transparan, dan berbasis indikator terukur.

5.

Amplifikasi narasi, mengangkat kisah sukses dan pembelajaran untuk replikasi di daerah lain.

Setiap PoC dirancang unik, menyesuaikan dengan tantangan bersama (*tragedy of the commons*) yang ingin diatasi di masing-masing wilayah. Dengan demikian, setiap kabupaten memiliki blueprint transformasi yang berbeda namun saling melengkapi, membentuk ekosistem Kabupaten Lestari dan Mandiri di Indonesia.

Proof of Concept Kabupaten Lestari





Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan

Inovasi Kebijakan dan Perencanaan: Membangun Sistem yang Terintegrasi, Adaptif, dan Berbasis Ilmiah

Keadaan Awal

Kebijakan dan perencanaan menjadi elemen yang sering dijadikan kriteria pengukuran keberhasilan sebuah advokasi. Namun, terkadang hal tersebut hanya sampai menjadi dokumen tanpa memastikan prinsip utama dalam sebuah kebijakan yang bisa dimonitor hingga implementasi.

Pada fase tumbuh, Pillar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan memiliki fokus utama untuk *enabling* Kabupaten agar dapat memperoleh dukungan dan komitmen politik dari para pemangku kepentingan untuk menjalankan proses penyusunan kebijakan dan perencanaan yang mengedepankan prinsip terintegrasi, adaptif, inklusif dan berbasis bukti/ilmiah secara mandiri

Intervensi: Langkah-Langkah Strategis Menuju Perubahan

1.

Inovasi Proses: Meningkatkan Kapasitas Perencana & Analisis Kebijakan dalam Membangun Proses Pentahelix

Salah satu langkah paling signifikan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas untuk menerapkan proses pentahelix—kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Melalui berbagai pelatihan dan kolaborasi, seperti Pelatihan Foresight yang diadakan pada Februari 2025, kabupaten-kabupaten anggota LTKL, seperti Sigi, Siak, Sanggau, Sintang, Gorontalo, Bone Bolango, Musi

Banyuasin dan Aceh Tamiang, mulai mampu merencanakan kebijakan yang lebih visioner dan berbasis pada analisis jangka panjang. Dalam pelatihan ini, para perencana daerah dibekali dengan kemampuan untuk tidak hanya merespons, tetapi membentuk masa depan. Melalui foresight, perencana daerah tidak hanya terpaku pada evaluasi

mengidentifikasi tren dan sinyal perubahan sebagai landasan untuk secara aktif merancang masa depan yang diinginkan. Hasilnya adalah perencanaan pembangunan yang visioner, di mana setiap kebijakan dirancang untuk mewujudkan kabupaten yang lestari dan mandiri.

Selain *foresight*, inovasi proses yang dilakukan dengan mendorong proses kolaborasi multipihak adalah penyusunan dokumen skenario ekonomi basis alam di 5 kabupaten (Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Aceh Tamiang dan Siak) dengan menggunakan metode MicMac, Mactor dan Multipol. Dalam pembuatan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, mengelola kompleksitas dan ketidakpastian adalah tantangan utama. Untuk itu, penerapan metode seperti Micmac, Mactor dan Multipol menjadi langkah inovatif yang bisa membantu merumuskan kebijakan yang lebih visioner, inklusif dan adaptif. Menariknya, metode ini melengkapi dari metode sebelumnya untuk para perencana dan analis kebijakan dengan memperkuat analisa aktor-aktor kunci yang memperkuat kolaborasi pentahelixnya.

Rangkaian kedua proses ini secara terpadu menghasilkan dokumen kebijakan dan perencanaan yang tidak hanya visioner, tetapi juga berakar kuat pada basis data yang valid dan dapat diverifikasi. Pendekatan ini dirancang agar inklusif—melibatkan beragam pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, hingga media—sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi kolektif dan perspektif multipihak. Adaptivitasnya tercermin dari kemampuan merespons perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, sembari tetap menjaga arah strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap keluaran metode langsung diterjemahkan ke dalam langkah-langkah operasional yang jelas—apa yang diprioritaskan, siapa penanggung jawabnya, kapan tenggat waktunya, dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur kemajuan. Dengan demikian, hasilnya bukan sekadar dokumen, melainkan peta jalan yang dapat digunakan secara praktis untuk memandu implementasi, memantau progres, dan menyesuaikan strategi sesuai perkembangan di lapangan.



Diskusi Multipihak Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan isu dan aktor FOLU

2.

Integrasi Komitmen Kebijakan dalam Proses Perencanaan

Di sisi lain, LTKL juga mengimplementasikan integrasi komitmen kebijakan pada proses perencanaan kabupaten. Salah satu contoh paling nyata dari intervensi ini adalah Penyusunan RPJMD kabupaten yang menggunakan basis riset seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Sigi, yang kini telah mengintegrasikan hasil riset terkait model ekonomi berbasis alam. Dengan memasukkan temuan-temuan ilmiah dalam RPJMD, Sigi mampu merencanakan pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi,

tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen untuk menerapkan kebijakan berbasis bukti kini mulai menjadi bagian dari proses perencanaan kabupaten. Hal ini juga dilakukan di kabupaten lainnya dan progres ini menunjukkan bahwa perlu ada isu prioritas yang disepakati menjadi 'north star' kabupaten seperti yang saat ini juga dilakukan di Kabupaten Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Siak dan Aceh Tamiang yang telah memetakan isu dan aktor prioritas terkait dengan sektor FOLU.



Diskusi Multipihak Kabupaten Sanggau terkait dengan isu dan aktor FOLU



Diskusi Multipihak Kabupaten Sintang terkait dengan isu dan aktor FOLU

3.

Pendekatan Ilmiah untuk Membangun Model Ekonomi Lestari

Salah satu inovasi kunci yang diusung oleh Pillar ini adalah Penerapan pendekatan ilmiah (***scientific approach***) dalam membangun model ekonomi lestari dan mandiri di tingkat kabupaten. Melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah, pemerintah kabupaten didorong untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara tegas memperhatikan batas-batas ekologi yang ditetapkan secara ilmiah. Salah satu langkah konkret adalah penerapan kajian ekonomi basis alam untuk wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori 'kritis', seperti yang dilakukan di Kabupaten Sigi. Penggunaan data dan analisis ilmiah dalam proses perumusan kebijakan, memungkinkan pemerintah kabupaten untuk merancang model ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, memberikan insentif kepada masyarakat, tanpa

mengabaikan upaya pelestarian lingkungan. Sementara itu di Kalimantan Barat, pendekatan serupa juga dilakukan melalui sebuah proses kolaboratif untuk pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Melalui sebuah lokakarya yang diinisiasi bersama, hasil studi kajian ilmiah yang memuat proyeksi ekonomi dan fiskal digunakan untuk memperkuat proses penentuan PUD, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten (Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu) dapat memilih komoditas secara lebih terukur dan berbasis bukti. Inovasi ini menegaskan pentingnya integrasi antara pertimbangan ilmiah dan proses pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.



Diskusi Multipihak terkait PUD Kalimantan Barat : Kolaborasi Berbasis Data dan Bukti Ilmiah

LTKL juga memfokuskan perhatian pada adopsi mekanisme yang ada untuk mendorong ekonomi lestari dan menemukan ‘titik temu’ yang dapat menjadi daya ungkit. Mekanisme utama yang saat ini telah diterapkan adalah model pengembangan Ekonomi lestari berbasis lahan yang telah dikelola oleh masyarakat seperti Perhutanan Sosial, Rimba Gupung dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Hal ini menjadi fokus selama satu tahun ini dikarenakan banyak lahan yang telah diadvokasi untuk mendapatkan izin akses lahan dan yang belum dikembangkan mekanisme ekonominya. Salah satu contohnya adalah penetapan Tanah Cadangan Umum Negara menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 72 Ha di Desa Bunga, Kabupaten Sigi untuk kepentingan masyarakat menjadi contoh nyata implementasi reforma agraria yang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan ini tidak hanya memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ke masyarakat, tetapi juga membuka peluang untuk mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan, lahan tersebut dapat dioptimalkan

untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat—seperti agroforestri atau usaha ekonomi lainnya—sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh masyarakat desa. Di Kabupaten Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu yang sedang dilakukan proses advokasi pengembangan model ekonomi di area pasca izin perhutanan sosial dan rimba gupung, bahkan area Area Penggunaan Lain (APL) berhutan untuk dibangun model ekonominya melalui skema Produk Unggulan Daerah.



Potret Lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
di Desa Bunga, Kabupaten Sigi



Tim Survey Lahan Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA) di Desa Bunga, Kabupaten Sigi

Progress: Kemajuan Menuju Kebijakan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sejalan dengan pergantian kepemimpinan, setahun terakhir ini menjadi momentum bagi kabupaten untuk mempertajam dan memperbarui komitmennya. Pemanfaatan momentum ini diejawantahkan dengan munculnya beberapa kebijakan dan perencanaan yang sudah disahkan untuk mendorong Kabupaten Lestari dan Mandiri. Pemerintah daerah kini mulai mengintegrasikan **konsep pembangunan berkelanjutan** dalam kebijakan perencanaan mereka, dan ini tercermin dalam berbagai **dokumen perencanaan strategis** yang telah disusun di tingkat kabupaten. Beberapa pencapaian utama antara lain:

1. Kabupaten Sigi telah mengintegrasikan rekomendasi kuantitatif dari riset Cendekia Iklim Indonesia (CII) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 . Komitmen yang diberikan mencakup adopsi indikator lingkungan dan ekonomi, serta penggunaan proksi terukur yang menunjukkan ambisi lebih tinggi dalam mencapai visi Sigi yang maju, berkelanjutan, dan lestari. Salah satunya adalah menetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 79,38 dan Indeks Ekonomi Hijau yang terukur sebesar 77,28.
2. Terintegrasinya beberapa kebijakan hijau ke dalam rencana kerja pemerintah kabupaten seperti peta jalan Sigi Hijau, RAD Siak Hijau, dan beberapa inisiatif lainnya yang menunjukkan bahwa sebuah kebijakan tidak hanya menjadi dokumen semata tapi juga terintegrasi dalam indikator kinerja kabupaten.



Sigi Integrasikan Hasil Riset Ilmiah dalam RPJMD 2025-2029

3. Adopsi dan Rekognisi Provinsi terhadap progres kabupaten anggota LTKL, salah satunya dari Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan rekognisi kepada Kabupaten Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu terkait pengembangan produk unggulan daerah (PUD) basis alam dan dijadikan model percontohan untuk mendukung target capaian ekonomi hijau. Selain itu, juga sedang berproses dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Siak yang akan didorong ke tingkat provinsi untuk memastikan proses adopsi lebih luas.

4. Meningkatnya kapasitas perencana muda yang telah diikuti oleh 8 kabupaten anggota bersama dengan pusbindiklatren Bappenas. Salah satunya pelatihan Foresight bersama Nalar Institute yang telah diadopsi oleh 5 kabupaten anggota dalam perencanaan daerahnya.



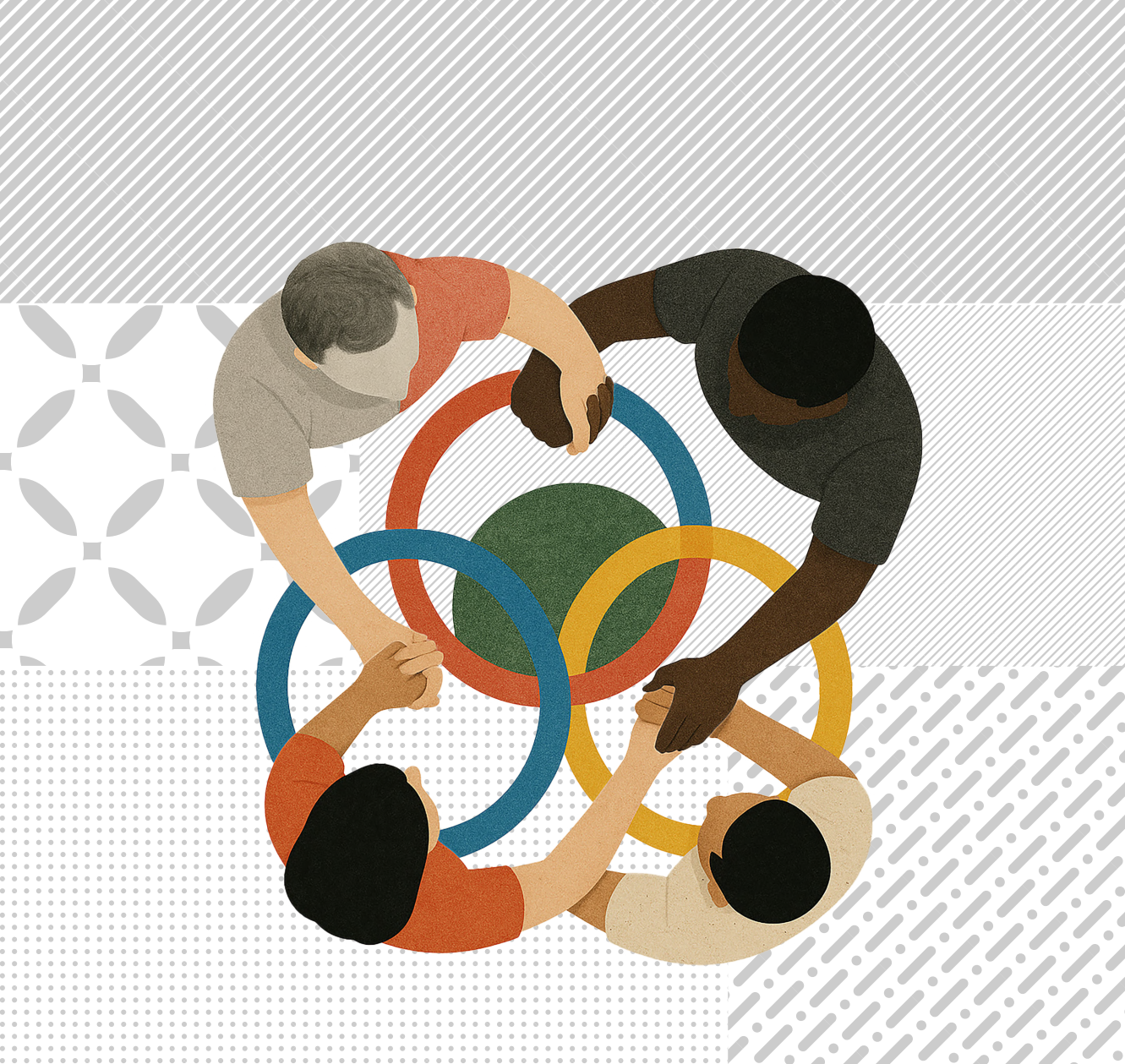
Konsultasi Publik RAD Siak Hijau



Proses Audiensi Sertifikat Lahan TORA dengan Kementerian ATR/BPN



Proses Diskusi Penyusunan RAD Siak Hijau



Pilar Tata Kelola Multipihak

Menguatkan Tata Kelola Multipihak untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kadaan Awal

Pada fase tumbuh, Pilar Tata Kelola Multipihak memiliki fokus utama untuk membantu Kabupaten anggota LTKL agar dapat menunjukkan target dan aksi bersama yang disepakati oleh secara multipihak. Isu utama yang dihadapi dan menjadi tantangan adalah efisiensi anggaran daerah, optimalisasi sumberdaya dan capaian .

Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai pihak dengan tujuan bersama yang jelas. Oleh karena itu, LTKL percaya bahwa model kolaborasi multipihak dapat menjadi salah satu solusi untuk dapat menghadapi tantangan mengenai efisiensi anggaran daerah dan mendorong optimalisasi sumberdaya lainnya dalam meningkatkan capaian daerahnya, serta memastikan inklusivitas bisa terwujud.

Intervensi dan Capaian Pilar Tata Kelola Multipihak

Untuk memperkuat peran Tata Kelola Multipihak di tingkat kabupaten, LTKL melaksanakan serangkaian intervensi strategis yang dirancang untuk memastikan setiap pihak—pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan media—bekerja menuju tujuan pembangunan yang sama.

1.

Integrasi Proses Multipihak dalam Tata Kelola Pemerintahan

LTKL memfasilitasi lahirnya mekanisme pemerintahan kolaboratif yang kini diadopsi di delapan kabupaten anggota: Gorontalo, Siak, Aceh Tamiang, Musi Banyuasin, Kapuas Hulu, Sintang, Sigi, dan Sanggau. Beberapa kabupaten telah menuangkannya ke dalam Peraturan Bupati atau Surat Keputusan yang mengatur mekanisme pemerintahan kolaboratif. Hasilnya, agenda pembangunan bersama yang disepakati lintas pihak kini menjadi bagian dari perencanaan resmi pemerintah daerah.

2.

Penyepakatan Target Bersama Kabupaten

Melalui forum multipihak, LTKL memfasilitasi proses untuk menyepakati target bersama antara pemerintah kabupaten dan mitra pembangunan (sektor swasta, LSM, masyarakat). Dalam forum multipihak, para pihak menyelaraskan target pembangunan yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan yang lebih holistik, sehingga setiap pihak bekerja menuju tujuan yang sama, secara terukur.



Proses Audiensi Hasil Riset Ilmiah yang difasilitasi oleh KMP Sigi Hijau



Showcase Kemitraan Multipihak KMP Sigi Hijau pada Festival Danau Lindu 2025

3.

Penguatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Multipihak Kabupaten

LTKL melakukan diagnostik kesiapan forum multipihak di tiga kabupaten yang terhubung dengan inisiatif berbasis lanskap seperti Siak, Aceh Tamiang dan Sintang. Hal tersebut dijadikan sebagai alat refleksi terhadap sinyal kemajuan kemitraan multipihak di kabupaten dari sisi kepemimpinan, kolaborasi, tim inti (*backbone*), pengukuran dampak

dan kemitraan yang terbangun. Berdasarkan pengukuran sinyal tersebut, harapannya kabupaten dapat mengoptimalkan peran kemitraan multipihak sebagai forum komunikasi atau bahkan sebagai bagian dari strategi membuka kolaborasi dan pendanaan kedepan.

Kriteria Sinyal Perubahan Forum Multipihak

	Inisiasi	Membangun Fondasi	Visi Bersama	Struktur	Transformasi
 Kepemimpinan	Adanya kesadaran dan pemahaman bersama tentang isu, modalitas dan tantangan di kabupaten	Para pihak berinisiatif membahas isu di kabupaten dan bekerja secara paralel	Para pihak berkomitmen dalam kepemimpinan kolaboratif untuk mengatasi isu kabupaten	Terdapat struktur kepemimpinan dan pengambil keputusan dalam kemitraan multipihak	Kepemimpinan kolaboratif memengaruhi berbagai tingkatan dan aspek dalam sistem kabupaten
 Kolaborasi	Para pihak berdialog dalam forum untuk membahas rencana dan program yang dikerjakan	Terdapat konektivitas antar program yang dikerjakan para pihak di kabupaten	Terdapat program bersama dan peta jalan yang disepakati para pihak	Kemitraan multi pihak melaksanakan aksi kolaboratif dengan mempertimbangkan peningkatan komponen dalam mendukung kerjasama	Proses kolaborasi membuka insentif dan sudah memiliki dampak di kabupaten
 Tim Inti	Terdapat ketertarikan dari personal/kelompok untuk memperkuat/bergabung di dalam backbone sekretariat kemitraan multipihak	Terdapat backbone sekretariat kemitraan multipihak dan pembagian peran telah teridentifikasi	Backbone memfasilitasi kegiatan operasional di sekretariat kemitraan multipihak	Backbone sekretariat multipihak mampu memobilisasi sumber daya (SDM/ finansial/data)	Backbone kemitraan multipihak telah dapat melakukan perubahan dalam sistem
 Pengukuran Dampak	Kemitraan multipihak memahami pentingnya dampak kontribusi para pihak yang ingin diukur	Terdapat penyepakatan metode, data dan pengukuran dampak secara kolektif	Kemitraan multipihak memiliki kesepakatan berbagi data	Kemitraan multipihak memiliki sistem pelaporan pengukuran dampak dalam sebuah dashboard	Kemitraan multipihak dapat mengukur dampak secara kolektif di kabupaten
 Institusi Kelembagaan	Fungsi dan urgensi kemitraan multipihak telah dipahami bersama	Terdapat regulasi yang dapat mendukung kemitraan multi pihak	Kelembagaan multipihak telah terbentuk melalui surat keputusan entitas kelembagaan	Kelembagaan multipihak berfungsi sebagai pusat data/hub investasi/ memiliki peran peningkatan kapasitas di kabupaten	Kelembagaan multipihak sudah memiliki kemandirian sumber daya termasuk finansial dan mengukur berdampak yang dihasilkan

Progres Adopsi Proses Multipihak di Kabupaten

► Adopsi Model Aksi Kolaboratif Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sintang menjadi pelopor dengan mengesahkan Peraturan Bupati Pemerintahan Kolaboratif, diikuti oleh Sigi dan Sanggau. Gorontalo, Siak, Musi Banyuasin, Aceh Tamiang, dan Kapuas Hulu juga menetapkan SK lembaga multipihak, memperkuat struktur kolaborasi di tingkat daerah.



Diskusi Multipihak terkait Rencana Bersama Sabang Merah Berdompu Kabupaten Sanggau



Audiensi Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau bersama Bupati Siak



Diskusi Multipihak Pembentukan Tim RAD Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (P3BPSLS) Kabupaten Sintang



Diskusi Cetak Biru Kesiapan Forum Multipihak Kabupaten Sintang

► Peta Gotong Royong Sebagai Alat Deteksi Kolaborasi Kabupaten

Peta ini memvisualisasikan sebaran inisiatif 107 mitra di seluruh kabupaten anggota dan menghasilkan valuasi sekitar 375 Milyar Rupiah. Proses ini dilakukan oleh inisiatif Pemerintah Kabupaten bersama dengan Kelembagaan Multipihaknya untuk mengetahui kontribusi yang sebagian besar bersifat *in-kind* dalam bentuk program atau infrastruktur. Melalui Peta Gotong Royong ini juga dapat memudahkan identifikasi peluang sinergi dan perencanaan program bersama yang lebih efektif

► Mekanisme Pengukuran Sinyal Kemajuan Proses Multipihak Kabupaten

Setahun kebelakang, LTKL melakukan eksplorasi untuk mengukur sinyal kemajuan kemitraan multipihak dengan memonitor dari perubahan perilaku yang terjadi. Salah satunya, proses ini telah dilakukan dengan proses diagnostik di Aceh Tamiang khususnya peran dari tim inti (Backbone) yang menjalankan peran sebagai penghubung. Selain itu, melalui kerangka yang telah diujicobakan di tiga kabupaten, mekanisme ini juga digunakan untuk dijadikan sebuah trajektori untuk mendorong kemandirian kabupaten melalui kelembagaan multipihak.

Pilar Ko-Kreasi Bisnis Lestari

Optimalisasi Ekosistem Bisnis Yang Terintegrasi Melalui Pengelolaan Rantai Pasok Berkelanjutan



Keadaan Awal

Banyak kabupaten yang memiliki potensi produk unggulan yang berasal dari pertanian, perkebunan bahkan dari hutan. Namun seringkali menghadapi kendala dalam akses pasar, pengelolaan rantai pasok, serta pengembangan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Seringkali, rantai pasok yang ada tidak terhubung dengan baik, menghambat efisiensi dan peluang pasar yang lebih luas.

Model bisnis konvensional sering berjalan terpisah-pisah (*business as usual*), dengan tidak ada optimalisasi kolaborasi antar sektor. Hal ini membuat potensi produk yang berasal dari kabupaten terhambat dalam hal kualitas, akses pasar, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, LTKL memandang penting untuk memvalidasi model bisnis lestari yang mampu menghubungkan berbagai elemen dalam ekosistem bisnis berbasis rantai nilai yang memiliki keselarasan nilai, kuat, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Karena hal itulah validasi model bisnis lestari dengan ekosistem yang terhubung menjadi fokus utama pilar ini di fase tumbuh.

Intervensi Kabupaten

1.

Memvalidasi Model Bisnis Lestari di Kabupaten

LTKL berfokus pada validasi model bisnis lestari di kabupaten melalui pendekatan berbasis rantai nilai. Dalam hal ini, LTKL mengidentifikasi dan menghubungkan setiap elemen dalam rantai nilai yang sudah ada, seperti yang dilakukan di Sigi dan Siak dengan memastikan bahwa semua komponen dari produksi hingga distribusi berfungsi dengan

baik dan saling terintegrasi. Model ini mengharuskan adanya kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, sehingga setiap pihak dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan.

► Penguatan Hulu

Fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas di tingkat produksi awal, khususnya petani yang mengelola sumber daya. Strategi ini memastikan praktik ramah lingkungan, standar kualitas, dan keberlanjutan sumber daya alam dari awal rantai pasok melalui (i) pengelolaan komoditas melalui pertanian regeneratif atau tumpangsari (ii) peningkatan kapasitas petani dan penyuluh dan (iii) Pengorganisasian masyarakat untuk menjaga dinamika sosial

► Penguatan Tengah

Mengoptimalkan nilai tambah melalui fasilitas pengolahan. Bisa dengan membangun infrastruktur baru atau memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, misalnya untuk destilasi, pengeringan, dan/atau fermentasi. Tahap ini penting agar produk dari hulu tidak hanya dijual mentah, tapi diolah sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

► Kolaborasi Hilir

Membangun kerjasama berbasis kepercayaan dan semangat eksperimen dengan sektor hilir seperti trader, buyer, atau offtaker. Kolaborasi ini membuka peluang inovasi produk, akses pasar yang lebih luas, serta menciptakan rantai pasok yang saling menguntungkan dari hulu hingga hilir.



Mini mills atau pabrik mini untuk pengolahan komoditas berkelanjutan di Kabupaten Sigi

2.

Pentingnya Agregator untuk Mendukung Ekosistem Bisnis Lestari

Kabupaten menyadari bahwa peran aggregator bisnis adalah kunci untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan, seperti kapasitas UMKM, terhubungnya pasar yang lebih luas dan memastikan bahwa produk lokal dapat bersaing di pasar global. Agregator seperti inkubator kabupaten memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengembangan bisnis daerah seperti UMKM, Koperasi, bahkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui program inkubasi yang menyediakan pendampingan bisnis, akses pasar, serta pendanaan. Selain

itu, juga ada aggregator yang berfungsi sebagai trading hub yang berperan untuk menghubungkan produk kabupaten ke akses pasar yang lebih luas. Di sisi lain, untuk memperkuat kedua peran aggregator tersebut, diperlukan pula akselerasi serta penguatan tata kelola organisasi. Untuk itu, dalam tahun ini, adanya dukungan pendampingan tata kelola organisasi kepada seluruh aggregator bisnis di Kabupaten agar dapat memperkuat fondasi tata kelola organisasi dan bisnis mereka di dalam ekosistem.



Pemrosesan Kopi oleh Gampiri Bumi Lestari

3.

Pengembangan Akses Pasar dan Valuasi Dampak Bisnis Lestari

Untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat mencapai pasar yang lebih luas, LTKL mendorong penyusunan valuasi dampak bisnis lestari yang melibatkan riset pasar dan penguatan jaringan distribusi. Hal ini termasuk membuka akses pasar yang lebih besar untuk komoditas unggulan seperti kopi, vanilla, nilam yang kini telah diserap oleh pasar nasional. Pendekatan ini juga melibatkan pendampingan kepada petani dan produsen dalam mempersiapkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar, serta mengidentifikasi peluang untuk mengakses pasar internasional.

4.

Membangun Inovasi Pendanaan untuk Model Bisnis Lestari

Untuk mendukung keberlanjutan finansial, LTKL mengembangkan pendanaan inovatif melalui tiga skema yaitu (i) optimalisasi dana publik (ii) dana pengurangan risiko (*de-risking fund*) (iii) dana bergulir (*revolving fund*) yang mendukung pengembangan bisnis berkelanjutan. Model pendanaan ini memberikan akses modal kepada UMKM dan proyek yang berbasis pada keberlanjutan, termasuk pendanaan untuk riset, pengembangan kapasitas organisasi, dan akses pasar.

Sinyal Kemajuan Ko-Kreasi Bisnis Lestari

1.

Agregator Lokal Menjadi Daya Ungkit Pengembangan Bisnis Lestari Kabupaten

► Sentra Inkubasi Bisnis:

Sejumlah sentra inkubasi seperti SKELAS di Siak, Gampiri Interaksi Lestari di Sigi, Gemilang di Sintang, dan Samudra Bekudong'k di Sanggau telah berhasil menginkubasi lebih dari 100 UMKM. Ini mencakup pengembangan produk dan akses pasar, serta perubahan signifikan dalam kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam periode 2024-2025, 80% peserta inkubasi adalah perempuan, yang menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan dalam perekonomian lokal.

Menariknya, beberapa hasil inkubasi yang telah dilakukan telah berkembang menjadi perusahaan lokal yang mulai menunjukkan dampaknya, seperti Pinaloka yang diinkubasi oleh SKELAS. Pinaloka berfokus pada produk olahan nanas yang menggunakan teknik pertanian berkelanjutan di lahan gambut, serta menjalin kemitraan dengan petani lokal, mendapatkan dukungan pendanaan dan fasilitas dari salah satu institusi finansial (perbankan) dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas khususnya di provinsi Riau.



Pendampingan Tata Kelola Organisasi SKelas, Inkubator Lokal Siak



Tampak Depan Communal Space sebagai Ruang Kolaborasi Kabupaten Sigi

► Trading Hub:

Dengan terbentuknya trading hub seperti Gampiri Bumi Lestari, yang menggabungkan berbagai komoditas unggulan, kabupaten Sigi kini memiliki pusat perdagangan yang terorganisir. Gampiri Bumi Lestari (Sigi) bermitra dengan Java Kirana dan Conservana berhasil mengembangkan rantai pasok kopi dan vanili dari hulu ke hilir. Sebanyak 84 Petani Kopi dari 7 Desa di Kabupaten Sigi telah menerima pendampingan budidaya dan pasca panen dengan total penyerapan komoditas hingga 5,6 ton dan sebanyak 56 petani dari 10 Desa di Kabupaten Sigi juga telah menerima pendampingan budidaya dan pasca panen vanili dengan penyerapan hasil panen hingga 467 kg sepanjang 2024-2025. Melalui proses yang telah difasilitasi oleh Gampiri Bumi, petani telah melakukan transaksi sebesar 352 juta rupiah.

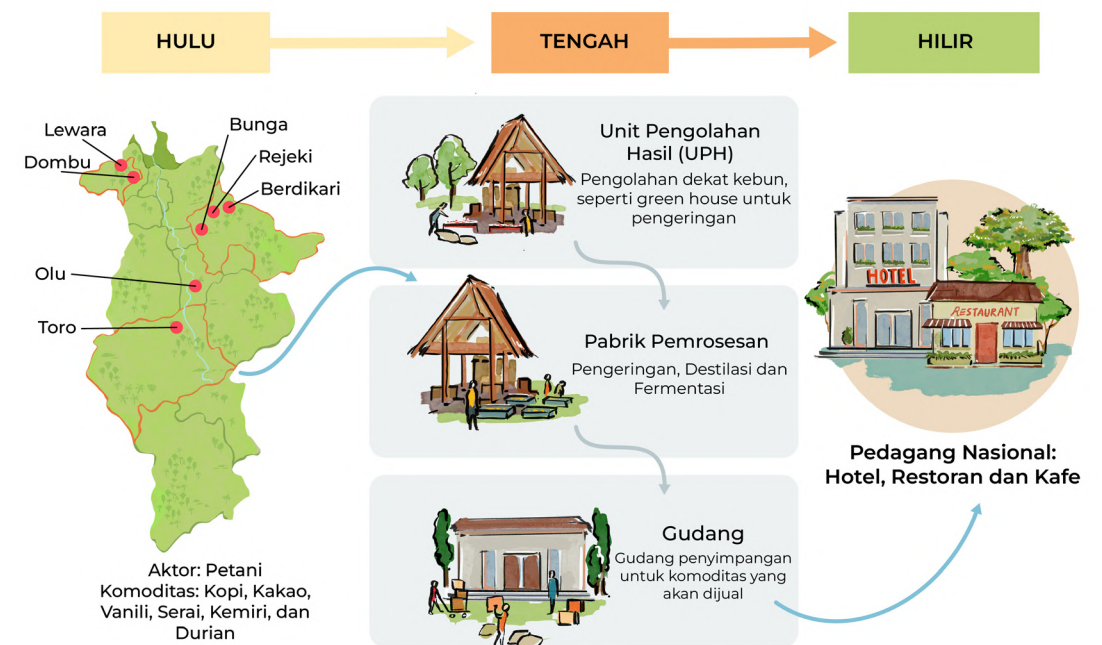
2.

Inovasi Pengembangan Produk Nilai Tambah Kabupaten

Proses eksperimental yang dilakukan di kabupaten adalah membawa kembali pusat ekonomi dan bisnis di tingkat kabupaten. Salah satunya adalah dengan membuka ruang imajinasi bahwa bisnis lestari dan perputaran ekonomi bisa dilakukan di tingkat tapak. Model yang saat ini dikembangkan di kabupaten diantaranya adalah:

- Membangun 'area percontohan' yang bisa dijadikan daya ungkit untuk pengembangan model bisnis dengan skala yang lebih besar. Proses yang dilakukan adalah membangun koneksi hulu-tengah-hilir, seperti gambaran yang telah dilakukan di Kabupaten Sigi seperti gambar dibawah ini.

Model Pengembangan Rantai Pasok Berkelanjutan





Pemrosesan Tengkwang Kalimantan Barat

► Selama ini, kabupaten hanya memasok produknya dari hulu ke hilir sehingga tidak ada penambahan nilai dari sisi bisnis. Salah satu yang dilakukan di Kabupaten Sigi adalah mengoptimalkan pabrik mini yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten seperti pengeringan hingga membangun green house di beberapa titik desa. Menariknya, didalam proses pengembangan bisnis ini, Pemerintah kabupaten bersama dengan lembaga agregator lokal juga membangun pabrik pemrosesan dan gudang untuk berbagai komoditas basis alam Kabupaten Sigi. Hal tersebut juga didukung oleh perusahaan seperti JavaKirana dan Conservana dalam memastikan kualitas dan prosedur pemrosesan komoditas tersebut, seperti inovasi membuat produk campuran sereh wangi, vanili hingga nilam.

► Bentuk inovasi lainnya adalah Kabupaten juga mengeksplorasi bagaimana membangun sebuah fasilitas perlu dipastikan dari sisi energi hingga bahan baku bangunan tersebut. Kerjasama dengan Tata Habitat juga menjadi suatu proses inovasi pembelajaran baru dengan membangun sebuah pabrik pemrosesan, ruang komunal hingga gudang yang dijadikan satu bangunan dengan menggunakan bata yang berasal dari campuran limbah peternakan sapi yang berasal dari Sekolah Peternakan Rakyat. Hal ini didasari untuk mengurangi penggunaan pasir yang menjadi bahan baku batako selama ini, dan Sigi memiliki sumber bahan galian C yang cukup besar sehingga dapat berpotensi menyebabkan degradasi sungai dan lahan

► Tidak hanya di Kabupaten Sigi, proses ini juga terjadi di Kabupaten Sintang dengan melakukan proses riset Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di lanskap Gunung Naning yang dilakukan oleh komunitas muda kabupaten Sintang. Hasil dari riset ini menghasilkan 186 HHBK dan akan digunakan sebagai basis referensi untuk eksplorasi produk unggulan kabupaten Sintang, seperti pengembangan biskuit untuk stunting dan produk kosmetik.



Sosok Perempuan Dayak sedang Memintal Benang Hasil Pewarna Alami

► Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan salah satu perusahaan fashion yaitu Pendopo bersama dengan Cita Tenun Indonesia mengeksplorasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat di sekitar hutan terkait pewarna alami untuk

tenun khas Dayak. Kerjasama ini juga difasilitasi oleh salah satu inisiatif lokal kabupaten Kapuas Hulu yaitu Mahakarya Tenun yang telah melakukan pengarsipan jenis-jenis tenun Kapuas Hulu dan jenis tanaman penghasil pewarna alami.

3.

Terbangunnya Skema Inovasi Pendanaan yang telah diuji coba

Berdasarkan proses eksperimen yang telah dilakukan, LTKL secara formal telah memiliki mekanisme secara prosedur dalam mengembangkan skema model pendanaan yang dijadikan landasan tata kelola dalam menjalankan program inovasi pendanaan kabupaten, khususnya terkait dengan pengembangan bisnis lestari di kabupaten.



Proses Pengemasan Selai Nanas Hasil Produksi dari Pinaloka asli Siak

- Pengelolaan inovasi pendanaan yang telah diujicobakan yaitu untuk bisnis vanili dan kopi di Sigi oleh Conservana dan JavaKirana. Proses yang telah dilakukan adalah adanya dana tersebut seperti dana jaminan untuk membeli kedua komoditas tersebut walaupun kualitas masih belum memenuhi ekspektasi atau bahkan jika gagal panen. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan petani memiliki kepastian pasar dari pembeli dan secara paralel intervensi untuk meningkatkan kualitas produk tetap menjadi prioritas.
- Pengelolaan dana pengurangan risiko juga telah dilakukan untuk beberapa perusahaan yang terhubung dengan rantai pasok kabupaten anggota LTKL dan memiliki bisnis yang bergerak di pengembangan produk basis alam, seperti Alam Siak Lestari dan Forestwise.
- Optimalisasi dana publik seperti yang telah diadopsi oleh Gampiri Interaksi Lestari (Sigi) yang berhasil mendapatkan pendanaan dari LPDB terkait dengan inkubasi koperasi hijau.



Kegiatan SADARI: Samudra Inkubasi Lestari yang dilaksanakan oleh Samudra Bekudong'k inkubator Kabupaten Sanggau

4.

Kesiapan Kemandirian Ekosistem Bisnis Kabupaten Melalui Tata Kelola Organisasi

Selama satu tahun kebelakang, LTKL bersama jejaring mitranya melakukan pendampingan tata kelola organisasi untuk 5 lembaga inkubator dan 4 perusahaan lokal di kabupaten anggota LTKL. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan dalam menyongsong kemandirian secara kelembagaan dan finansial.

- Penguatan kapabilitas SDM : Memastikan kesiapan pemimpin organisasi yang menjalankan peran bisnis menjadi hal yang harus diperkuat. Pendampingan melalui proses mentoring dan coaching dilakukan untuk membantu semua tim dalam organisasi tersebut mampu mengelola hal-hal yang sifatnya non-teknis, seperti mengambil risiko, mengambil keputusan bahkan menghadapi krisis.
- Penguatan sistem kelembagaan organisasi: Hal yang menjadi kunci dalam proses ini adalah memastikan 'north star' organisasi baik sebagai inkubator atau perusahaan hingga penyesuaian dalam struktur organisasi dan sistem operasional organisasi, seperti sistem keuangan.
- Penguatan model bisnis : Sebagai lembaga inkubator yang saat ini masih bersifat non-profit dan perusahaan lokal yang bersifat profit, perlu memiliki model bisnis yang jelas. Proses ini masih berjalan hingga akhir tahun ini, namun menariknya 9 organisasi ini memiliki model bisnis yang berbeda-beda dengan proses memvalidasi perjalanan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya serta memiliki target fase kemandirian organisasi hingga 2030.

5.

Valuasi Nilai Bisnis Lestari Berbasis Proteksi dan Restorasi Lahan

Cendekia Iklim Indonesia telah melakukan riset ekonomi basis alam secara makro di empat kabupaten, yaitu **Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Sigi**. Hasil riset di empat kabupaten ini menunjukkan bahwa pengembangan komoditas prioritas melalui sistem tumpang sari atau pertanian regeneratif di lahan kritis menunjukkan adanya potensi ekonomi yang menjanjikan. Setiap kabupaten dapat mengintegrasikan pemulihan ekosistem dengan penguatan rantai nilai komoditas unggulan. Hasilnya, riset ini memproyeksikan tren positif: peningkatan PDRB, pendapatan daerah, dan pendapatan petani, bersamaan dengan penurunan kemiskinan dan emisi secara signifikan dalam 5-20 tahun. Melalui metode *heatmap* dan analisa benefit - manfaat yang telah dilakukan selama setahun ke belakang.

- Kabupaten **Sintang**, komoditas kopi dan tengkawang menjadi komoditas prioritas yang direkomendasikan dengan heatmap yang menunjukkan dampak tertinggi pada pemulihan ekosistem, keberlanjutan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan potensi pasar. Skema agroforestri dirancang bertahap 0-15 tahun dari penanaman hingga produksi penuh dengan proyeksi peningkatan PDRB hingga 7,6% dan penurunan emisi yang signifikan mencapai -8,8 juta ton dalam 20 tahun proyeksi.



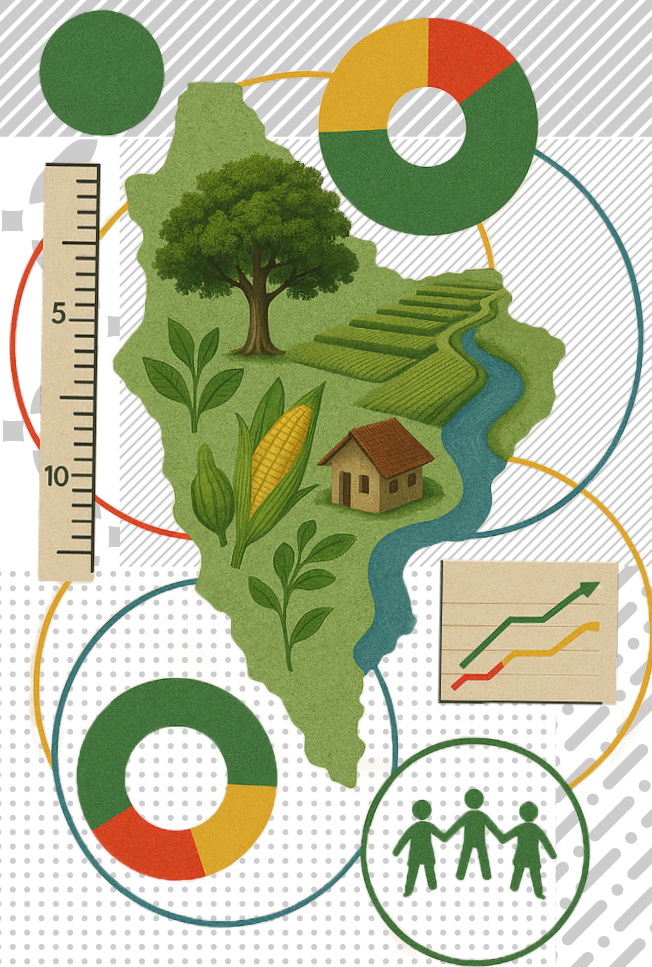
Proses pengeringan biji kopi asli Sigi oleh Gampiri Bumi Lestari



Proses pembuatan benang untuk menenun dengan bahan pewarna alami di Kapuas Hulu

- Kabupaten **Sanggau**, direkomendasikan komoditas tengkawang dan madu hutan dengan Cost Benefit Analysis (CBA) ambisius yang diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan daerah hingga +160,9 miliar/tahun, pendapatan petani +Rp33,4 juta/tahun, dan penurunan emisi dari 6,1 juta ton menjadi 3,9 juta ton CO₂eq/tahun.
- Kabupaten **Kapuas Hulu**, dapat mendorong komoditas tengkawang dan madu hutan, dengan heatmap yang menempatkan kedua komoditas ini di skor tertinggi lintas dimensi. Melalui skema agroforestri selama 15 tahun, Cost Benefit Analysis (CBA) menunjukkan potensi kenaikan PvDRB sampai 6,65% dan penurunan emisi dari 7,31 juta ton menjadi 6,51 juta ton/tahun dalam 20 tahun mendatang.
- Kabupaten **Sigi**, direkomendasikan untuk optimalisasi pengelolaan komoditas kopi dan vanili melalui integrasi agroforestri ke RTRW, percepatan STDB, insentif bibit dan pupuk organik, serta penguatan hilirisasi. Model sistem dinamis memproyeksikan kenaikan PDRB dengan skenario ambisius mencapai Rp2,04 triliun dalam 20 tahun, penurunan kemiskinan, serta penurunan emisi -0,75 ton/tahun dalam 20 tahun melalui rehabilitasi 15% lahan kritis, pasar berkeadilan, dan dukungan pembiayaan hijau.

Pilar Pengukuran Proses



Kondisi Awal

Situasi global saat ini menuntut setiap yurisdiksi perlu menunjukkan progres keberlanjutannya sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Di tingkat internasional maupun nasional, telah tersedia beragam kerangka pengukuran keberlanjutan berbasis yurisdiksi. Namun, banyaknya pilihan ini justru memunculkan tantangan tersendiri bagi kabupaten anggota LTKL, mulai dari kompleksitas indikator, perbedaan terminologi, hingga keterbatasan kapasitas untuk mengadopsi berbagai kerangka tersebut secara bersamaan.

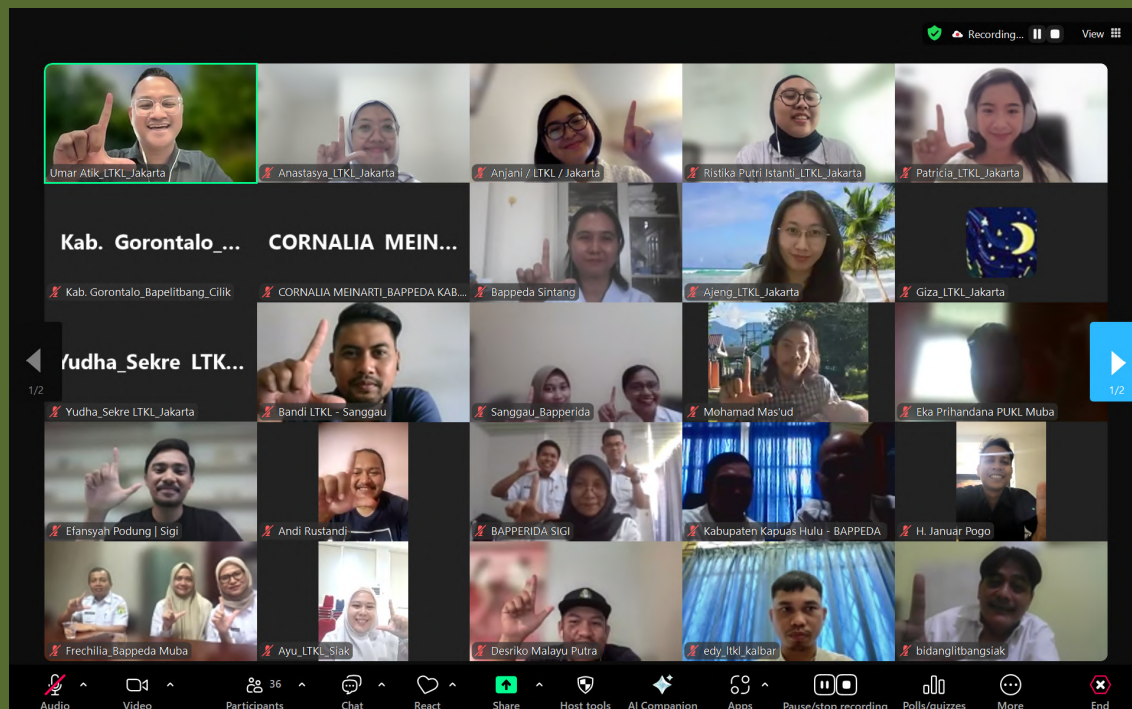
Menjawab tantangan ini, pada Rapat Umum Anggota (RUA) LTKL 2018 disepakati Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) —sebuah rangkuman terintegrasi dari berbagai kerangka relevan yang dirancang sebagai mekanisme pengukuran pembangunan berbasis pendekatan yurisdiksi. Kerangka ini disusun dan disepakati bersama oleh kabupaten anggota untuk menjadi standar pengukuran yang konsisten.

Memasuki fase tumbuh, implementasi KDSD menghadapi hambatan: kesenjangan data dasar, banyaknya indikator yang sulit diikuti, kurangnya pembaruan data secara berkala, serta keterbatasan kapasitas teknis di tingkat kabupaten.

Intervensi dan Capaian

Untuk mengatasi hal ini, Kabupaten menyepakati penerapan Skema Penilaian Mandiri Kabupaten sebagai mekanisme baru untuk mengukur kesiapan menuju *Kabupaten Lestari dan Mandiri*. Skema ini menggunakan KDSD yang telah diperbarui melalui konsultasi bersama tim ahli dan mitra pembangunan, dengan indikator yang lebih ringkas dan fokus pada pilar-pilar kunci keberlanjutan.

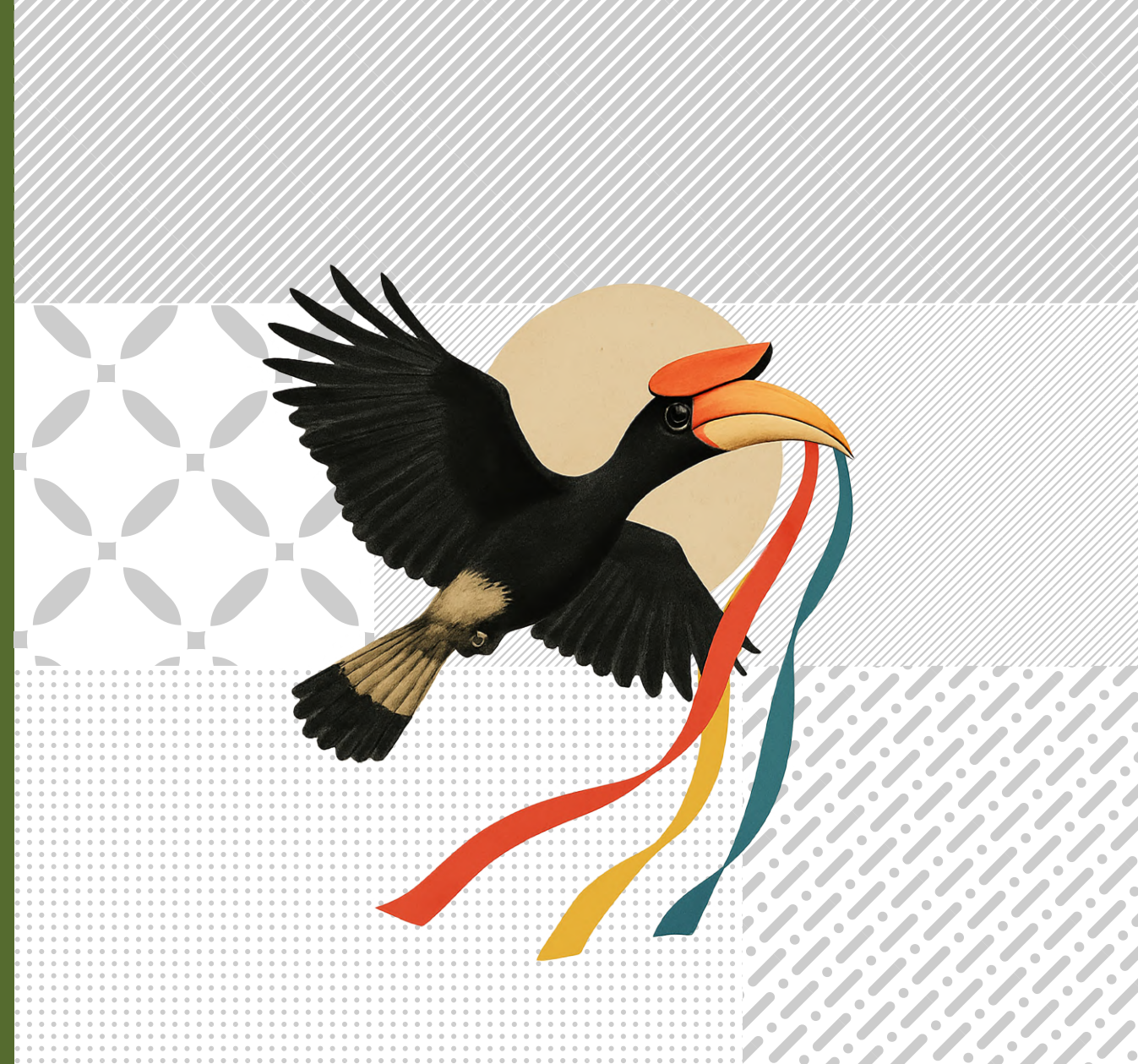
Melalui penyederhanaan proses, kabupaten kini cukup mengisi 16 indikator wajib dan 8 indikator opsional. Hasil pengisian dapat langsung dilihat melalui skor sementara, yang kemudian diverifikasi melalui proses validasi data. Output akhirnya berupa Profil Perkembangan Kemajuan Kabupaten yang digunakan sebagai dasar untuk melihat perkembangan kabupaten terhadap capaian LTKL 2030. Kedepan, indikator ini akan disesuaikan sesuai kesiapan kabupaten dan dapat terukur secara proses dan hasil dalam transformasi kabupaten lestari dan mandiri.



Proses Sosialisasi Penilaian Mandiri 2025 bersama dengan Kabupaten Anggota

- **Terdapat 16 Indikator Wajib dan terdapat 4 indikator** yang masih sulit dipenuhi kabupaten diantaranya terkait dengan data-data yang berhubungan dengan proses seperti inklusivitas dalam membangun perencanaan, basis data masyarakat adat, hingga bentuk rencana aksi yang konkret terkait pengembangan ekonomi.
- **Data yang dihimpun tergolong data dasar** dan proses ini melatih kabupaten untuk membangun sistem bagi pakai data yang terstruktur dengan mengaktivasi kemitraan multipihak di kabupatennya

- **Kabupaten memiliki kesadaran utuh dalam memastikan sistem pengukuran** ini bukanlah bentuk rating, tapi sebagai bentuk mengukur progres dan sebagai bahan refleksi dalam proses transformasinya. Kedepan proses ini akan diintegrasikan dalam mengukur target bersama kabupaten dan setiap tahunnya dapat diukur secara efektif dengan sistem tata kelola data yang lebih baik.



Pilar Amplifikasi Narasi



Pameran "Tiba Sebelum Berangkat" di Museum Sulawesi Tengah untuk merespon ekonomi restoratif di Kabupaten Sigi.

LTKL meyakini bahwa kekuatan cerita daerah dapat menjadi pintu masuk untuk membangun dukungan publik, memperkuat identitas kabupaten, dan menghubungkan potensi lokal dengan dukungan yang lebih luas. Namun, tantangan masih muncul: kanal komunikasi yang terbatas lintas sektor, narasi pembangunan lestari yang belum terintegrasi dalam citra destinasi, serta promosi potensi daerah yang masih parsial sehingga dampaknya belum optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, LTKL mengembangkan strategi *amplifikasi narasi* berbasis kearifan lokal, seni, dan budaya. Inisiatif ini mencakup Destination Branding di Siak dan Sigi yang memunculkan kerangka narasi baru berbasis alam, ekonomi lestari, dan sosial-budaya; Community of Practice (CoP) yang melibatkan pakar lintas disiplin melalui program *Exploration* di Sintang bersama konten kreator nasional; Aktivasi Communal Space di Sigi sebagai ruang tamu kolaboratif bagi pemerintah, komunitas seni, dan pelaku usaha lestari; serta pameran karya yang memadukan data, tradisi, dan imajinasi masa depan untuk memperluas dialog publik.



Community of Practice edisi bulan Ramadhan "Apa Kabar Keberagaman Pangan Kita?"



Proses program eksperimental Destination Branding Siak & Sigi bersama ekosistem orang muda di daerah dan mitra-mitra.

Hasilnya, eksposur kabupaten anggota meningkat signifikan.

- ▶ Liputan Kompas tentang budidaya ikan gabus dan nanas di Siak menjangkau 286.200 pembaca dengan valuasi media Rp60 juta.
- ▶ Di Sigi, KBR memproduksi video podcast yang ditonton 1.040 pengguna, mengangkat kisah ekonomi restoratif lokal.
- ▶ CoP bertema pangan lokal menghimpun 26 mitra lintas sektor dan berhasil membuka kolaborasi tentang pangan yang bertajuk Setara Lestari
- ▶ sementara pameran “Tiba Sebelum Berangkat” di Sulawesi Tengah menarik 2.710 pengunjung (usia mayoritas 17–35 tahun) dengan ketertarikan tinggi pada visual mapping dan komoditas vanila.
- ▶ Sejak Maret 2025, ruang komunal Sigi telah menggelar delapan aktivasi bersama lebih dari sepuluh komunitas lokal.
- ▶ Program Explonation bersama tiga KOL dan 14 peserta dari Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu berhasil meraih 199.539 views, menjangkau 91.391 akun, dan melibatkan 5.078 interaksi aktif. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas visibilitas, tetapi juga efektif memperkenalkan Sintang serta cerita pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.

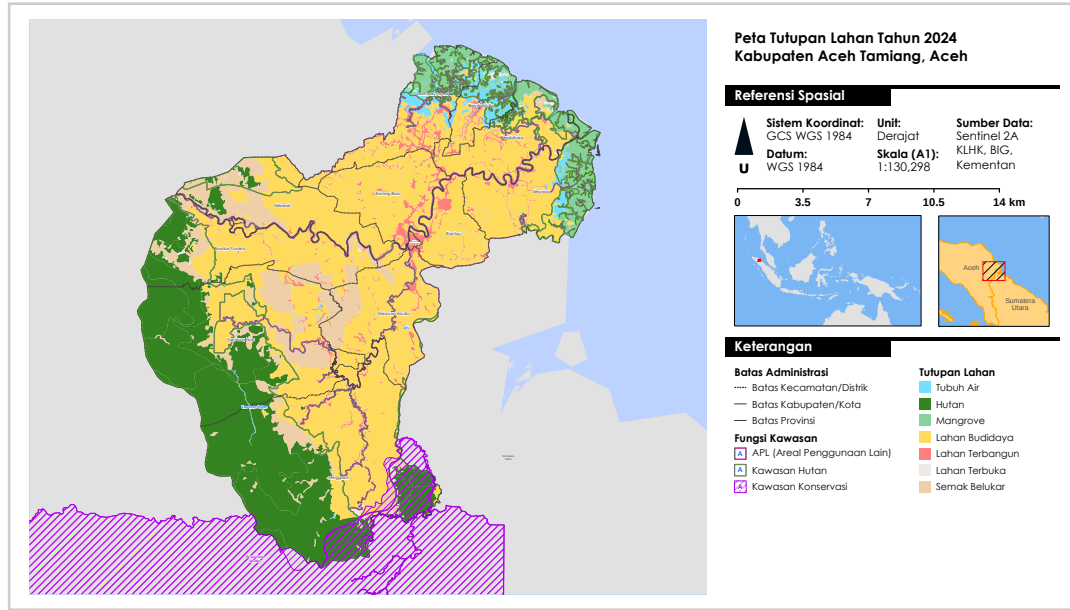
Kombinasi strategi ini membuktikan bahwa narasi yang terstruktur, konsisten, dan kolaboratif mampu menjadi penggerak ekonomi lestari sekaligus memperkuat identitas kabupaten di panggung nasional dan global.

JEJAK GERAK KABUPATEN

3



Kabupaten ACEH TAMIANG



LINGKUNGAN

Luas Wilayah:
218800,64

Luas kawasan hutan:
85,846.13 Ha

Luas APL berhutan:
Luas APL 129,399.34 Ha
Tutupan hutan di APL 962.34 Ha

Komitmen Kontribusi Kabupaten di Fase Tumbuh:
Melindungi setidaknya 37.180 ha tutupan hutan di kawasan APL yang ada di yurisdiksi kabupaten.



EKONOMI

PDRB dan sektor penyumbang:
10,72 Triliun Rupiah
1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - 41,26%
2. Sektor Industri Pengolahan - 9,15%

PAD dan sektor penyumbang:
128 Miliar Rupiah didapatkan dari
1. Sektor Perkebunan

Potensi komoditas HHBK unggulan:
Sawit, Nilam



SOSIAL

Jumlah penduduk:
312.061

Indeks Gini:
0,26 (2024)

Angkatan kerja dan % pengangguran:
159.589 angkatan kerja dan 4,85% pengangguran

Suku etnis/adat:
Mayoritas: Melayu Tamiang
Etnis lain: Aceh, Gayo, Minangkabau, Jawa
Adat : Melayu-Islam Tamiang



KULTUR/BUDAYA

Kawasan cagar budaya/sejarah:
Istana Karang (kerajaan Tamiang)
Situs Bukit Kerang (prasejarah ±4.000 tahun)

Adat setempat:
Peusijek (tepung tawar)
Berbalas pantun (pernikahan)
Dendang lebah (panen madu hutan)
Kenduri blang (turun sawah)

Kemajuan Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kabupaten



Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan:

Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen membangun secara berkelanjutan dengan menyusun RPJMD berbasis KLHS dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun belum memiliki target baku terhadap stabilitas lahan pangan, pengaturan perlindungannya telah diformalkan melalui Keputusan Bupati No. 45/1015/2023. Capaian pengurangan pengangguran dan peningkatan ekonomi sektor unggulan masih berproses, sementara penurunan kemiskinan dan ketimpangan berhasil diwujudkan. Hingga kini, belum tersedia produk hukum atau dokumen perencanaan yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.



Pilar Tata Kelola Multipihak:

Kabupaten Aceh Tamiang telah memiliki peta tata batas desa dan wilayah kelola bersama yang disusun melalui metode pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat. Proses perencanaan pembangunan daerah juga telah difasilitasi melalui keberadaan Forum Kelembagaan Multipihak yang memastikan kolaborasi berbagai aktor pembangunan. Di sisi lain, basis data masyarakat hukum adat di wilayah kabupaten saat ini masih dalam tahap pengembangan, atau telah tersedia namun belum sepenuhnya disusun melalui proses yang bersifat partisipatif.



Pilar Ko-kreasi Bisnis dan Investasi Berkelanjutan:

Kabupaten Aceh Tamiang berhasil mencapai berbagai target kinerja ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang direfleksikan melalui capaian PDRB menunjukkan realisasi positif sesuai target yang ditetapkan. Indikator kesejahteraan masyarakat berupa pendapatan per kapita juga mengalami peningkatan signifikan dan telah memenuhi target. Dari sisi produktivitas, rata-rata produksi komoditas strategis daerah berhasil memenuhi sasaran yang ditetapkan. Capaian ini turut didukung oleh keberhasilan dalam memenuhi target produksi tanaman pangan utama nasional yang dapat memenuhi kebutuhan pangan daerah.



Konsultasi Publik Peta Jalan Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) Aceh Tamiang yang dilakukan secara Multipihak



Pilar Pengukuran Progres Berkelanjutan Kabupaten:

Kabupaten Aceh Tamiang saat ini masih dalam proses aktualisasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan ketentuan RTRW yang berlaku.



Pilar Amplifikasi Narasi:

Kabupaten Aceh Tamiang telah menerapkan sistem informasi kabupaten dengan sistem satu data yang sudah dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam berbagipakai data, ditandai dengan adanya Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 10 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini portal data Kabupaten Aceh Tamiang juga sudah dapat diakses oleh publik melalui laman <https://data.acehtamiangkab.go.id/>

Transformasi Orkestrator Kolaborasi Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang dikenal sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar, namun juga menghadapi tantangan tata kelola pembangunan yang kompleks. Untuk memastikan arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pada 2024–2025 dilakukan diagnostik kesiapan kemitraan multipihak yaitu Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL). Proses ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk memetakan isu-isu kunci, peran para pihak, serta peluang sinergi.

Hasil diagnostik menunjukkan beberapa tantangan utama: koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan akan instrumen perencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap isu lingkungan dan sosial. Meski demikian, terdapat komitmen kuat dari berbagai pihak untuk menggeser pendekatan pembangunan menuju model kolaboratif yang menekankan keberlanjutan.

Dalam prosesnya, PUPL Aceh Tamiang berperan sebagai fasilitator utama, memastikan setiap pihak memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingan sekaligus menemukan titik temu. PUPL juga membantu menerjemahkan hasil diagnostik menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih operasional, sehingga pemerintah daerah memiliki landasan kuat untuk mengintegrasikan

agenda keberlanjutan ke dalam perencanaan daerah.

Sejalan dengan proses diagnostik tersebut melalui dukungan berbagai mitra termasuk perusahaan, PUPL dan Aceh Tamiang melakukan pemetaan kesiapan lanskap dalam mendorong transformasi berkelanjutan melalui “Landscape Blueprint”. Proses ini juga diselaraskan dengan mekanisme mengukur kesiapan lanskap yang dikelola secara kolaboratif. Berdasarkan dari hasil tersebut, PUPL saat ini sedang berfokus untuk terus berbenah membangun kemitraan dan kelembagaan multipihak yang lebih strategis dan terarah sesuai dengan tujuan dari kabupaten Aceh Tamiang.

Saat ini, PUPL juga telah memiliki Peta Gotong Royong dimana ini menampilkan aktor-aktor yang terlibat—mulai dari LSM, perusahaan, hingga komunitas—beserta program yang mereka jalankan di berbagai kecamatan. Dengan adanya pemetaan ini, koordinasi program menjadi lebih efisien karena setiap pihak dapat melihat siapa melakukan apa, di mana, dan potensi kolaborasi yang bisa dikembangkan.

Melalui model ini, pemerintah daerah dapat menggunakan skema ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sementara mitra pembangunan dapat menyesuaikan intervensinya agar saling melengkapi, bukan tumpang tindih. Lebih jauh, keberadaan

blueprint membantu mengarahkan investasi sosial dan lingkungan secara lebih terukur, sehingga mendorong terciptanya dampak yang berlipat ganda.

Kombinasi antara proses diagnostik kelembagaan dan peta gotong royong menjadikan Aceh Tamiang contoh nyata bagaimana tata kelola kolaboratif dapat diperkuat melalui tata kelola, data, dialog, dan peta jalan bersama. Dengan dukungan PUPL sebagai katalis, kabupaten ini bergerak menuju tata kelola pembangunan yang inklusif, transparan, dan selaras dengan visi keberlanjutan jangka panjang.

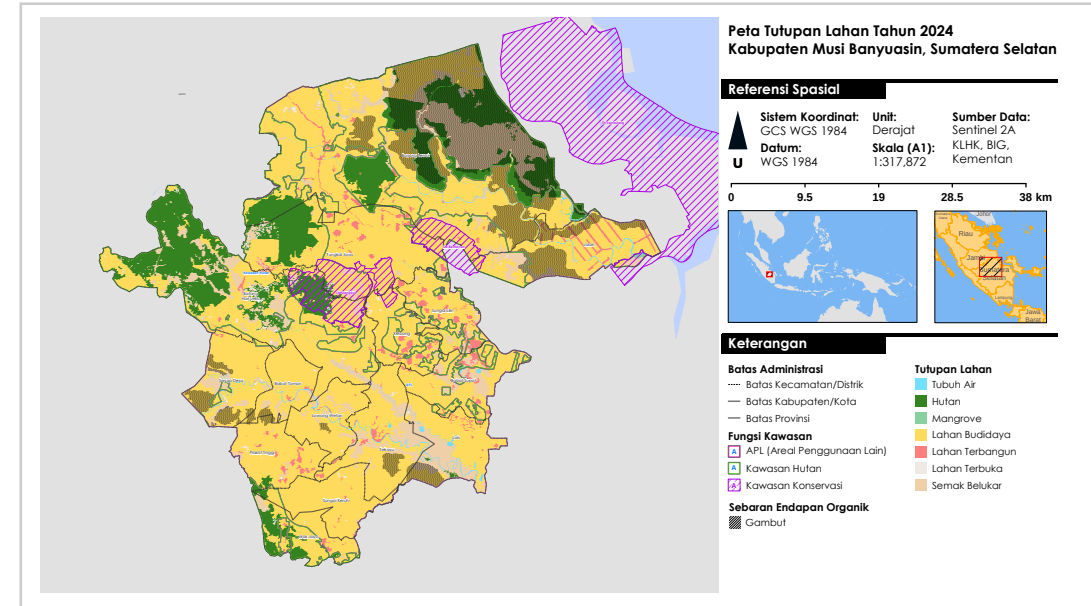
“**Dengan dilakukannya proses diagnostik di PUPL, saat ini Aceh Tamiang terlihat semakin jelas arah yang harus kita tuju untuk menuju pembangunan Aceh Tamiang yang inklusif dan kolaboratif.**”

Muhammad Yunus, Koordinator PUPL

Catatan: Cerita ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif dan pengalaman dari tapak, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas kerja LTKL



Kabupaten MUSI BANYUASIN



LINGKUNGAN

Luas Wilayah:
11.832,99 km²
1.455.078,77 Ha

Luas kawasan hutan:
85.846,13 Ha

Luas APL berhutan:
Luas APL 129.399,34 Ha
Tutupan hutan di APL 962,34 Ha

Komitmen Kontribusi Kabupaten di Fase Tumbuh:
Melindungi setidaknya 16.585 hektar dalam fungsi lindung gambut (APL) dan validasi 7.518 hektar tegakan hutan



EKONOMI

PDRB dan sektor penyumbang:
Rp 85.771,07 (Miliar Rupiah).

1. Sektor pertambangan dan penggalian sebesar 50,93 %
2. Sektor industri pengolahan sebesar 12,13%
3. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,03%

PAD dan sektor penyumbang:
Rp 353.498.543.586,06 didapatkan dari:

1. Pajak
2. Retribusi
3. Laba BUMD
4. Pendapatan Lainnya

Potensi komoditas HHBK unggulan:
Sawit, Gambir, Karet

catatan: informasi ini didapatkan dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kabupaten



SOSIAL

Jumlah penduduk:
736.897,0 penduduk di 2024

Indeks Gini
0,314 (BPS, 2024)

Angkatan kerja dan % pengangguran:
72,63 % Angkatan Kerja dan 8.708 orang menjadi pengangguran pada tahun 2023

Suku etnis/adat:
Musi dan Anak Dalam



KULTUR/BUDAYA

Kawasan cagar budaya/sejarah:
Masjid Nurul Huda Desa Toman
Jembatan Teluk 1
Relief Arca Menari (Situs Teluk Kijing)
Naskah Piyagem Sungai Keruh
Museum Daerah Penghulu Muhammad Soleh (menyimpan artefak prasiswija (abad ke-3 SM))
Rumah Adat Keluang & Lubuk Lancang (pusat kegiatan adat.)

Adat setempat:
Peusijek (tepung tawar)
Berbalas pantun (pernikahan)
Dendang lebah (panen madu hutan)
Kenduri blang (turun sawah)

Kemajuan Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kabupaten



Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan:

Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun RPJMD berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), termasuk melalui analisis capaian TPB per Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam sektor ketenagakerjaan, terjadi penurunan angka pengangguran yang melampaui target pada tahun 2024, tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga 2,13%, lebih rendah dari target sebesar 3,80%. Capaian ini selaras dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja yang mencapai 72,63%. PDRB per kapita juga menunjukkan tren positif, yakni Rp133,11 juta (ADHB) dan Rp78,01 juta (ADHK), dengan sektor utama penyumbang PDRB adalah sektor pertambangan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan.

Dari sisi kesejahteraan, penurunan kemiskinan juga menunjukkan progres signifikan. Target angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 15,08% berhasil dilampaui, dengan realisasi sebesar 12,88%, turun dari 14,90% pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum. Namun sayangnya hingga saat ini belum terdapat bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dituangkan dalam produk hukum atau dokumen perencanaan daerah.



Pilar Tata Kelola Multipihak:

Kabupaten Musi Banyuasin telah memiliki peta batas desa dan wilayah kelola bersama, namun penyusunannya belum sepenuhnya dilakukan melalui proses pemetaan partisipatif bersama masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan

teknis masih lebih dominan dibanding partisipasi langsung. Meskipun begitu terus dilakukan upaya pendekatan partisipasi langsung, dibuktikan dengan rencana diadakannya Forum Kelembagaan Multipihak, dengan diskusi tematik bertajuk “Inovasi Pembangunan Berbasis Masyarakat” pada 3 Juni 2025. Kegiatan ini akan menjadi ruang temu strategis antarpemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menuju tata kelola pembangunan yang lebih inklusif.

Sementara itu, basis data masyarakat hukum adat belum tersedia dan belum melalui proses penyusunan partisipatif. Kondisi ini mencerminkan adanya ruang proses yang masih terbuka untuk mendorong pengakuan formal terhadap keberadaan dan peran masyarakat adat dalam kerangka pembangunan daerah.



Pilar Ko-kreasi Bisnis dan Investasi Berkelanjutan:

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren positif, meningkat dari -0,04% pada 2020 menjadi 5,03% pada 2024. Walaupun capaian ini menurun dibandingkan pertumbuhan pada 2022-2023, realisasi PDRB tahun 2024 sebesar 4,91% telah melampaui target sebesar 3,75-4,25%. PDRB per kapita juga terus meningkat dari Rp115,56 juta pada 2021 menjadi Rp133,11 juta pada 2023. Meskipun begitu, target tingkat produktivitas rata-rata dan produksi komoditas strategis, serta target produksi tanaman pangan utama kabupaten, masih dalam proses untuk dipenuhi.



Pilar Pengukuran Progres Berkelanjutan Kabupaten:

Kabupaten Musi Banyuasin telah mengaktualisasi pemenuhan dan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan RTRW yang berlaku.



Pilar Amplifikasi Narasi:

Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan sistem informasi kabupaten dengan sistem satu data yang sudah dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam berbagai pakai data dan sudah dapat diakses oleh publik melalui tautan <https://satudata.mubakab.go.id>.



Diskusi Tematik Penguatan Forum Multipihak Kabupaten Musi Banyuasin

Optimalisasi Peran PUKL dalam Kolaborasi Multipihak Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dikenal di Sumatera Selatan dengan areal perkebunan lebih dari 1,25 juta hektare. Ketergantungan masyarakat pada sektor perkebunan seperti karet dan sawit menjadi peluang dan juga tantangan. Salah satunya terkait

dengan tata guna lahan dan kepastian pendapatan petani.

Di tengah situasi itu, Pusat Unggulan Komoditas Lestari (PUKL) hadir sebagai wadah untuk memastikan inisiatif perkebunan berkelanjutan bisa didorong secara optimal. Sebagai wadah multipihak, PUKL bertindak sebagai jembatan antara komunitas, pemerintah dan mitra pembangunan.

Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Cargill dan Yayasan CARE Peduli (YCP) memulai langkah strategis untuk mengarusutamakan kesetaraan gender di komunitas perkebunan kelapa sawit di tahun 2022. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang melibatkan 13 desa di tiga kecamatan—Sungai

Lilin, Keluang, dan Tungal Jaya—dengan masa program selama tiga tahun. Setelah proses implementasi berjalan, PUKL membantu memfasilitasi program pemberdayaan ekonomi melalui Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) dengan Selaras Muba Lestari lewat inkubasi bisnis. Sinergi ini membuat usaha kecil tidak hanya bertahan, tapi juga naik kelas—produk lidi sawit bahkan sudah masuk e-Katalog Pemkab.

Sepanjang 2024–2025, PUKL juga memfasilitasi kolaborasi dengan PISAgro dan Tropical Forest Alliance (TFA). Salah satu tonggak penting adalah Dialog Yurisdiksi Komoditas Karet pada Juli 2025, yang mengangkat tema keberlanjutan karet melalui ketertelusuran dan inklusi petani. Acara dua hari ini menghadirkan OPD, perusahaan, asosiasi petani, hingga LSM, dan dipandu langsung oleh Koordinator PUKL Muba. Diskusi panel multipihak, kunjungan lapangan, hingga simulasi penggunaan e-STDB menjadi bukti nyata bagaimana PUKL menjembatani kepentingan kebijakan dengan kebutuhan petani di lapangan.

Dengan terjadinya capaian-capaian ini Musi Banyuasin menunjukkan bahwa untuk mencapai perkebunan berkelanjutan, peran dari wadah multipihak penting sebagai penghubung antara pemerintah

daerah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Kedepan, peran PUKL akan dioptimalisasi dalam membangun ruang kolaborasi yang lebih inklusif dan inovatif.

“

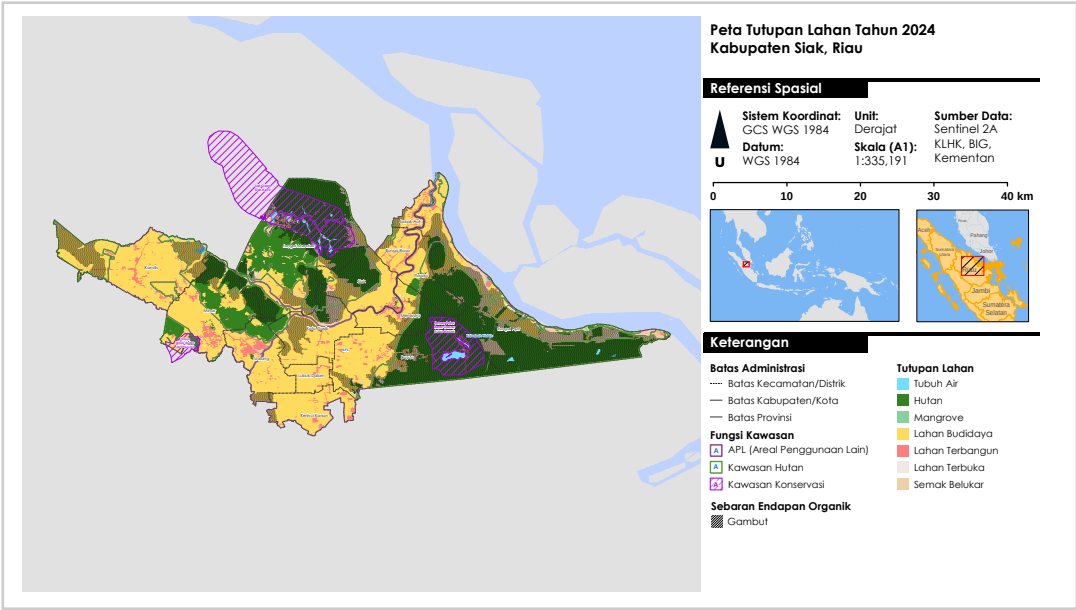
Kolaborasi bukan sekadar bekerja bersama, melainkan membangun masa depan bersama. PUKL menjembatani energi multipihak agar Musi Banyuasin menjadi contoh bahwa perkebunan bisa tumbuh, masyarakat bisa sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga.

Amrah Syarif, Bappeda Musi Banyuasin

Catatan: Cerita ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif dan pengalaman dari tapak, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas kerja LTKL



Kabupaten SIAK



LINGKUNGAN

Luas Wilayah:
7.805,54 km²
786.298,28 ha

Luas kawasan hutan:
424.839,21 Ha

Luas APL berhutan:
Luas APL 356.330,97
Tutupan hutan di APL 11.993,53

Komitmen Kontribusi Kabupaten di Fase Tumbuh:
Melindungi setidaknya 1.000-1.500 ha mangrove, 100.000-150.000 hutan dan gambut, dan 12,15 ha taman kehati yang menjadi ekosistem penting



EKONOMI

PDRB dan sektor penyumbangnya:
109,92 triliun rupiah.
Industri Pengolahan, yaitu mencapai 39,96%
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,19%
lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,50%
lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 2,28%

Kontribusi PDRB 2024 (BPS, p.6)
1. Industri Pengolahan 41,1%
2. Pertambangan dan Penggalian 24,12%
3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 23,86%

PAD dan sektor penyumbangnya:
309.653.183.443,29 (2021)
1. pajak daerah retribusi daerah
2. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Potensi komoditas HHBK unggulan:
Sawit, Ikan Gabus, Nanas, Sagu



SOSIAL

Jumlah penduduk:
483,75 Ribu Jiwa (BPS, P.1)

Indeks Gini
0,271 (BPS, p.5)

Angkatan kerja dan % pengangguran:
Angkatan Kerja 67,16; Pengangguran 4,53 (BPS, p.4)

Suku etnis/adat:
Mayoritas masyarakat adalah Melayu Siak



KULTUR/BUDAYA

Kawasan cagar budaya/sejarah:
Istana Siak Sri Indrapura
Makam Sultan Syarif Kasim II

Adat setempat:
Upacara perkawinan adat Melayu Siak — mencakup prosesi seperti merisik-meminang, pantun buka pintu, mandi damai dan seni tekat sebagai ornamen budaya keraton
Tradisi menenun kain Siak (Tenunan tekat Melayu) — sebagai simbol estetika budaya dan identitas lokal

Kemajuan Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kabupaten



Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan:

Kabupaten Siak telah merancang RPJMD berdasarkan KLHS dan telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Menindaklanjuti komitmen Siak Hijau, telah ditetapkan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 4.004,78 Ha, sebagai upaya menjaga stabilitas penyediaan pangan lokal sesuai kebutuhan daerah.

Di sisi lain, sektor unggulan daerah telah mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum cukup untuk menopang percepatan pembangunan secara mandiri. Meskipun begitu, ada upaya pembangunan berkelanjutan yang tercermin dari penurunan angka pengangguran, yang mencapai 3,04% pada tahun 2024 atau sekitar 10.749 jiwa. Penurunan pengangguran diikuti juga dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 5,23% (26,99 ribu jiwa) pada 2023 menjadi 5,04% (26,72 ribu jiwa) di tahun 2024.

Kabupaten Siak, juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat



Pilar Tata Kelola Multipihak:

Kabupaten Siak telah memiliki peta tata batas desa dan wilayah kelola bersama yang disusun melalui metode pemetaan partisipatif, dengan keterlibatan langsung masyarakat adat. Participatory Land Use Planning ini dilakukan di sejumlah kampung di Kabupaten Siak seperti Kampung Lumbuk Umut,

Tasik Betung, Muara Bungkul, Becah Umbai, Dayun, Penyengat, Buatan I, Buatan II, dan Rantau Panjang.

Partisipasi masyarakat juga diwujudkan dalam bentuk riset dan pengumpulan data lapangan oleh komunitas lokal. Salah satu contohnya adalah Perkumpulan Bahtera Alam, yang telah melakukan kajian terkait ketersediaan lahan dan potensi ekonomi masyarakat di delapan kampung adat di Kabupaten Siak dimana ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam yang mereka kelola dan memanfaatkan secara turun-temurun.

Selain itu, Forum Kelembagaan Multipihak telah terbentuk dan berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah strategis bagi kolaborasi lintas sektor, memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis data, pengalaman lokal, dan prinsip keberlanjutan.



Pilar Ko-kreasi Bisnis dan Investasi Berkelanjutan:

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak telah tercapai dibuktikan dengan peningkatan PDRB serta kenaikan pendapatan per kapita tahunan yang mencapai Rp13.080.000 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan daya beli dan kontribusi sektor ekonomi utama terhadap pembangunan daerah.

Namun, disisi lain saat ini target produktivitas rata-rata dan produksi komoditas strategis kabupaten masih belum sepenuhnya tercapai dan tengah dalam proses peningkatan. Meskipun total produksi padi di Kabupaten Siak mengalami penurunan sebesar 10,08% pada tahun 2023, target produksi tanaman pangan padi di wilayah kabupaten tetap berhasil dipenuhi, mencerminkan ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi tantangan.



Pilar Pengukuran progres berkelanjutan kabupaten:

Kabupaten Siak mengaktualisasikan pemenuhan dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020–2040.



Pilar Amplifikasi Narasi:

Kabupaten Siak telah menerapkan sistem informasi kabupaten dengan sistem satu data yang sudah dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam berbagipakai data, ditandai dengan adanya Peraturan Bupati Siak No. 49 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Siak. Saat ini portal data Kabupaten Siak sudah dapat diakses oleh publik melalui laman <https://istanadata.siakkab.go.id/>



Potret Matahari Tenggelam di Sungai Siak, Kabupaten Siak

Siak: Menyulam Alam, Sejarah, Inovasi, dan Kolaborasi

Siak membangun identitas melalui destination branding “*Siak the Truly Malay*”, merajut sejarah, budaya, dan kekayaan alam ke dalam wajah pariwisata berkelanjutan. Dari jejak kejayaan Kesultanan Siak Sri Indrapura, sungai yang membelah kota, hingga hutan gambut Zamrud, seluruh modalitas itu dirangkai menjadi pengalaman yang memikat sekaligus inklusif bagi warga.

Salah satu inovasi wisata yang mencuri perhatian adalah makan beranyut di Sungai Siak. Berangkat dari kebiasaan lama masyarakat pesisir, tradisi itu dihidupkan kembali sebagai pengalaman kuliner terapung. Dengan Rp125.000 per orang (minimal 10 orang), wisatawan disuguhi hidangan khas Melayu—gulai ikan baung, sambal tempoyak, ayam panggang serai, nasi minyak, bulu kemojo—dimasak ibu-ibu kampung dengan resep turun-temurun. Nelayan berperan sebagai pengemudi perahu wisata, anak muda menjadi pemandu, dan perempuan kampung tampil sebagai juru masak. Ekonomi lokal pun berputar, dari dapur rumah hingga warung kopi di tepian sungai.

Perahu membawa tamu menyusuri jejak sejarah—Masjid Syahabuddin, Tangsi

Belanda, Makam Sultan Syarif Kasim II, Skywalk Tengku Buang Asmara, hingga Jembatan Sultanah Latifah—ditemani kisah pemandu tentang kesultanan dan kolonial. Antusiasme tinggi, terutama akhir pekan; banyak pengunjung datang dari Pekanbaru, Dumai, hingga luar Sumatera.

Di rute alam, Taman Nasional Zamrud menjadi ikon konservasi gambut. Bersama mitra seperti Perkumpulan Elang, masyarakat sekitar didampingi melalui perhutanan sosial, agroforestri, dan penguatan kelompok tani agar hutan terjaga sekaligus memberi alternatif ekonomi. Ekowisata Zamrud melahirkan homestay desa, peluang kerja, dan kebanggaan warga sebagai penjaga sekaligus tuan rumah.

Di sisi inovasi, Sentra Kreatif Lestari Siak (SKELAS) berperan sebagai inkubator UMKM—mendampingi lebih dari 30 pelaku usaha dari kuliner, fesyen, hingga kerajinan. Ekosistem ini memperkaya pengalaman destinasi: produk lokal kian mudah ditemukan melalui ruang-ruang kurasi (seperti pop-up Pusat Informasi Siak saat festival), gerai mitra, dan kanal pemasaran yang terhubung dengan komunitas kreatif. Inovasi berbasis alam—misalnya pengolahan nanas gambut oleh Pinaloka atau suplemen albumin dari ekstrak ikan gabus

hasil budidaya lahan gambut yang dikembangkan oleh Alam Siak Lestari (ASL)—memperkuat citra Siak Asik (Alam, Sejarah, Inovasi, Kolaborasi) dan memperluas manfaat ekonomi bagi warga.

Semua capaian ini lahir dari kolaborasi multipihak: pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan mitra pembangunan. “Siak the Truly Malay” tidak berhenti pada istana dan cerita masa lalu; ia hidup di sungai, di dapur-dapur kampung, di laboratorium para orang muda, dan di hutan gambut yang dijaga bersama—membuat Siak bukan sekadar tujuan wisata, melainkan ruang belajar tentang bagaimana warisan bertemu masa depan.

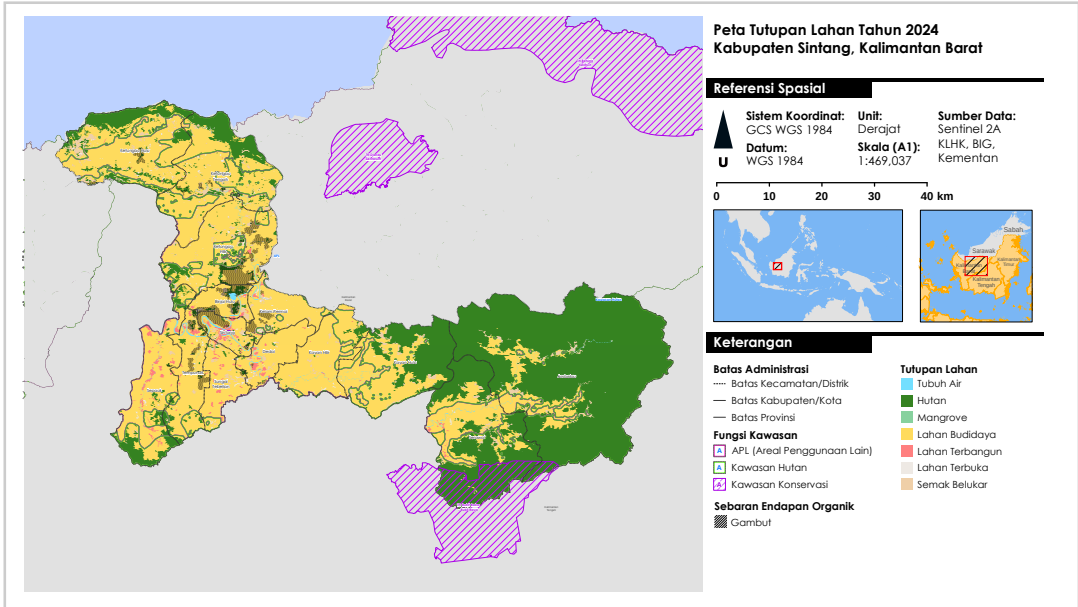
“**Ketika wisatawan datang, mereka makan produk lokal: udang gala, ikan patin, atau nanas. Uangnya berputar ke petani dan nelayan, menciptakan multiplier effect bagi ketahanan pangan.**”

Muhammad Hamdani, Dinas Ketahanan Pangan Siak

Catatan: Cerita ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif dan pengalaman dari tapak, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas kerja LTKL



Kabupaten SINTANG



LINGKUNGAN

Luas Wilayah:
21.638 km²
2.196.772.66 Ha

Luas kawasan hutan:
1.286.805.66 Ha

Luas APL berhutan:
Luas APL 909.967.00
Tutupan Hutan di APL 45.677.80 Ha

Komitmen Kontribusi Kabupaten di Fase Tumbuh:
Melindungi setidaknya total 82.748 Ha kawasan hutan, gambut, dan ekosistem penting



EKONOMI

PDRB dan sektor penyumbang:
PDRB perkapita 46,17 Juta didapatkan dari
1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan 24,47%
2. Sektor Pariwisata 427,5 Juta
3. Sektor Perdagangan 16,28%
4. Sektor Industri 8,95%

PAD dan sektor penyumbang:
Rp 179.044.685.320,10 didapatkan dari
1. Pajak Daerah

Potensi komoditas HHBK unggulan:
Sawit, Kakao, Tengkwang, Ikan Gabus



SOSIAL

Jumlah penduduk:
443.684 Jiwa Penduduk

Indeks Gini
-

Angkatan kerja dan % pengangguran:
Angkatan Kerja 74,96 % dan 4,86% Tingkat Pengangguran Terbuka

Suku etnis/adat:
Mayoritas masyarakat adalah Dayak (terutama sub-etnis Mualang/Ibanik) dan Melayu



KULTUR/BUDAYA

Kawasan cagar budaya/sejarah:
Istana Al-Mukarramah dan Masjid Jami' Sultan Nata (peninggalan Kerajaan Sintang)
Rumah Betang Ensaid Panjang (Rumah adat Dayak aktif)

Adat setempat:
Gawai Dayak (festival panen meriah masyarakat Dayak)
Tenun ikat Sintang (kerajinan tradisional Dayak Sintang dengan motif flora-fauna lokal)

Kemajuan Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kabupaten



Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan:

Kabupaten Sintang menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan berkelanjutan dengan merancang RPJMD sesuai dengan KLHS. Kabupaten Sintang saat ini telah memiliki dokumen Rencana Aksi Integrated Area Development yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan pemangku kepentingan utama yang telah diidentifikasi secara resmi melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 100.3.3.2/1251/KEP-BAPPEDA/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana TPB Kabupaten Sintang Tahun 2024. Saat ini data lahan pangan Kabupaten sintang telah tersedia, namun Kabupaten Sintang belum menetapkan target penyediaan lahan produksi pangan di tingkat kabupaten. Hal ini menjadi peluang untuk kajian lebih lanjut agar ketersediaan lahan dapat mendukung ketahanan pangan jangka panjang selaras dengan pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi sosial dan ekonomi, Kabupaten Sintang menunjukkan tren pembangunan yang positif walaupun saat ini peningkatan ekonomi dari sektor unggulan kabupaten belum tercapai sesuai target. PDRB per kapita meningkat dari Rp34,96 juta pada 2020 menjadi Rp46,17 juta pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 5,10% per tahun. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 2,85% dan terus melampaui target penurunan selama tiga tahun terakhir. Namun, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi di angka 8,06% pada 2024, meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Sintang terus menurun sejak 2020, ini tetap mencerminkan adanya tantangan struktural dimana banyak warga masih terserap di sektor informal.

Tidak melupakan akar, Kabupaten Sintang juga telah

menunjukkan langkah konkret dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat, serta Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat. Kebijakan ini menjadi pijakan penting dalam membangun tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkeadilan, tanpa meninggalkan akar budaya dan kearifan lokal.



Pilar Tata Kelola Multipihak:

Dalam mewujudkan Sintang Lestari, Kabupaten Sintang mengambil langkah serius yang tidak hanya sebatas aksi, tetapi telah menjadi visi daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021–2026. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan forum kelembagaan multipihak yang diformalkan lewat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 000.7/KEP-BAPPEDA/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Multi Pihak Pembangunan Lestari di Kabupaten Sintang Tahun 2023. Kehadiran forum ini menandai sinergi yang kuat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah Sintang.

Selain itu, tata kelola multipihak juga diperkuat melalui pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di kabupaten Sintang yang memiliki peran penting dalam menjaga wilayah dan sumber daya alamnya. Saat ini, data tanah wilayah adat di Kabupaten Sintang sudah mulai tersedia meskipun masih dalam tahap pengembangan.



Pilar Ko-kreasi Bisnis dan Investasi Berkelanjutan:

Target PDRB Kabupaten Sintang memang belum sepenuhnya tercapai dan masih terus dioptimalkan. Dari lima sektor utama, hanya sektor pariwisata yang berhasil melampaui target selama 2022–2024, di tahun 2024, realisasinya bahkan mencapai Rp427,5 juta dari target Rp235 juta. Sementara itu, sektor pertanian dan perkebunan, perdagangan, serta industri masih belum menyentuh target, walaupun selisihnya relatif kecil dan tiap tahunnya terus menunjukkan tren positif. Di sisi lain, pendapatan per kapita masyarakat Sintang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan selalu melampaui target, yang jadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup menjanjikan. Kabupaten Sintang juga sudah menetapkan lima komoditas unggulan, yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan lada. Namun, produktivitas komoditas ini masih bervariasi: kelapa sawit dan lada sudah melampaui target produksi, sementara karet, kopi, dan kakao masih di bawah target dan bahkan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Untuk tanaman pangan strategis, Kabupaten Sintang perlu mencari cara agar produksi padi dan jagung dapat mencapai target, karena tercatat pada tahun 2024 penanaman padi hanya tercapai 30.423 ton dari target 92.554 ton, hal ini juga terjadi dengan produksi jagung, yang ditargetkan 3.989 ton, namun hingga kini realisasinya masih belum tersedia. Produktivitas tanaman pangan prioritas memang meningkat setiap tahun, namun hal tersebut dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara optimal dan terus dalam proses.



Pilar Pengukuran Progres Berkelanjutan Kabupaten:

Dengan semangat tata ruang berkelanjutan, Kabupaten Sintang terus melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan melalui Perda No. 20 Tahun 2015. Upaya ini dilakukan untuk menyesuaikan rencana tata ruang dengan dinamika pembangunan terkini, termasuk tantangan seputar pertumbuhan penduduk yang belum merata. Saat ini, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang tercatat rata-rata 1,40% per tahun, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Sintang yang mencapai 2,58%.



Pilar Amplifikasi Narasi:

Saat ini, Kabupaten Sintang telah menerapkan sistem informasi yang berlandaskan pada prinsip Satu Data Indonesia, yang telah dimanfaatkan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung berbagai pakai dan pemanfaatan data. Namun, akses terhadap platform Satu Data Kabupaten Sintang masih terbatas untuk publik.



Momentum Unboxing Day: Sinkronisasi Pemerintah Sintang dengan Mitra Pembangunan menuju Sintang Lestari

Unboxing Day dan Awards: Merayakan Inovasi Kolaborasi Multipihak di Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak melalui Sekretariat Bersama (Sekber). Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah penyelenggaraan "Unboxing Day" dan "Mitra Pembangunan Awards", yang menjadi platform untuk merayakan inovasi dan kolaborasi multipihak dalam pembangunan daerah.

"Unboxing Day" di Kabupaten Sintang bukan sekadar acara seremonial, melainkan simbol dari semangat terbuka dalam menerima dan mengimplementasikan ide-ide baru. Acara ini menjadi ajang bagi pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan media untuk bersama-sama mengeksplorasi solusi inovatif terhadap tantangan pembangunan yang dihadapi. Melalui sesi-sesi interaktif dan diskusi terbuka, Unboxing Day mendorong terciptanya

sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan program yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Sintang, Bobby Oktavianus menjelaskan, dalam perencanaan kegiatan kolaborasi multipihak melalui tiga tahapan.

"Yang pertama, melaksanakan rapat koordinasi dan kolaborasi semua mitra yang disebut dengan Unboxing Day. Kegiatan ini menjadi kesempatan mitra memperkenalkan diri siapa mereka, sudah melakukan program apa, atau apa proyeksi programnya sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengidentifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan dengan mitra," jelasnya.

Keluaran dari kegiatan Unboxing Day ini adalah daftar usulan kolaborasi dari pemerintah daerah yang bisa menjadi masukan program kerja mitra. Di tahap kedua, Sekretariat Bersama Forum Multipihak akan membantu memfasilitasi pertemuan OPD yang membutuhkan dukungan kolaborasi multipihak dari sektor swasta. Pada tahap ketiga, pemerintah daerah akan mensosialisasikan seluruh program kegiatan dan kebutuhan di daerah

kepada semua mitra pembangunan dengan pendekatan pentahelix.

Bobby menambahkan, pengembangan produk unggulan daerah, dari semua arah regulasi dan kebijakan di Sintang telah mengamanatkan ekonomi inklusif.

"Inovasi kolaborasi dapat dilihat dari sinergi multipihak seperti program yang difasilitasi FKMS untuk penyusunan rencana aksi daerah keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Kemudian, dalam penyusunan rencana penyusunan pengembangan produk lokal juga banyak didukung Gemilang melalui inkubasi UMKM. Termasuk kolaborasi dengan Semesta Sintang Lestari yang fokus dengan produk unggulan lokal biskuit Bischo."

Bobby mengakui ini sebagai sebuah pencapaian besar dalam inovasi kolaborasi multipihak, meski proses adaptasi pemerintah daerah masih menjadi tantangan karena harus membiasakan diri untuk bisa berkolaborasi dengan mitra yang bersifat sukarela. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah daerah Kabupaten Sintang rutin menggelar Mitra Pembangunan Award. Ini pemberian penghargaan kepada mitra pembangunan yang telah berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Sintang.



Ada pencapaian besar selama bersinergi dengan pemerintah. Kolaborasi dengan SSL yang didukung FKMS sebagai salah satu mitra ini untuk menjawab tantangan lapangan kerja hijau yang tidak ekstraktif. Saat ini juga pengembangan ikan gabus dan perancangan prototyping produk lain seperti durian, kopi, tengkawang dan rempah

Millavenia Pusparini - PT. Semesta Sintang Lestari.

Mitra Pembangunan Awards merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang kepada para mitra yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor pembangunan. Sepanjang tahun 2024, jejaring kemitraan yang mencakup 49 lembaga internasional, nasional, dan lokal; 46 sektor swasta termasuk lembaga keuangan; 8 perguruan tinggi; serta media massa terlibat aktif mendampingi 92 desa/kelurahan yang tersebar 13 kecamatan.

Kolaborasi ini berkontribusi langsung

pada pencapaian 9 dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, yang mencakup penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, penguatan pembangunan manusia dan reformasi birokrasi, penurunan angka pengangguran terbuka, terwujudnya desa mandiri, meningkatnya kerukunan umat beragama, hingga perolehan opini BPK atas laporan keuangan daerah. Tidak hanya itu, kerja sama ini juga mendukung capaian 13 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menunjukkan bahwa Sintang mampu menghubungkan langkah lokal dengan tujuan global.

Sinergi lintas sektor ini memastikan setiap langkah yang dilakukan mitra selaras dengan arah pembangunan kabupaten. Kemitraan yang telah terbangun dan mengakar pada visi bersama ini menjadi landasan kuat bagi perjalanan menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam kontribusi pembiayaan pada tahun 2024, di mana perusahaan menyumbang Rp33.708.087.006 dan mitra pembangunan sebesar Rp35.185.167.417.



Anak muda punya potensi besar untuk berdaya dan berkontribusi pada pembangunan melalui berbagai cara,

Vela - Gemilang.

Sintang Collaborative Governance: Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Penyelenggaraan Unboxing Day dan Mitra Pembangunan Awards tidak lepas dari implementasi Sintang Collaborative Governance (SCG), yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024. SCG menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media dalam merancang dan melaksanakan pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa semua pihak memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang.

Melalui Unboxing Day dan Mitra Pembangunan Awards, Kabupaten Sintang tidak hanya merayakan pencapaian, tetapi juga menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperkuat kemitraan. Acara ini menjadi momentum penting

untuk mengukur, menilai, dan mengkomunikasikan hasil kerja bersama yang telah dilakukan berbagai pihak. Hasil dan pembelajaran dari proses ini kemudian menjadi dasar bagi langkah-langkah berikutnya dalam mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Sintang.



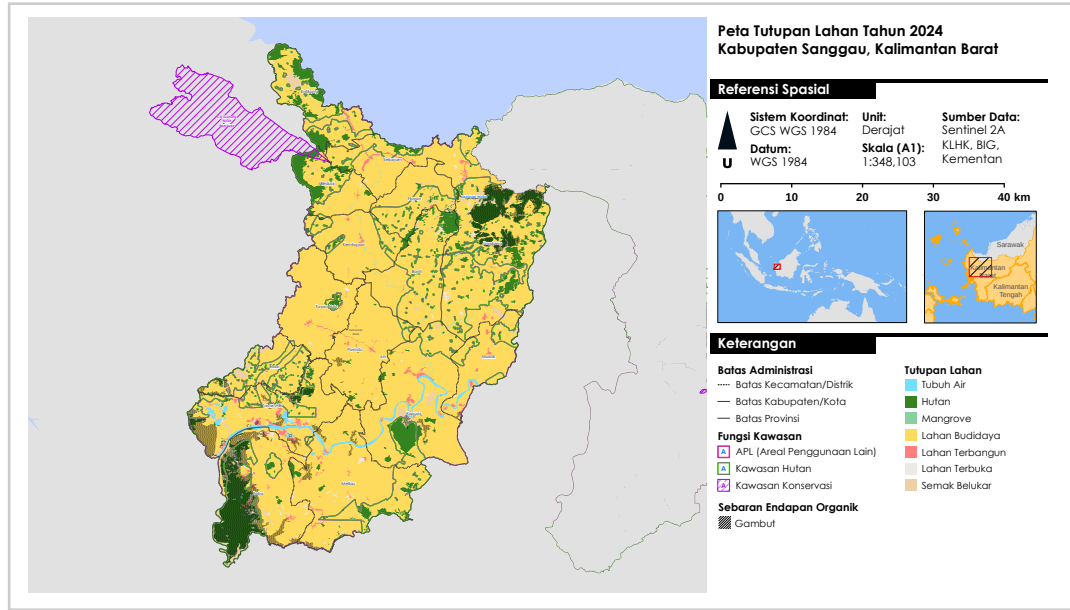
Ada pencapaian progres yang lebih terbuka dan transparan ketika keterbatasan resources terjadi. Proses RPJMD juga lebih terbuka, serta keterlibatan dengan banyak pihak cukup dinamis dengan menggunakan pendekatan pentahelix,

Sri Januarsih Wihastuti - FKMS

Catatan: Cerita ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif dan pengalaman dari tapak, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas kerja LTKL



Kabupaten SANGGAU



LINGKUNGAN

Luas Wilayah:
12.857,70 km²
1.245.222,42 ha

Luas kawasan hutan:
499667,17 Ha

Luas APL berhutan:
Luas APL 16.859,16 Ha
Tutupan hutan di APL 745.555 Ha

Komitmen Kontribusi Kabupaten di Fase Tumbuh:
Melindungi setidaknya 143.114 ha hutan, gambut, dan ekosistem penting serta menambah 0,08% tutupan hutan yang ada di yuridiksi kab. Sanggau



EKONOMI

PDRB dan sektor penyumbang:
Rp 26.523,74 (miliar rupiah)

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan – 36,09%
2. Industri Pengolahan – 15,98%
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor – 11,75%

PAD dan sektor penyumbang:
Rp 159.059,65 (miliar rupiah) didapatkan dari
1. Sektor Pertanian, perkebunan Kehutanan, dan Perikanan;
2. Sektor Industri Pengolahan.

Potensi komoditas HHBK unggulan:
Sawit, Kopi, Kakao



SOSIAL

Jumlah penduduk:
494.044 (pada tahun 2023)

Indeks Gini
0,285 (Pada Tahun 2022)

Angkatan kerja dan % pengangguran:
Angkatan Kerja 74,96 % dan 4,86% Tingkat Pengangguran Terbuka

Suku etnis/adat:
Suku Dayak Sami, Dayak Mayao



KULTUR/BUDAYA

Kawasan cagar budaya/sejarah:
Istana Surya Negara peninggalan Kesultanan Sanggau (abad ke-18).
Keraton Sanggau – pusat kekuasaan tradisional Melayu.
Kelenteng Tua di Kapuas dan Sanggau Ledo – simbol akulturasi Tionghoa.
Gua Maria Seringai – situs ziarah Katolik, juga dianggap sakral oleh Dayak.

Adat setempat:
Gawai Dayak – perayaan panen dan penghormatan leluhur.
Naik Dango – upacara adat syukuran atas hasil bumi.

Kemajuan Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kabupaten



Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan:

Kabupaten Sanggau telah menyusun RPJMD berbasis KLHS dan selaras dengan TPB/SDGs, dengan indikator yang merujuk pada pilar pembangunan berkelanjutan. Di sektor penyediaan lahan, diperlukan perhatian dalam penguatan kebijakan perlindungan kawasan pertanian, karena walaupun saat ini target stabilitas keberadaan lahan penyedia pangan telah tercapai, namun produktivitas pangan utama seperti padi, tercatat pada 2022 sebesar 26,88 ton/ha menurun menjadi 25,67 ton/ha di tahun 2023, penurunan ini disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan. hal ini perlu perhatian mengingat saat ini struktur ekonomi kabupaten masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan PDRB ADHB mencapai Rp24,5 triliun pada 2023.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau melambat di 2023, diikuti dengan kenaikan angka pengangguran menjadi 3,86% dari sebelumnya 3,76% dan garis kemiskinan yang meningkat. Menyikapi hal ini Pemerintah Daerah telah membentuk Tim dan Sekretariat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melalui SK Bupati No. 237/Bappeda/2023 yang harpannya dapat memperkuat sinergi dalam mengurangi kemiskinan. Lebih dari itu Kabupaten Sanggau menunjukkan komitmen untuk terus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, dibuktikan dengan pengakuan terhadap masyarakat adat Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami, Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau yang tercantum pada SK Bupati No. 527 Tahun 2020.



Pilar Tata Kelola Multipihak:

Kabupaten Sanggau telah memiliki peta tata batas desa dan wilayah kelola bersama yang disusun melalui metode pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat. Hingga saat ini, dari 163 desa, sebanyak 143 desa telah masuk dalam proses pemetaan. Forum Kelembagaan Multipihak juga telah terbentuk dan aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Kabupaten Sanggau telah memiliki basis data masyarakat hukum adat yang disusun melalui proses partisipatif. Komitmen ini diperkuat dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami, Kecamatan Bonti, yang diatur melalui SK Bupati Sanggau No. 527 Tahun 2020.



Pilar Ko-kreasi Bisnis dan Investasi Berkelanjutan:

Kabupaten Sanggau menunjukkan kinerja positif dalam penguatan ekonomi daerah. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp26,52 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (36,09%). Pertumbuhan ekonomi juga mengalami percepatan dari 2,04% pada 2023 menjadi 4,14% di 2024. Komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit (1.264.957 ton), karet (47.800 ton), kakao (14 ton), dan biji kopi (96 ton) menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Meskipun produktivitas komoditas strategis telah memenuhi target, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, khususnya terkait efisiensi lahan, air, dan pupuk. Di sisi lain, target produksi tanaman pangan utama nasional (padi, jagung, kedelai) belum sepenuhnya tercapai, ditandai dengan penurunan

produktivitas padi dari 26,88 ton/ha pada 2022 menjadi 25,67 ton/ha pada 2023. Namun secara umum, target pendapatan per kapita dan produktivitas komoditas unggulan daerah telah tercapai



Pilar Pengukuran Progres Berkelanjutan Kabupaten:

Kabupaten Sanggau telah mengaktualisasi pemenuhan dan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sanggau sesuai dengan RTRW yang berlaku.



Pilar Amplifikasi Narasi:

Kabupaten Sanggau telah menerapkan sistem informasi kabupaten yang sesuai dengan kaidah kebijakan Satu Data Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbentuknya kelembagaan dan terselenggaranya pelaksanaan Satu Data melalui diterbitkannya Peraturan Bupati Sanggau Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Sanggau, serta Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 376/Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Sanggau. Dalam implementasinya, telah tersedia portal data yang dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dapat diakses oleh publik melalui tautan <https://data.sanggau.go.id>. Portal ini juga telah terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia tingkat nasional.



Diskusi Multipihak di dalam Hutan Adat Desa Tae Kabupaten Sanggau

Sanggau: Ekowisata dan Komoditas dari Hutan Adat Tae

Desa Tae, dengan luas 2.538 hektar dan delapan kampung di dalamnya, berada di kawasan Bukit Tiong Kandang yang sakral. Di sinilah masyarakat adat menjaga hutan adat seluas 2.189 hektar, diakui melalui SK Menteri LHK No. 5770/2018. Hutan ini dibagi dalam sembilan zona pemanfaatan berbasis kearifan lokal: mulai dari hutan rimba (pengarakng magokng), kebun buah tembawang, hutan larangan, hingga area keramat dan sumber air. Semua diatur melalui hukum adat yang ketat—tidak boleh menebang sembarangan,

menjual tembawang tanpa izin, atau masuk ke hutan tanpa ritual adat.

Ekowisata sebagai Pintu Masuk

Dengan modal kekayaan alam dan budaya, Desa Tae mulai merintis ekowisata sebagai jalan baru meningkatkan ekonomi. Paling ikonik adalah Festival Budaya Lingkar Tiong Kandang, helatan tahunan yang menggabungkan ritual adat, tarian Dayak, pawai budaya, hingga tradisi perempuan mengolah pangan secara tradisional. Festival ini tidak hanya

memperkuat identitas adat, tetapi juga membuka pintu bagi wisatawan untuk merasakan langsung harmoni antara manusia, budaya, dan hutan.

Gunung Tiong Kandang, Batu Batuka', hingga Danau Laet menjadi destinasi alam yang kini dipromosikan. Paket wisata pun mulai ditawarkan, termasuk pengalaman unik mencicipi durian tembawang—durian tua berusia ratusan tahun yang menjadi komoditas unggulan Desa Tae dan disebut sebagai salah satu durian terbaik di Kalimantan Barat.

Selain ekowisata, masyarakat Desa Tae mengembangkan komoditas berbasis hutan adat. Tengkwang diolah menjadi butter dan bahan kosmetik, kopi dan aren diturunkan sebagai warisan turun-temurun, sementara perempuan adat mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi produk pangan (wedang jahe, dodol pepaya, keripik ubi) dan kerajinan bambu.

Peran perempuan sangat menonjol. Melalui kelompok perempuan adat dan Sekolah Perempuan Adat, mereka menjadi perawat pengetahuan lokal sekaligus penggerak ekonomi keluarga. Pembibitan tanaman lokal seperti kopi, durian, tengkwang, hingga tanaman obat menjadi cara mereka merawat hutan sekaligus membuka peluang ekonomi.

Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif

Semua inisiatif ini tidak berjalan sendiri. Ada Institut Dayakologi yang mendampingi pengelolaan hutan adat dan Samudra Bekudong'k yang memfasilitasi promosi produk lokal melalui video profil dan dokumenter. Pemerintah daerah pun telah menjadikan pelestarian adat, budaya, dan lingkungan sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau, dan dibalik itu semua ada Sekretariat Bersama Sabang Merah Berdompu yang berperan sebagai forum multipihak dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan program mitra dan memastikan kerja-kerja komunitas adat selaras dengan RKPD Kabupaten Sanggau. Meski diakui, pengembangan ekowisata masih terkendala keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Karena itu, forum multipihak terus mendorong lahirnya mitra baru yang fokus mengembangkan ekowisata di Desa Tae, sembari memperkuat komoditas alternatif ramah lingkungan seperti tengkwang dan kopi sebagai penyangga masa depan ekonomi Sanggau.

Dengan kekayaan alam, budaya, dan kekuatan kolaborasi, Desa Tae

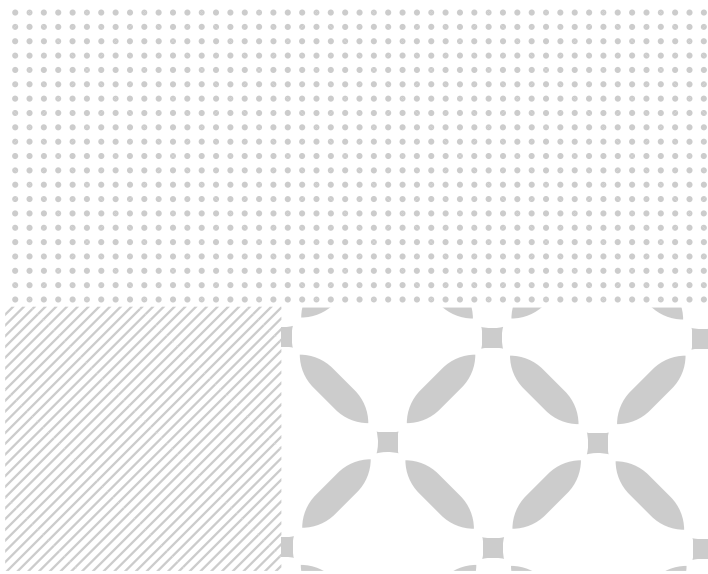
menunjukkan bahwa pembangunan inklusif dan lestari bukan hanya wacana, melainkan jalan yang sudah ditempuh masyarakat adat dari generasi ke generasi.

Marselus Yopos, tokoh adat Desa Tae menambahkan kolaborasi multipihak berdampak positif untuk mensejahterakan masyarakat dan lingkungan di Desa Tae.

“

Kondisi hutan yang ada tetap terjaga hingga dan berdampak baik terhadap hidup masyarakatnya. Ada udara segar, sumber oksigen, pangan lokal untuk konsumsi sehari-hari tetap terjaga. Juga eksistensi kelompok adat yang kuat terutama terbentuknya kelompok perempuan adat,

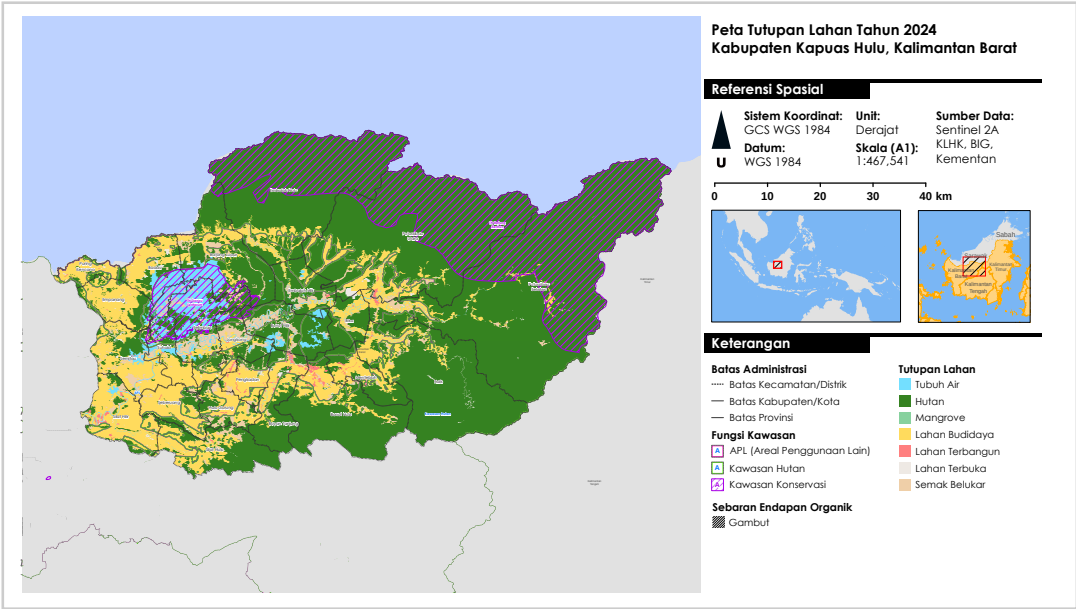
Marselus Yopos, Tokoh Adat Desa Tae.



Catatan: Cerita ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif dan pengalaman dari tapak, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas kerja LTKL



Kabupaten Kapuas Hulu



LINGKUNGAN

Luas Wilayah:
31.318,246 km²
3.131,824.61 ha

Luas kawasan hutan:
2,367,581.45 Ha

Luas APL berhutan:
Luas APL 764,243 Ha
Tutupan hutan di APL 196,167.06 Ha

Komitmen Kontribusi Kabupaten di Fase Tumbuh:
Melindungi ekosistem penting dalam luasan sekitar 5-10% APL di yurisdiksi kabupaten



EKONOMI

PDRB dan sektor penyumbang:
Rp 14,34 triliun didapatkan dari
1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 3,25 triliun rupiah sebesar 22,69%
2. Sektor konstruksi sebesar 22,28%
3. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,95%

PAD dan sektor penyumbang:
59.044.116,84 * Angka sementara di 2024
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang sah

Potensi komoditas HHBK unggulan:
Sawit, Tengawang, Kakao



SOSIAL

Jumlah penduduk:
265,77 (pada 2024)

Indeks Gini
-

Angkatan kerja dan % pengangguran:
151.250 angkatan kerja dan 2,18% pengangguran di Kabupaten Kapuas Hulu pada 2024 (BPS, 2025, p.14)

Suku etnis/adat:
Etnis utama: Dayak (Iban, Kantu', Tamambalo, Taman, dll.) dan Melayu
Komunitas adat masih aktif (mis. Bukitan, Kantu')
Sekolah adat didirikan untuk pelestarian budaya Dayak



KULTUR/BUDAYA

Kawasan cagar budaya/sejarah:
Rumah Betang tradisional (Melapi, Semangkok, Lunsia Hilir)
Situs Purbakala Nanga Balang
Masjid Tua Baiturrahim, Makam Marah Juang
Gereja St. Fedelis, Batu Kapal, Danau Sentarum

Adat setempat:
Gawai Dayak (Pamole Beo) – syukuran panen
Ngampun – ritual penyeimbang kosmos Dayak Iban
Tradisi adat aktif melalui festival budaya dan sekolah adat

Kemajuan Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kabupaten



Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan:

Kabupaten Kapuas Hulu sudah mengintegrasikan KLHS dan data DDDTLH ke dalam RPJMD sebagai bentuk komitmen pembangunan berkelanjutan. Target stabilitas lahan pangan masih berproses, sejalan dengan penyusunan dokumen kebijakan yang mendukung SDGs. Kinerja ekonomi menunjukkan capaian positif: tingkat pengangguran menurun menjadi 2,18% dari total 151.250 angkatan kerja, peningkatan ekonomi dari sektor unggulan menghasilkan PDRB Rp14,34 triliun, dan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 22,59 ribu di 2023, menjadi 20,77 ribu jiwa di 2024. Kabupaten ini juga telah memiliki produk hukum yang mengatur pengakuan serta perlindungan masyarakat adat.



Pilar Tata Kelola Multipihak:

Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki peta batas desa serta wilayah kelola bersama melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Tata kelola multipihak juga telah difasilitasi melalui pembentukan Forum Kelembagaan Multipihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Meskipun basis data masyarakat hukum adat saat ini masih dalam proses penyusunan, pemerintah daerah telah menetapkan SK Bupati No 46/DLH/2021 tentang pembentukan panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Kapuas Hulu, serta beberapa SK pengakuan bagi sejumlah komunitas adat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu seperti Suku Dayak Iban dan Suku Dayak Kalis. Langkah ini menunjukkan komitmen Kapuas Hulu dalam membangun tata kelola yang lebih inklusif dan berakar pada identitasnya sebagai kabupaten konservasi.



Pilar Ko-kreasi Bisnis dan Investasi Berkelanjutan:

Meskipun Kabupaten Kapuas Hulu belum menetapkan target capaian PDRB secara spesifik, nilai PDRB menunjukkan tren kenaikan setiap tahun, dari Rp12,19 triliun pada 2022 menjadi Rp14,34 triliun pada 2024, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, target pendapatan per kapita masih dalam proses pencapaian. Produktivitas dan produksi komoditas strategis daerah, termasuk tanaman pangan utama nasional (padi, jagung, kedelai), juga belum mencapai target dan masih terus diupayakan melalui penguatan sektor hulu, peningkatan kapasitas produksi, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani.



Pilar Pengukuran progres berkelanjutan Kabupaten:

Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih dalam proses aktualisasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan ketentuan RTRW yang berlaku.



Pilar Amplifikasi Narasi:

Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih belum memiliki sistem informasi berbasis Satu Data Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh para OPD maupun diakses publik melalui portal data.



Suasana pembelajaran bersama perempuan penenun di kampung Dayak Iban, Kapuas Hulu.

Tenun Dayak Iban dan Inovasi Pewarna Alami

Di tahun 2022, Hardiyanti berkeliling di banyak kampung dayak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Tujuannya satu, untuk menelusuri khasanah kekayaan tenun Dayak Iban. Sebagai peneliti independen, merasa tergugah untuk melakukan perjumpaan-perjumpaan untuk mendapatkan cerita langsung dari para perempuan penenun Dayak Iban yang tersebar di 89 kampung. Termasuk saat ia bertemu dengan Mariana Renda yang menceritakan proses penciptaan motif yang dibuatnya. Indai Renda, penenun senior yang tinggal di Lauk Rugun sangat

menguasai berbagai teknik dan motif.

Hardiyanti menilai, ini sebuah pencapaian sekaligus pekerjaan rumah yang besar untuk membantu mengangkat warisan leluhur yang di setiap helainya keindahan karya tenunnya merepresentasikan nafas kehidupan perempuan Dayak Iban.

Hingga kemudian Yayasan Kawan Lama melalui Pendopo bermitra dengan Citra Tenun Indonesia menjawab temuan Hardiyanti dengan menginisiasi program Aram Bekelala Tenun Iban

yang artinya, “Mari berkenalan dengan tenun Iban.” Program inisiatif yang dijalankan oleh Yayasan Kawan Lama ini menggabungkan pelestarian budaya, pemberdayaan perempuan, dan penguatan ekonomi lokal.

Program ini difokuskan dengan mengajak 20 perempuan penenun dari Dusun Lauk Rugun, Mungguk, Pulan, dan Sungai Utik. Mereka mengikuti pelatihan intensif belajar teknik pewarnaan alami dari bahan hutan, belajar motif dan desain, menghitung biaya produksi, serta bagaimana memasarkan produk kainnya tanpa menghilangkan nilai budaya yang diminati konsumen dan mempunyai nilai jual tinggi.

Dalam pelatihan itu, Yayasan Kawan Lama berkolaborasi dengan mitra ahli di bidang tenun. Ada ahli pewarnaan, desainer tekstil, perancang pakaian yang memberikan motivasi dan pengetahuan bahwa karya yang mereka hasilkan adalah karya berkualitas. Tim ahli seperti Cita Tenun Indonesia dan desainer Wilsen Willim untuk memberikan edukasi kepada para penenun mengajak kolaborasi tenun Iban menjadi pakaian siap pakai dia ajang fashion show tingkat Nasional.

Tak hanya itu, Komitmen keberlanjutan Untuk mengangkat tenun Dayak Iban dilakukan melalui kolaborasi multipihak. Kawan Lama Group menyiapkan ekosistem bisnis bagi karya para penenun. Mereka bisa memanfaatkan promosi dan akses pasar dari produk-produk tenun yang dihasilkan melalui model kemitraan bersama dengan jaringan 300 UKM di seluruh Indonesia. Pendopo sebagai unit bisnis Kawan Lama Group juga memasarkan hasil karya penenun di kanal digital sehingga mempunyai peluang pasar tak terbatas.

Ketua Yayasan Kawan Lama, Tasya Widyakrisnadi menyebut bahwa program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas perempuan penenun Dayak Iban yang mendukung ekonomi sirkular. Tidak hanya sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya wastra di Kapuas Hulu, tapi memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Pada pendampingan ini, Yayasan Kawan Lama mengajak para penenun berinovasi dengan mengidentifikasi warna alam yang lain dan mencari pigmen tumbuhan baru dengan memaksimalkan sumber daya alam di hutan Kapuas Hulu yang 50 persennya hutan lindung yang masih bagus. Penggunaan pewarna alami pada kain

tenun Dayak Iban memang menjadi ciri khas. Pewarnaan pada benang itu dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan yang di dapat di hutan.



Ini menjadi ciri khas mereka secara turun temurun. Warna alam cukup digemari dan suku Dayak Iban sudah menggunakan warna alam dari tumbuhan seperti rengat padi, rengat akar, angkerbay, akar mengkudu. Jenis tumbuhan itu saja yang dipakai,

Hardiyanti - Mahakarya Tenun.

Hasilnya, koleksi warna alami baru bertambah. Ada 49 jenis warna baru yang kemudian membuat motif tenun yang dihasilkan menjadi lebih atraktif. Meski punya varian warna baru, ciri khas di setiap lembar hasil tenun tetap ditonjolkan dengan menyesuaikan jenis warna pada kain sesuai dengan peruntukannya. Kain tenun untuk ritual adat tetap menggunakan warna-warna pakem seperti merah bata, coklat dan hitam yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan warna hasil inovasi digunakan untuk kebutuhan selera pasar.

Hardiyanti menambahkan, dari program pendampingan selama setahun terakhir ini, menampakkan hasil. Terutama melihat perubahan signifikan dengan meningkatnya produktivitas mereka dalam menghasilkan kain tenun. Yang sebelumnya satu lembar kain selesai dalam waktu dua bulan, kini mereka mulai berpikir bahwa pekerjaan menenun menghasilkan nilai ekonomi yang menggiurkan untuk menambah pendapatan rumah tangga. Hasil tenun, tak hanya untuk bayar sekolah anak dan membeli kebutuhan dapur. Bahkan kesejahteraan itu bisa terlihat dari kemampuan membeli perabotan di rumah.

Inisiatif regenerasi dilakukan melalui program Kawan Lama Mengajar untuk memberikan edukasi bagi anak-anak para penenun. Dengan semangat keberlanjutan, program ini menyasar generasi muda dari anak-anak perempuan Dayak Iban untuk belajar menenun. Mereka belajar literasi pendidikan dasar, budaya dan alam dengan cara belajar tentang hutan sebagai sumber kehidupan dan mengenali berbagai jenis motif tenun.

Di sisi lain, para perempuan penenun Dayak Iban juga mulai mempersiapkan anak-anak perempuan mereka sebagai generasi penerus untuk menjaga

dan melestarikan warisan leluhurnya. Regenerasi penenun mulai tumbuh dengan bermunculan penenun muda yang belajar dari orangtua. Proses regenerasi juga tak lepas dari keterlibatan dan dukungan banyak pihak.

Keberpihakan pada ekonomi berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi budaya Dayak Iban yang dilakukan para perempuan penenun ini juga didukung oleh para lelaki Dayak Iban. Mereka membantu dalam proses pencarian bahan pewarnaan, membuat alat tenun hingga membantu proses produksinya.

Tenun bisa menjadi harapan bagi perempuan Dayak Iban untuk semakin kuat melestarikan budaya yang memberikan manfaat ekonomi, tanpa meninggalkan kampungnya. Dari tangan-tangan mereka inilah, tenun dayak iban akan terus berkembang dan dikenal.

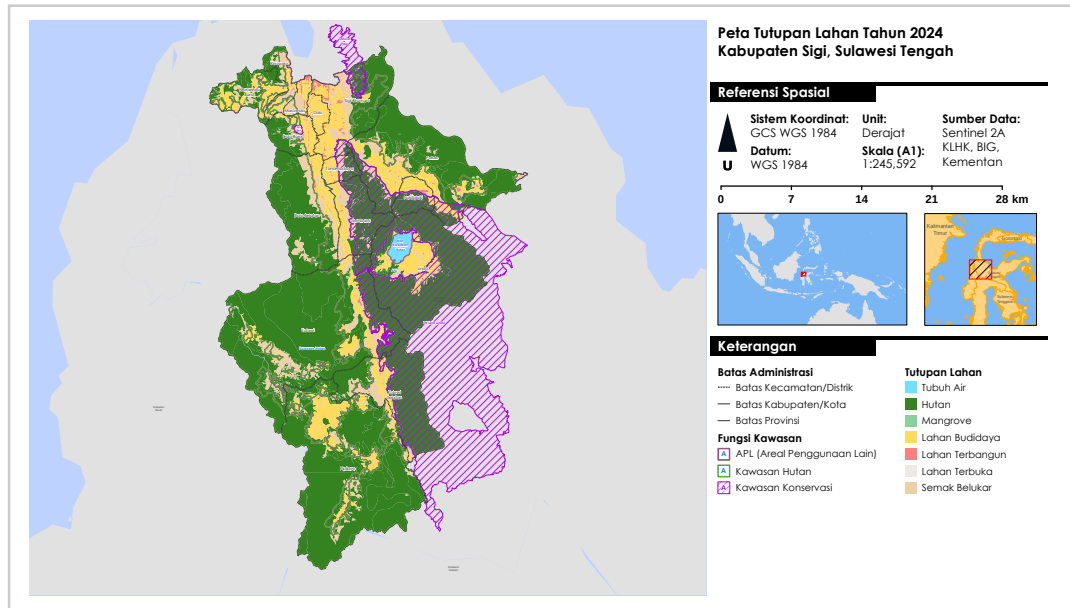
Melalui kolaborasi ini, Kapuas Hulu tidak hanya melestarikan warisan budaya tenun Dayak Iban, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal, terutama perempuan, dan membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Inovasi pewarna alami

ini menjadi contoh nyata bagaimana tradisi dan modernitas dapat bersinergi demi masa depan yang lebih cerah.

Catatan: Cerita ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif dan pengalaman dari tapak, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas kerja LTKL



Kabupaten SIGI



LINGKUNGAN

Luas Wilayah:
5.196,02 km²
519.602 Ha

Luas kawasan hutan:
380.781,70 Ha

Luas APL berhutan:
138.289,36 Ha
34.269,31 Ha

Komitmen Kontribusi Kabupaten di Fase Tumbuh:
Melindungi setidaknya 37.600 Ha hutan dan ekosistem penting yang ada di yurisdiksi kabupaten



EKONOMI

PDRB dan sektor penyumbang:
didapatkan dari
1. Kontribusi Sektor Pariwisata Rp218.619.082
2. Kontribusi sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 41,17 (%)

PAD dan sektor penyumbang:
PAD Sektor Pariwisata Rp218.619.082

Potensi komoditas HHBK unggulan:
Kopi, Kakao, Vanili, Ekowisata, Sereh Wangi, Bambu



SOSIAL

Jumlah penduduk:
29.8 ribu jiwa

Indeks Gini
0,246

Angkatan kerja dan % pengangguran:
Pengangguran 2,55%.

Suku etnis/adat:
Komunitas adat utama: Kaili, dengan sub-etnis seperti Kulawi, Da'a, Unde, Kantu', dan lainnya



KULTUR/BUDAYA

Kawasan cagar budaya/sejarah:
Situs Vatunonju (Batu Lumpang)
Makam Maradindo (Panglima Adat Lindu)

Adat setempat:
Gawai Dayak / Raego — tarian dan ritual panen tradisional masyarakat Kulawi/Kaili di Lindu dan Lore Lindu
Hukum Adat Ngata Toro — filosofi Hintuwu (hubungan manusia), Katuwua (manusia-alam), dan hukum adat Ombo (denda terhadap kerusakan situs megalitik)
Peran aktif Dewan Adat dan Pemerintah Daerah dalam menjaga adat dan harmoni sosial, serta perlindungan kawasan hijau sebagai warisan budaya-lingkungan

Kemajuan Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kabupaten



Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan:

Kabupaten Sigi telah merancang RPJMD berdasarkan KLHS dan telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Sebagai bagian dari inisiatif Sigi Hijau, pemerintah daerah telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas minimal 17.393 hektar, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan melindungi ruang hidup berkelanjutan.

Pada aspek ekonomi dan sosial, Kabupaten Sigi berhasil menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Target penurunan tingkat pengangguran telah tercapai, dengan penurunan dari 3,02% pada tahun 2022 menjadi 2,55% di tahun 2024. Selain itu, persentase penduduk miskin juga menunjukkan tren penurunan, dari 13,05% pada 2021 menjadi 12,06% di tahun 2024, setara dengan sekitar 29.800 jiwa. Capaian ini menempatkan Kabupaten Sigi pada peringkat ketiga daerah dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertumbuhan ekonomi yang positif turut mendukung pencapaian ini. Kabupaten Sigi telah mencapai target peningkatan ekonomi dari sektor-sektor unggulan melalui strategi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis. Fokus diarahkan pada peningkatan pengelolaan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta penguatan sektor pariwisata dan ketahanan pangan. Sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan, Kabupaten Sigi juga terus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang ada.



Pilar Tata Kelola Multipihak:

Kabupaten Sigi telah memiliki peta tata batas desa dan wilayah kelola bersama, meskipun penyusunannya belum sepenuhnya melalui pemetaan partisipatif. Peta tersebut merujuk pada Peta Perhutanan Sosial yang menjadi acuan dalam penataan wilayah kelola masyarakat dan sebagai bagian dari komitmen Sigi hijau.

Tata kelola multipihak telah difasilitasi melalui pembentukan Forum Kelembagaan Multipihak yang aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Kabupaten Sigi juga telah memiliki basis data masyarakat hukum adat yang disusun melalui pendekatan partisipatif, mencerminkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.



Pilar Ko-kreasi Bisnis dan Investasi Berkelanjutan:

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi tercatat menurun dari 4,87% (2021) menjadi 3,5% (2024). Meski begitu, produktivitas komoditas strategis, termasuk padi, jagung, dan kedelai, menunjukkan capaian yang positif. Skor Pola Pangan Harapan juga meningkat, dengan realisasi tahun 2024 sebesar 80,06 atau 94,7% dari target.

Pemerintah terus mendorong penguatan sektor pertanian dan perikanan melalui berbagai program, seperti penyuluhan, pengembangan sarana prasarana, serta dukungan bagi wirausaha muda. Tantangan seperti alih fungsi lahan masih menjadi perhatian, namun langkah adaptif terus diupayakan untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Sigi.



Pilar Pengukuran Progres berkelanjutan Kabupaten:

Kabupaten Sigi menunjukkan pencapaian terhadap target kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah dengan RTRW yang berlaku, dimana di tahun 2024 rasio kesesuaiannya ada pada angka 0,08 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0,40.



Pilar Amplifikasi Narasi:

Kabupaten Sigi telah menerapkan sistem informasi kabupaten dengan sistem satu data yang sudah dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam berbagipakai data dan sudah dapat diakses oleh publik.



Aktivasi Communal Space melalui Diskusi Kemajuan Kabupaten Sigi

Ruang Komunal dan Rumah Produksi Bersama Untuk Sigi Hijau

Selama 17 tahun Kabupaten Sigi telah berdiri dan 70% wilayahnya didominasi oleh tutupan hutan. Menariknya, Kabupaten ini baru terbebas dari predikat daerah tertinggal bersama dua kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yang lalu. Namun, Sigi menjadi salah satu kabupaten yang tidak memilih untuk mengambil langkah instan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Tutupan hutan yang selalu dijaga karena budaya yang terus dirawat.

Pengembangan ekonomi restoratif di Kabupaten Sigi mendorong model yang tidak hanya berfokus ke pertumbuhan eksponensial tapi secara sadar mengatur ambang batas lingkungan dan sosial budaya dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang telah didorong melalui intervensi pengembangan komoditas kopi dan vanila melalui skema tumpangsari dan pertanian regeneratif dengan membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk Kabupaten Sigi untuk mendukung proses hilirisasi basis alam.

Rumah Produksi Bersama Kabupaten Sigi dirancang untuk mendukung interaksi sosial, pemberdayaan komunitas, dan penguatan ekonomi lokal. Area tersebut terdiri dari pabrik mini dan fasilitas pemrosesan untuk komoditas atau bahan baku basis hutan.

Perjalanan komoditas dari perkebunan yang dikelola secara tumpangsari, dipanen, diproses menjadi produk setengah jadi di Unit Pengelolaan Hasil (UPH) yang terletak di desa terdekat dari sumber lokasi komoditas tersebut, kemudian diantar ke Rumah Produksi Bersama--yang letaknya lebih dekat dengan perkotaan--untuk dicek kualitasnya, dilakukan penelitian dan pengembangan, dan dijadikan tempat distribusi ke pasar.

Selain itu, menariknya rumah produksi bersama tersebut berdampingan dengan tumbuhnya ruang komunal bersama yang dijadikan tempat berkumpul dan bertukar ide masyarakat Sigi khususnya orang-orang muda. Ruang ini dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antar pihak, termasuk komunitas lokal, masyarakat sipil, pihak swasta, dan pemerintah daerah. Tujuan ruang komunal ini juga untuk menciptakan ruang yang mendukung inovasi sosial, di mana ide-ide kreatif dapat berkembang. Salah satu contoh yang telah dilakukan adalah membuka pintu ruang komunal sebagai pusat

kegiatan komunitas orang muda, melalui agenda: kumpul komunitas, mural yang menceritakan perjalanan komoditas lestari, dan pameran hasil inovasi.

Dari setiap perjumpaan di Ruang Komunal Gampiri, gagasan demi gagasan terus mengalir. Sebagai markas kolaborasi ekonomi lestari, kini sampailah pada ide menjadikan ekowisata sebagai misi berikutnya. Narasi ekonomi lestari yang sudah kuat lewat inkubasi produk, kini direncanakan terintegrasi dengan potensi wisata berbasis alam dan budaya. Inisiasi pertama dimulai dari kegiatan Gowes Gampiri bersama Komunitas Drama Baik Bike pertengahan tahun lalu. Rute mengayuh sepeda melintasi persawahan, pedesaan, dan perbukitan Sigi memberi gambaran jelas bahwa lanskap ini layak dikembangkan sebagai destinasi ekowisata.



Harapan kami, ruang produksi dan ruang publik bersama ini bisa jadi wadah seluruh masyarakat, bukan hanya anak muda, untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal,”

Nedya Sinintha Maulaning, Gampiri Interaksi Lestari.

Asa Desa Bunga Meraih TORA

Di Desa Bunga, Kecamatan Palolo, masyarakat memiliki tradisi Mapalus yaitu sistem gotong-royong tradisional untuk mengelola kebun. Sistem ini tidak hanya menjadi sarana produksi pangan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kekerabatan di antara masyarakat. Namun, ruang gerak masyarakat dalam melaksanakan mapalus mulai terbatas sejak adanya pemberian izin Hak Guna Usaha HGU) seluas 107 ha kepada PT. Tulus Sintuwu Karya di Desa Bunga.

Dalam praktiknya, PT. TSK terindikasi tidak memanfaatkan HGU tersebut secara optimal, sehingga lahannya masuk kategori tanah terindikasi terlantar. Pada tahun 2010, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi melakukan pendataan terhadap tanah-tanah terindikasi terlantar dan salah satu yang teridentifikasi adalah HGU PT. TSK. Hasil pendataan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melalui pengiriman surat usulan penetapan tanah terlantar atas HGU PT. TSK kepada pemerintah pusat.

Proses administrasi ini berjalan cukup panjang. Pada tahun 2021, Bupati Sigi mengirimkan surat resmi kepada

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN terkait penertiban HGU PT. TSK. Dalam rangka percepatan penyelesaian, Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mengusulkan agar lahan tersebut dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Sebagai tindak lanjut, pada November 2021, BPN Kabupaten Sigi melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap 78,89 hektare lahan yang berada di Area Penggunaan Lain (APL) dan sebelumnya merupakan bagian dari HGU PT. TSK. Proses advokasi pemanfaatan tanah terlantar ini melibatkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat Desa Bunga. Hingga pada tahun 2024, status tanah tersebut resmi berubah menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Perubahan status ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah kabupaten untuk mengajukan penetapan lahan tersebut menjadi TORA dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Upaya ini berhasil, dan BPN menetapkan sekitar 72 ha eks-HGU PT. TSK yang berada di APL sebagai TORA untuk masyarakat Desa Bunga.

Dari sisi masyarakat, untuk mempercepat proses Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), masyarakat

membentuk Forum Petani Karere pada Maret 2022. Forum ini bertujuan untuk memperjuangkan hak atas lahan dan mendukung proses legalisasi melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Masyarakat berharap proses penetapan TORA dapat segera direalisasikan guna memberikan kepastian hukum atas penguasaan lahan, serta memperluas akses pasar bagi produk pertanian mereka. Pemanfaatan TORA diharapkan dapat dioptimalkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah kabupaten, masyarakat desa bunga, dan mitra pendamping, sehingga pemanfaatan TORA dapat memberikan manfaat yang maksimal.

“Masyarakat akan didampingi agar bisa mengelola lahan dengan pola beragam komoditas untuk keberlanjutan ekonomi. Hasilnya juga dihubungkan dengan Gampiri sebagai trading hub dan inkubator hilirisasi produk,”

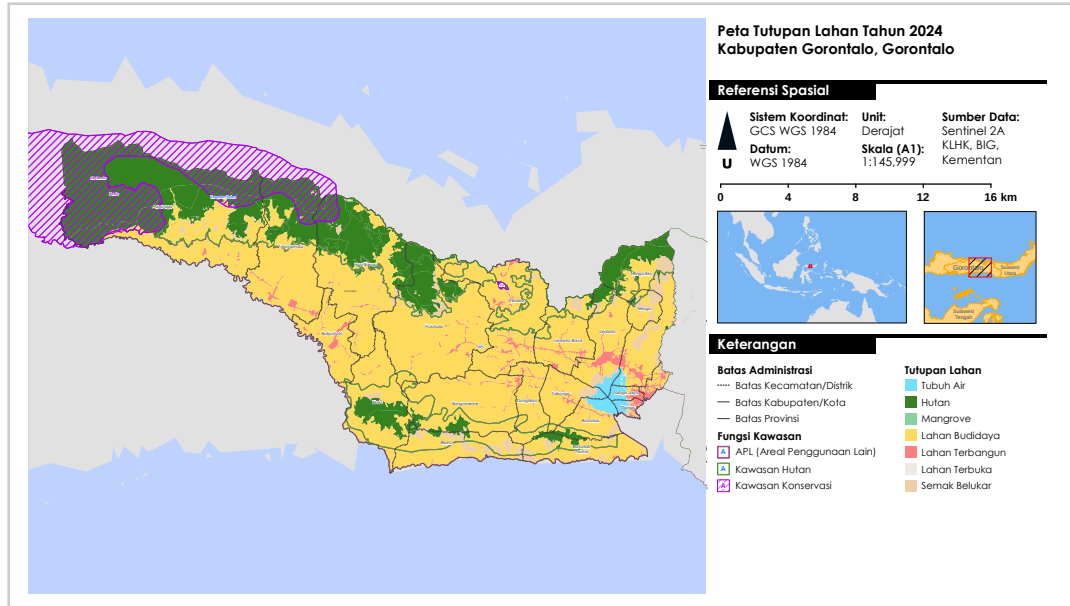
tutup Efansyah Podung sebagai perwakilan dari Forum Multipihak Sigi Hijau.

Dengan hadirnya ruang komunal, rumah produksi bersama hingga terbukanya akses lahan seperti TORA yang dimanfaatkan secara optimal ini, menandai progres dari inisiatif skala kecil menuju proses yang lebih terintegrasi dan kolektif dalam membangun ekonomi lokal.

Catatan: Cerita ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif dan pengalaman dari tapak, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas kerja LTKL



Kabupaten GORONTALO



LINGKUNGAN

Luas Wilayah:
2.189,08 Km²
216.036,37 ha source

Luas kawasan hutan:
97832,41 Ha

Luas APL berhutan:
Luas APL 118,190 Ha
Tutupan hutan di APL 1,009,96 Ha

Komitmen Kontribusi Kabupaten di Fase Tumbuh:
Dalam tahap konsolidasi



EKONOMI

PDRB dan sektor penyumbang:
Rp17.095,53 Miliar Rupiah
1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 38,54%
2. Sektor Konstruksi 14,38%
3. Perdagangan Besar dan Eceran - 11,20%

PAD dan sektor penyumbang:
Rp144,49 Miliar Rupiah

Potensi komoditas HHBK unggulan:
Kelapa, Kopi



SOSIAL

Jumlah penduduk:
418.244 penduduk pada 2023

Indeks Gini
0,379 (2023)

Angkatan kerja dan % pengangguran:
72,89% angkatan kerja dan 2,48% pengangguran pada 2023.

Suku etnis/adat:
Mayoritas Suku Gorontalo



KULTUR/BUDAYA

Kawasan cagar budaya/sejarah:
Benteng Otanaha – peninggalan abad ke-16
Masjid Tua Hunto Sultan Amay – masjid tertua di Gorontalo (1495 M)
Rumah Adat Dulohupa – tempat musyawarah adat
Kompleks Istana Ilahudu – jejak kerajaan Gorontalo

Adat setempat:
Moloopu – penyambutan pejabat adat/resmi
Molontalo – upacara 7 bulan kehamilan
Modutu – lamaran adat
Akad & Walima – upacara pernikahan adat Islam-Gorontalo
Adat kematian – seperti Tahlihan dan Aqiqah lokal

Kemajuan Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kabupaten



Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan:

Kabupaten Gorontalo telah menyusun RPJMD berbasis KLHS yang juga sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), termasuk pemetaan capaian TPB per-OPD. Dari sisi ketahanan pangan, kebutuhan ideal lahan pangan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 4.378 hektar. Saat ini, luas lahan sawah yang tersedia mencapai 18.628,37 hektar, menunjukkan bahwa ketersediaan lahan mencukupi.

Di sektor ketenagakerjaan, partisipasi angkatan kerja menunjukkan tren positif, dengan capaian 72,89% pada tahun 2023. Namun, tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit peningkatan, dari 1,83% pada 2022 menjadi 2,48% pada 2023. Pertumbuhan ekonomi daerah tetap kuat dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp41,75 juta dimana ini melampaui target awal yang ditetapkan dalam kisaran Rp36–38 juta.

Di sisi pengentasan kemiskinan, Kabupaten Gorontalo terus menunjukkan komitmen dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui SK Bupati Nomor 122/28/11/2021. Meskipun target penurunan kemiskinan belum sepenuhnya tercapai, tren penurunan terus berlangsung secara bertahap dari tahun ke tahun. Sementara itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah diakui di tingkat praktik dan pengambilan kebijakan, namun belum dituangkan dalam bentuk produk hukum atau dokumen perencanaan yang formal di tingkat kabupaten.



Pilar Tata Kelola Multipihak:

Kabupaten Gorontalo saat ini belum memiliki peta tata batas desa maupun wilayah kelola bersama yang disusun melalui proses pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat. Forum Kelembagaan Multipihak masih dalam tahap pembentukan sebagai wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, basis data masyarakat hukum adat di wilayah kabupaten juga masih berada pada tahap pengembangan.



Pilar Ko-kreasi Bisnis dan Investasi Berkelanjutan:

Kabupaten Gorontalo menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat dan progresif sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 4,10%, melampaui target awal yang ditetapkan dalam rentang 2–4 persen. Di sisi lain, indikator kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan capaian PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp41,75 juta jauh melampaui target sebesar Rp36–38 juta. Capaian ini menandai resiliensi ekonomi daerah yang terus terjaga.

Pada sektor pangan strategis, gambaran yang muncul cukup beragam. Produksi padi tahun 2024 mencapai 128.516 ton dari target 139.442 ton. Meski belum menyentuh target, angka ini mencerminkan kemajuan yang berarti jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatat 89.605 ton. Sementara itu, lonjakan signifikan terjadi pada produksi jagung yang tidak hanya melampaui target 363.739 ton, tetapi juga mengalami peningkatan drastis dengan realisasi sebesar 427.320 ton—naik tajam dari capaian tahun 2023 sebesar 258.414 ton. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten gorontalo terus mempertahankan potensinya sebagai kabupaten yang mendukung ketahanan pangan di Provinsi.

Capaian ini menggambarkan arah yang progresif dalam penguatan sektor pangan dan produktivitas daerah. Namun, disparitas dalam pencapaian komoditas strategis menunjukkan bahwa upaya konsolidasi lintas sektor masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan efisiensi produksi maupun dukungan infrastruktur pertanian yang lebih merata. Ke depan, sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.



Pilar Pengukuran Progres Berkelanjutan Kabupaten:

Kabupaten Gorontalo saat ini masih dalam proses aktualisasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan ketentuan RTRW yang berlaku.



Pilar Amplifikasi Narasi:

Kabupaten Gorontalo masih dalam proses menerapkan sistem informasi berbasis prinsip Satu Data Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh OPD, sekaligus mendorong agar platform satu data kabupaten dapat diakses secara terbuka oleh publik.



Potret Perkebunan Kelapa Tampak Atas Kabupaten Gorontalo

Kolaborasi dalam Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selama tahun 2024–2025, Kabupaten Gorontalo berhasil menunjukkan inisiatif dalam mengembangkan Sekolah Kampung Gorontalo, sebuah program pendidikan berbasis komunitas yang memberdayakan masyarakat setempat melalui pembelajaran inovatif dan pemanfaatan potensi lokal. Program ini bukan hanya mengedukasi anak-anak, tetapi juga memberdayakan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan kearifan lokal secara berkelanjutan.

Kolaborasi antar berbagai pihak menjadi kunci utama dalam kesuksesan Sekolah Kampung Gorontalo. WIRE-G, sebagai fasilitator utama, telah bekerja sama dengan Terasmitra, organisasi nasional yang mendukung pendidikan berbasis komunitas, serta berbagai mitra lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat program pendidikan, tetapi juga membuka akses kepada berbagai sumber daya yang mendukung keberlanjutan sekolah kampung. Komunitas 1000 Guru, yang merupakan relawan pengajaran dari seluruh Indonesia, turut memberikan

kontribusinya dengan menjadi pengajar di desa-desa terpencil di Gorontalo. Melalui kegiatan ini, mereka berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang, mulai dari literasi dasar hingga kewirausahaan sosial, yang memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat setempat.



Sekolah Kampung menjadi salah satu sarana belajar untuk mengembangkan diri sekaligus mengasah kepekaan sosial bagi para sukarelawanannya dan memberikan kesempatan untuk melangkah dan melihat dari sudut pandang berbeda,

Mega Anastasya Diska Mokoginta, Sekolah Kampung Gorontalo.

Selain itu, pemerintah desa turut berperan penting dalam kesuksesan Sekolah Kampung Gorontalo. Dukungan mereka berupa fasilitas dan sumber daya lokal sangat membantu dalam memastikan kegiatan berlangsung dengan lancar. Pemerintah desa juga aktif berkolaborasi dengan warga dan relawan untuk memastikan bahwa pendidikan ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,

terutama yang berada di wilayah terpencil. Keterlibatan pemerintah lokal memperkuat daya jangkau dan keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

Salah satu kolaborasi yang menonjol adalah program Traveling & Teaching yang melibatkan 1000 Guru dan WIRE-G di Desa Pangahu. Dalam kegiatan ini, relawan 1000 Guru bersama dengan fasilitator dari WIRE-G mengajarkan keterampilan praktis kepada anak-anak dan masyarakat desa, sambil mengenalkan mereka pada pentingnya menjaga lingkungan dan keberagaman pangan lokal. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan berbasis komunitas tidak hanya mengembangkan keterampilan tetapi juga membangun kesadaran sosial dan lingkungan.



Sekolah informal ini juga membuka berkolaborasi dengan institusi pendidikan Perguruan Tinggi. Salah satunya, relawan akademisi dari jurusan Agribisnis Universitas Gorontalo yang menjadikan Sekolah Kampung Gorontalo sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian Kepada

Masyarakat (PKM). Mereka membangun laboratorium belajar anak-anak untuk belajar hulu hilir cara pandang agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan”

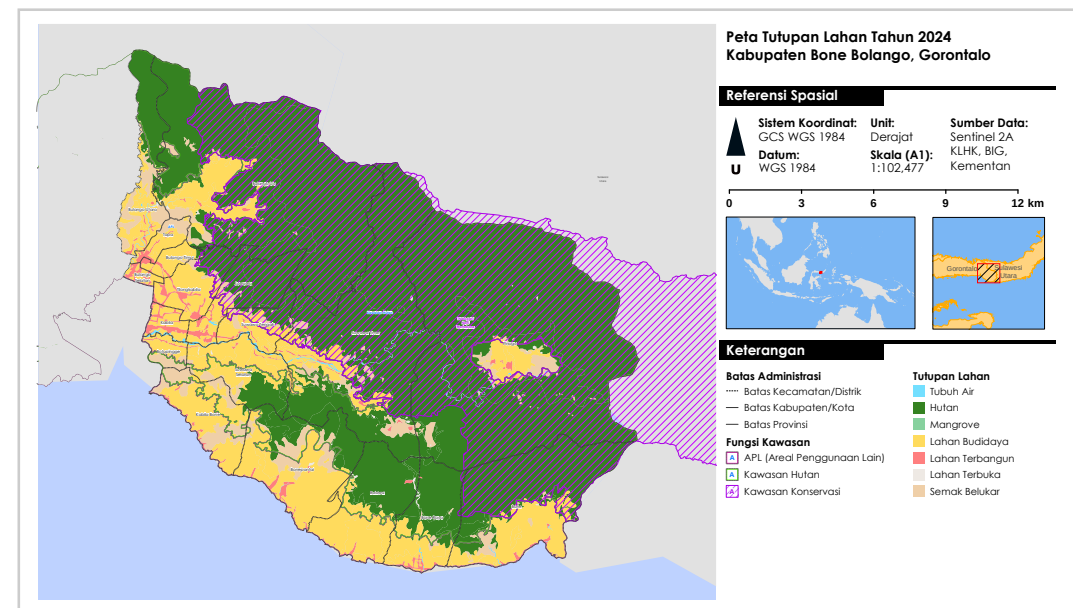
Puput Pakaya, Sekolah Kampung Gorontalo.

Secara keseluruhan, Sekolah Kampung Gorontalo menunjukkan hasil yang menggembirakan, berkat sinergi antara berbagai pihak yang bekerja bersama menuju satu tujuan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya proses pendidikan, tetapi juga menguatkan kapasitas masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang semakin solid, Sekolah Kampung Gorontalo telah menjadi model bagi program pendidikan berbasis komunitas yang dapat diadaptasi di kabupaten lain.

Catatan: Cerita ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif dan pengalaman dari tapak, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas kerja LTKL



Kabupaten BONE BOLANGO



LINGKUNGAN

Luas Wilayah:
Luas wilayah sebesar 1887,87 Km²
terdiri dari 18 kecamatan, 165 desa dan 5 kelurahan.

Luas kawasan hutan:
140.209,45 Ha

Luas APL berhutan:
Luas APL 48.690 Ha
Tutupan hutan di APL 3.068,24 Ha

Komitmen Kontribusi Kabupaten di Fase Tumbuh:
30 Ha Kawasan Hutan dan Ekosistem Penting berhasil Terlindungi



EKONOMI

PDRB dan sektor penyumbang:
Rp 6.049,22 miliar didapatkan dari

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 35,19%
2. Sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,79%
3. Sektor konstruksi sebesar 12,09%.

PAD dan sektor penyumbang:
Rp 123.866.448.115,71 didapatkan dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Lain-Lain PAD yang Sah.

(LKPJ, p. 1-27)

Potensi komoditas HHBK unggulan:
Kelapa, Kopi



SOSIAL

Jumlah penduduk:
172.301 penduduk

Indeks Gini
0,413

Angkatan kerja dan % pengangguran:
85.657 Angkatan Kerja dan 3,91% pengangguran

Suku etnis/adat:
Suku Suwawa dan Suku Bolango



KULTUR/BUDAYA

Kawasan cagar budaya/sejarah:
Makam Raja Suwawa
Benteng Otanaha (berbagi wilayah dengan Kota Gorontalo)

Adat setempat:
Modutu (kerja gotong royong)
Tanggomo (syair adat)

Kemajuan Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kabupaten



Pilar Inovasi Kebijakan dan Perencanaan:

Kabupaten Bone Bolango telah menyusun RPJMD berbasis KLHS yang juga sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), termasuk pemetaan capaian TPB per-OPD. Stabilitas ketersediaan pangan daerah juga telah tercapai. PDRB ADHB naik dari Rp5.698,78 miliar pada 2023 menjadi Rp6.049,22 miliar pada 2024 dimana sektor penyumbang terbesar 35,19% adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. disisi lain, laju pertumbuhan PDRB ADHK melambat dari 4,48% di 2023 menjadi 4,19% di 2024. Target penurunan pengangguran dan peningkatan ekonomi dari sektor unggulan masih dalam proses pencapaian, sementara tren kemiskinan menurun namun masih tergolong tinggi, dan indeks Gini belum mencapai target. Dari sisi sosial budaya, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat telah diperkuat melalui Perda No. 8 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan lembaga adat.

Pilar Tata Kelola Multipihak:



Kabupaten Bone Bolango sudah memiliki peta batas desa sebagai dasar tata ruang wilayah. Namun, sebaliknya saat ini tata kelola multipihak di Kabupaten Bone Bolango masih belum optimal, ditandai dengan belum terbentuknya Forum Kelembagaan Multipihak dalam perencanaan pembangunan, serta belum tersedianya basis data masyarakat hukum adat yang disusun secara partisipatif dan didukung oleh peraturan daerah.



Pilar Ko-kreasi Bisnis dan Investasi Berkelanjutan:

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango terus bertumbuh dengan peningkatan PDRB ADHB dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,05 triliun pada 2023, serta realisasi pertumbuhan ekonomi 4,19% dari target 5%. PDRB per kapita ikut meningkat, baik secara ADHK dari Rp20,15 juta menjadi Rp20,80 juta, maupun ADHB dari Rp31,71 juta menjadi Rp33,81 juta. Di sektor komoditas strategis, capaian produksi kopi mencapai 0,99 ton dari target 0,25 ton, cengkeh terealisasi 0,45 ton, dan aren sesuai target 0,25 ton, sedangkan cabai hanya terealisasi –13,16 ton dari target 2 ton. Pada tanaman pangan utama, produksi jagung melampaui target sebesar 53.414 ton dari target 24.480 ton, sementara padi hanya mencapai 22.350 ton dari target 25.176 ton. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menghadirkan tantangan produktivitas akibat hambatan struktural, cuaca ekstrem, serangan hama, dan keterbatasan infrastruktur, sehingga penguatan ko-kreasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani menjadi penting guna memastikan keberlanjutan dan ketahanan sektor pangan di Kabupaten Bone Bolango.



Pilar Pengukuran progres berkelanjutan kabupaten:

Kabupaten Bone Bolango sudah memiliki data aktual pemanfaatan ruang dan terus menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki tata ruangnya, dibuktikan dengan sudah adanya evaluasi terhadap RTRW 2011-2031 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2012 . Evaluasi yang diajukan pada tahun 2018 melalui dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2031. Langkah ini menunjukkan bukti nyata bahwa Kabupaten Bone Bolango terus berproses untuk mencapai tata ruang yang berkelanjutan.



Pilar Amplifikasi Narasi:

Kabupaten Bone Bolango telah memiliki dasar kelembagaan dan penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Satu Data Indonesia Bone Bolango. Regulasi ini menjadi landasan awal bagi pemanfaatan sistem Satu Data oleh para Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun demikian, saat ini akses publik ke portal Satu Data Bone Bolango masih terbatas.



Diskusi Multipihak Perkembangan Ekonomi Pedesaan berbasis Konservasi Lingkungan di Kabupaten Bone Bolango

Bone Bolango – Pertanian Cerdas Iklim di Desa Ilomata

Desa Ilomata di Kecamatan Bulango Ulu, Bone Bolango, dahulu identik dengan jagung monokultur. Lahan yang terus digarap tanpa henti membuat hutan gundul, rawan longsor, dan masyarakat terjebak pada tengkulak. Namun perlahan, wajah desa berubah melalui pendekatan Pertanian Cerdas Iklim (Climate Smart Agriculture/ CSA) yang difasilitasi Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda).

Petani mulai menerapkan pola tumpangsari, menanam aren, kelapa, kopi, buah, dan sayuran di samping jagung. Lahan miring ditata dengan terasering dan jalur vegetasi alami, sehingga erosi berkurang dan tutupan hijau kembali muncul. Diversifikasi ini membuat pendapatan warga lebih stabil, ditopang produk olahan seperti gula aren, minyak kelapa kampung, hingga madu.

Transformasi semakin kuat ketika warga membentuk Pelayanan Usaha Masyarakat Konservasi (PUMK) Cahaya Terang Ilomata. Kelompok ini menjadi wadah belajar sekaligus penggerak ekonomi lokal. Produksi minyak kelapa kampung, misalnya, kini bernilai omzet jutaan rupiah per bulan, melibatkan perempuan dalam pengolahan dan membuka peluang simpan pinjam kelompok. Dari ketergantungan pada tengkulak, kini warga belajar menabung dan berusaha secara mandiri.

Selain bertani, masyarakat juga menjaga hutan lewat patroli bersama Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Kegiatan ini tidak hanya memantau ancaman deforestasi, tetapi juga membuka ide pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Wisata pengamatan burung, susur sungai, hingga tur agroforestri kini menjadi daya tarik baru, memperkuat kesadaran bahwa konservasi bisa sejalan dengan peningkatan ekonomi.

Kini Ilomata dikenal sebagai contoh desa hijau yang berdaya. Kolaborasi multipihak—petani, Japesda, pemerintah daerah, hingga Balai TNBNW—membuktikan bahwa transisi dari monokultur jagung menuju pertanian cerdas iklim bisa dilakukan. Hasilnya bukan hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga menciptakan

desa dengan ekonomi lebih beragam, pangan lebih mandiri, dan masyarakat lebih sejahtera.

Ilomata menunjukkan bahwa pertanian cerdas iklim bukan sekadar teknik budidaya, melainkan jalan menuju kemandirian dan harapan. Dari satu desa, lahir inspirasi besar bagi Bone Bolango dalam perjalanan menuju kabupaten lestari.



Banyak perubahan, dari sebelumnya berhutang ke tengkulak jadi bisa menabung. Contohnya saat Lebaran, ada yang mengambil tabungan hingga satu juta rupiah untuk tambahan kebutuhan Hari Raya, atau untuk kepentingan sekolah anak, modal usaha sembako hingga modal pertanian,

Zainudin Yusuf - Japesda.

Memperbesar Skala, Menciptakan Ilomata lain.

Upaya di Ilomata mendapat dukungan dari kebijakan Kabupaten. RPJMD Bone Bolango menempatkan isu keberlanjutan, pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan strategi agromaritim sebagai prioritas. Dukungan nyata diwujudkan melalui penyediaan bibit tanaman tahunan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga petani punya modal menata kembali lahannya.

Salah satu program unggulan Bupati untuk mendukung ini adalah Integrated and Smart Agriculture Development for Sustainable Model and Initiative of Local Empowerment (ISAD-SMILE). Ini adalah inisiatif pemkab untuk mendukung pembangunan pertanian cerdas, terintegrasi, mampu beradaptasi dengan kelestarian lingkungan, dan kearifan lokal. Program ini akan diaplikasikan dengan mengintegrasikannya dalam sistem pendidikan formal melalui kurikulum yang fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Sekolah Alam dan konvensional, serta pendidikan

informal melalui sekolah lapang on farm dan off farm. Dengan mengelola perkebunan dan pertanian secara lestari, masyarakat bisa lebih berdaya untuk mewujudkan ketahanan pangan jangka panjang.



Semua upaya ini membutuhkan dukungan dari multipihak, melalui kemitraan konservasi yang mengedepankan prinsip inklusivitas, warga desa penyangga TNBNW mampu mengelola kawasan yang berkeadilan dan saling menguntungkan.

Basir Noho, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan SDA

Catatan: Cerita ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif dan pengalaman dari tapak, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas kerja LTKL

DARI BALIK LENSA & CERITA JEJARING DI TAPAK

4



Cerita Foto



Menyadari Dua Wajah Alam

Alam menyimpan dua wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia memberi kehidupan: udara bersih, air, pangan yang melimpah, serta sumber penghidupan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, bila dibiarkan rusak atau dieksploitasi tanpa kendali, alam bisa menjadi sumber bencana — banjir, longsor, kekeringan, dan kerusakan ekosistem akan menjadi teman. Pilihan ada di tangan manusia: menjaga dan memulihkan alam, atau mengabaikannya. Masa depan kabupaten, masyarakat, dan bumi bergantung pada keputusan kita hari ini.





Merajut Proses Multipihak

Mewujudkan kabupaten lestari tak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah daerah, masyarakat adat, OMS, sektor swasta, dan orang muda duduk bersama. Dari ruang dialog hingga lokakarya, bersama merumuskan kebijakan inklusif yang menjaga alam dan menyejahterakan warga. Dengan menyelaraskan target bersama dan memetakan kemitraan, setiap kebijakan dan program mencerminkan kerja sama yang nyata untuk masa depan lestari.



Membaca Masa Depan, Menenun Harapan

Dari riset dan kolaborasi multipihak lahir kebijakan yang berpihak pada alam dan masyarakat. Bersama, kami menenun masa depan yang lestari, mandiri, dan berkeadilan. Melalui perencanaan inovatif dan riset berbasis bukti, lahir kebijakan yang adaptif, inklusif, dan selaras dengan kelestarian alam. Dokumen strategis seperti RPJMD dan Peta Jalan Hijau menjadi panduan nyata untuk pembangunan lestari dan mandiri.





Ko-Kreasi Bisnis Lestari: Menghubungkan Nilai, Menguatkan Komunitas

Dari produksi hingga pasar, setiap nilai produk lokal dirangkai melalui kolaborasi dan bisnis lestari. Masyarakat diberdayakan, ekonomi tumbuh, dan peluang pasar pun terbuka lebih luas, membentuk ekosistem yang berkelanjutan.





Mengukur Kemajuan Menuju Kabupaten Lestari

Melalui tata kelola data, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam menjadi nyata. Pemantauan sederhana berbasis data membantu memantau dan memvalidasi informasi, serta menyusun profil pembangunan lestari secara berkala. Data bukan hanya alat ukur, tetapi juga kompas untuk memastikan setiap keputusan sejalan dengan tujuan keberlanjutan.





Mengangkat Suara dan Identitas Kabupaten

Narasi pembangunan lestari diperkuat melalui kolaborasi multipihak, ekowisata, komunitas muda, seni, dan budaya lokal. Aktivitas seperti ExploNation, ruang komunal, dan pameran kreatif memperlihatkan praktik ekonomi restoratif, memberdayakan masyarakat, dan meneguhkan identitas kabupaten, sambil menjangkau



audiens nasional dan internasional. Narasi yang terstruktur dan kolaboratif mengangkat potensi lokal, memberdayakan masyarakat, dan meneguhkan identitas kabupaten sebagai pusat ekonomi lestari.





Menyongsong Masa Depan Lestari dan Berdaya

Sejak 2017, kami bertransformasi menapaki jalan bersama yang membuktikan: manusia dan alam bisa tumbuh bersama. Dari sini lahir harapan akan masa depan di mana generasi mendatang hidup sejahtera, berdaya, dan selalu selaras dengan bumi yang lestari.



DI BALIK DAPUR SEKRETARIAT MEMBANGUN EKOSISTEM LTKL

5



Di tengah bentangan hutan yang luas, kanopi adalah lapisan yang menyatukan pohon-pohon tanpa mengubah jati diri mereka. Ia tidak lebih tinggi atau lebih mulia dari pohon yang menopangnya, justru ia ada karena semua pohon tumbuh bersama.

“Dari sudut ruangan ini, kami melihat peran kami sebagai Sekretariat LTKL seperti kanopi itu”

Tugasnya adalah menjembatani dan menyambungkan pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan mitra, agar mereka saling melihat, mendengar, dan bekerja menuju tujuan yang sama. Sebagai Strategic Convenor, Sekretariat menciptakan ruang temu di mana ide-ide bisa bertukar, komitmen bisa tumbuh, dan langkah bersama bisa diambil.

Namun, pertemuan saja tidak cukup. Seperti kanopi yang membantu cahaya, air, dan nutrisi mengalir, Sekretariat berperan sebagai **Resource Connector**, menghubungkan kebutuhan dengan dukungan, memastikan setiap inisiatif di akar, batang, dan cabang punya tenaga untuk hidup.

Di bawah naungan kanopi, bibit-bibit muda punya kesempatan tumbuh. Sekretariat sebagai **Capacity Builder** menjadi teman perjalanan untuk tumbuh, agar pemerintah daerah, jejaring mitra, inovator dan pengusaha lokal, serta generasi muda siap menjadi bagian dari penopang ekosistem di masa depan.

Dari kejauhan, kanopi menjadi tanda kehidupan. Sekretariat sebagai **Impact Storyteller** membawa cerita nyata dari lapangan ke mata nasional dan global, bukan untuk mengklaim keberhasilan, tapi untuk menunjukkan bahwa banyak tangan sudah bekerja dan hasilnya mulai terlihat.

Dan seperti kanopi yang menjaga keseimbangan suhu, kelembapan, dan hubungan antarspesies, Sekretariat berperan sebagai **System Steward**, memastikan proses tata kelola berjalan seirama dengan batas-batas ekosistem.

Tapi kanopi tidak bisa berdiri sendiri. Ia rapuh bila pohon-pohon di bawahnya melemah. Kanopi juga bukanlah pohon abadi. Ada masanya ia berganti, memberi ruang bagi pohon-pohon yang dulu ia lindungi untuk tumbuh dan membentuk kanopi mereka sendiri. Begitu juga Sekretariat LTKL, perannya sebagai penghubung tidak akan selamanya ada. Yang akan menentukan keberlanjutan adalah komitmen semua pihak untuk terus saling menopang, bahkan ketika kanopi awal ini tak lagi menaungi.

Karena hutan hanya bisa tumbuh utuh bila setiap pohon, setiap lapisan, dan setiap kehidupan di dalamnya bergerak bersama.

(Di balik Meja Sekretariat, 2025)

Bagaimana Perjalanan Sekretariat Selama ini?



1. Memperkuat Kapasitas dan Ekosistem LTKL

Pada tahun ini, Sekretariat LTKL melakukan proses evaluasi dan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, baik di tingkat internal sekretariat maupun di dalam ekosistem penting LTKL. Ekosistem ini mencakup instansi yang berperan sebagai sentra produksi, sentra inovasi, sentra inkubasi, sentra multipihak serta mitra strategis yang mendukung kerja-kerja LTKL di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Dari proses tersebut, teridentifikasi sejumlah kesenjangan kapasitas serta kebutuhan penguatan yang bersifat teknis, kelembagaan, maupun relasional. Karenanya sebagai tindak lanjut, LTKL merancang dan melaksanakan program



penguatan kapasitas yang *tailored* atau disesuaikan dengan kebutuhan strategis masing-masing pihak. Misalnya, LTKL menyelenggarakan sesi peningkatan kapasitas fasilitasi dan pelatihan komunikasi transformasional bagi para pihak yang menjalankan peran penghubung di kabupaten, guna memperkuat peran mereka dalam menjembatani kerja lintas aktor dan kebutuhan.

Sekretariat LTKL juga menciptakan ruang refleksi dan pembelajaran lintas mitra dan kabupaten, yang tidak hanya memperkuat kapabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan

dan kepemilikan bersama terhadap tujuan kolektif. Hal ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan serupa *Exchange Learning Program* dan pertemuan tim perumus yang terdiri atas berbagai pihak yang mendorong perubahan di kabupaten untuk menyusun program bersama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas bukan hanya tentang mentransfer keahlian, tetapi tentang bertumbuh bersama dalam sebuah ekosistem yang saling menguatkan, saling belajar, dan saling berbagi peran.

2. Mengelola Sumber Daya Secara Kolektif

Sekretariat mengelola sumber daya dengan prinsip transparansi, prioritas berbasis kebutuhan, dan sinergi lintas tim serta mitra. Perencanaan dilakukan secara tahunan dan triwulanan dengan melibatkan seluruh unit Sekretariat dan mempertimbangkan masukan anggota. Dalam pelaksanaannya, sekretariat menerapkan sistem kerja lintas-fungsi untuk menghindari duplikasi dan mendorong efisiensi. Pemanfaatan teknologi, penguatan sistem monitoring, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan juga menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya, baik manusia, waktu, maupun finansial, dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap pencapaian target bersama.

Namun, peran sekretariat tidak hanya berhenti pada pengelolaan sumber daya internal. Sebagai katalisator kolaborasi, sekretariat juga secara aktif mendorong terciptanya insentif bersama dan pendekatan pembiayaan kolaboratif antar mitra. Ini dilakukan melalui pemetaan peluang pendanaan lintas program, fasilitasi pertemuan antar mitra untuk menyelaraskan rencana kerja, serta upaya penggalangan dana (*fundraising*) yang diarahkan pada prioritas bersama.

Untuk mendukung pelaksanaan program yang belum memiliki pendanaan penuh namun dinilai strategis, sekretariat juga menginisiasi mekanisme mobilisasi pendanaan melalui skema sub hibah dan kontrak

kerja sama (*subcontracting*) kepada mitra pelaksana, baik di tingkat lokal maupun nasional yang berperan untuk membantu capaian kabupaten anggota. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi dan memperkuat kepemilikan program oleh para pihak di lapangan.

Selain itu, program sub hibah yang telah dilaksanakan terbukti telah mengaktivasi serta meningkatkan ekosistem pembangunan pada kabupaten yang menjadi target area fokus dengan melibatkan mitra-mitra pembangunan dalam mencapai target-target LTKL. Selain itu program sub hibah menciptakan ruang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola kelembagaan mitra-mitra



pembangunan, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Melalui proses pengajuan, penyaluran, hingga pelaporan dana, LTKL dan mitra secara aktif membangun kesepahaman mengenai prinsip transparansi, efisiensi penggunaan dana, serta pentingnya pelaporan berbasis data dan dampak. Interaksi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas, tetapi juga sebagai medium pembelajaran kolektif yang memperkuat kapasitas mitra dalam menyusun anggaran realistis, menjaga kelengkapan dokumentasi, dan mengelola audit internal. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya oleh sekretariat tidak hanya berorientasi pada efisiensi internal, tetapi juga menjadi strategi untuk memperluas kolaborasi, membangun keberlanjutan, dan memperkuat peran kolektif dalam mencapai transformasi daerah yang berkelanjutan.

3. Memperkuat Identitas dan Peran Sekretariat sebagai *Enabler* dan *Ecosystem Builder*

Selama satu tahun terakhir, Sekretariat belajar bahwa menjalankan peran dalam organisasi seperti LTKL bukanlah hal yang sederhana. Dengan banyaknya kepentingan dan pendekatan dari para pihak, posisi Sekretariat sebagai *enabler* sekaligus *ecosystem builder* menjadi sangat krusial untuk menjaga arah bersama menuju visi Kabupaten Lestari. Kami menyadari bahwa peran ini tidak hanya bersifat administratif atau koordinatif, tetapi juga sangat strategis dalam menciptakan ruang aman bagi dialog, penyelarasan agenda, serta membangun rasa saling percaya.

Seiring dengan mandat LTKL untuk menyelesaikan perannya di tahun 2030, kami juga menghadapi tantangan struktural dalam memastikan keberlanjutan. Upaya membentuk berbagai entitas kelembagaan di tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari ekosistem LTKL adalah langkah penting, namun tahun ini kami menyadari bahwa belum adanya strategi exit & scale yang terdefinisi dengan jelas—dan belum terhubung kuat dengan proses validasi serta penerimaan di tingkat kabupaten dan berpotensi melemahkan keberlanjutan

visi Kabupaten Lestari itu sendiri. Oleh karena itu, kami mulai melakukan peninjauan ulang dan pembaruan strategi kemitraan dengan entitas-entitas tersebut, untuk memastikan bahwa kolaborasi yang dibangun benar-benar berdampak dan tidak sekadar menjadi jargon. Tantangan terbesar yang kami identifikasi adalah kebutuhan akan tata kelola kolaborasi yang kuat serta kejelasan peran masing-masing pihak dalam mendukung tujuan bersama. Menyepakati posisi, peran, dan mandat di antara berbagai aktor menjadi hal yang sangat penting untuk dibangun bersama.

Di sisi lain, pembelajaran yang juga sangat mendasar adalah kesadaran bahwa di balik seluruh proses transformasi ini, terdapat manusia—individu-individu yang menggerakkan, memfasilitasi, dan menjembatani perubahan. Kami belajar bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada sistem dan strategi, tetapi juga pada kapabilitas para pelaku di dalamnya. Oleh karena itu, sekretariat menyadari pentingnya mendukung penguatan kapasitas



individu, baik di dalam tim maupun di antara mitra, agar mereka mampu menjalankan perannya secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Pembelajaran ini menjadi dasar bagi arah kerja kami di tahun berikutnya, yang akan lebih menekankan pada kapabilitas tidak hanya kapasitas sebagai fondasi penting dari proses kolektif menuju Kabupaten Lestari.

*“Sekretariat berperan sebagai **penggerak (enabler) dan pembangun ekosistem (ecosystem builder)** dengan menciptakan kondisi pemungkin serta mendorong **kemandirian kabupaten** melalui kolaborasi multipihak, untuk melahirkan **contoh nyata (proof of concept)** yang dapat menjadi **cetak biru pembangunan lestari**, menjaga alam sekaligus menyejahterakan masyarakat.”*

Ibarat seperti kanopi hutan yang terus menyesuaikan kondisi pohon-pohon yang berada dalam naungannya, Sekretariat sendiri juga berkembang dengan struktur yang terus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Saat ini, Sekretariat memiliki empat divisi utama yang bergerak sebagai satu tim yaitu (i) Program (Keanggotaan, Kemitraan Multipihak, Kebijakan & Perencanaan dan Bisnis Lestari); (ii) Pengembangan Institusi (Operasional & Tata Kelola Organisasi); (iii) Pembelajaran dan Dampak (Tata Kelola Pengetahuan, Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran); dan (iv) Jejaring Kolektif (Amplifikasi Narasi).

Saat ini, Sekretariat diampu oleh 49 orang yang mereposisi perannya lebih strategis untuk memastikan peran ini nantinya akan diemban oleh kabupaten anggota. Beberapa pekerjaan rumah masih menjadi catatan, namun peran ini juga menuntut untuk lebih adaptif dengan perubahan yang cukup masif. Ke depan, Sekretariat akan mengoptimalkan fungsinya dengan memastikan dan membantu peran mitra implementor yang mampu membantu transformasi kabupaten anggota menuju lestari dan mandiri.



Mempersiapkan fase berbunga dan berbuah